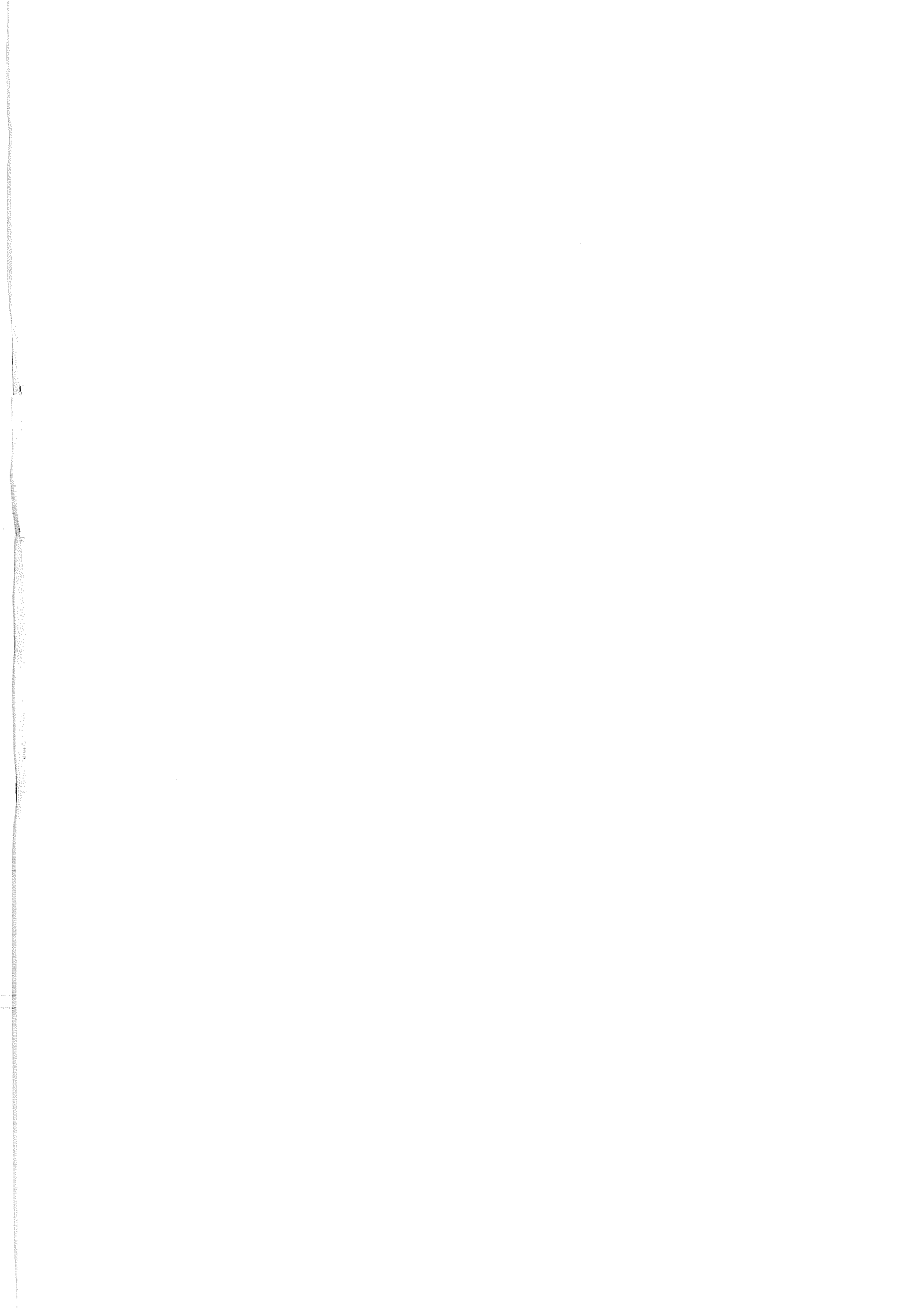


**Struktur Penduduk Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur :
Dampak Terhadap Ketahanan Ekonomi
Rumah Tangga**



**Struktur Penduduk Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur :
Dampak Terhadap Ketahanan Ekonomi
Rumah Tangga**

Penulis :

Haning Romdiati

Mita Noveria

Bayu Setiawan

Ade Latifa

Fitranita

Meirina Ayumi Malamassam

Inayah Hidayati



PPK-LIPI



**STRUKTUR PENDUDUK LAMONGAN JAWA TIMUR:
Dampak Terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga**

031114

@Pintal 2014

Buku ini diterbitkan atas kerjasama Pintal dan PPK LIPI

Pintal

Jl. Kaliurang Km. 5, gang Pocung No. 3, Sleman
Yogyakarta, 55281, Indonesia. Telepon 0274 7101997,
087739184496.

Email : bukupintal@gmail.com.
Facebook : Buku Pintal

Cetakan ke-	5	4	3	2	1
Tahun	18	17	16	15	14

Penulis : Haning Romdiati, dkk

Tata Letak : G. Neno Pratikasari

Desain Cover : Adib Sulthon F

ISBN 978-602-7797-46-8

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Kanisius (anggota IKAPI) Yogyakarta.

ABSTRAK

Belakangan ini, Indonesia menghadapi perubahan struktur penduduk yang berdampak terhadap ketahanan ekonomi. Perubahan struktur penduduk dari struktur muda ke dewasa berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi, tetapi harus diikuti dengan penyediaan kesempatan kerja yang produktif. Oleh karena itu buku ini akan mencoba memahami fenomena tersebut dengan harapan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena tersebut, disamping menyediakan informasi/data yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan berkaitan dengan upaya meningkatkan produktifitas penduduk usia produktif untuk berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, penelitian yang mendasari penulisan buku ini menemukan bahwa struktur Anggota Rumah Tangga (ART) sampel pada usia dewasa belum berkontribusi tinggi pada ketahanan ekonomi rumah tangga mereka. Hanya 29,5 dan 22,5 persen rumah tangga termasuk pada kelompok tahan ekonomi, berturut-turut di desa Mantup dan Weru. Data ini menggambarkan bahwa jumlah ART usia produktif dan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga mempunyai hubungan positif apabila penduduk kelompok umur tersebut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Semakin banyak ART usia produktif yang bekerja, semakin baik pula kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa jumlah penduduk usia ekonomi produktif banyak mempunyai pengaruh positif terhadap penambahan pendapatan rumah tangga dan memungkinkan rumah tangga untuk mempunyai tabungan. Dalam lingkup yang

lebih luas, semakin banyaknya jumlah kelompok penduduk tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun harus disertai dengan investasi di bidang pekerjaan dan sumber daya manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa pemikiran tentang penanggulangan dampak perubahan struktur penduduk adalah dengan memfasilitasi ART usia produktif yang bekerja dengan pilihan-pilihan pengembangan penciptaan kerja yang produktif dan berbasis potensi sumberdaya lokal. Perlu peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya tabungan untuk kehidupan ekonomi.

Kata kunci : struktur penduduk. strategi adaptasi, ketahanan ekonomi

KATA PENGANTAR

Saat ini dan dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mengalami pergeseran struktur penduduk dari muda menuju dewasa muda. Hal ini ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) secara perlahan, sedangkan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat cukup pesat. Kondisi kependudukan seperti ini memunculkan tantangan pembangunan terutama dalam hal pemanfaatan penduduk usia produktif untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Tingginya proporsi penduduk usia produktif tidak dapat begitu saja memberikan pengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Oleh karena itu, strategi adaptasi tidak dapat dipisahkan dari usaha untuk menjaga ketahanan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat rumah tangga.

Proporsi penduduk usia produktif berperan penting dalam kondisi ekonomi rumah tangga jika anggota rumah tangga usia produktif tersebut memberikan kontribusi pada ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ini, diperlukan adanya upaya untuk memfasilitasi anggota rumah tangga usia produktif yang bekerja dengan pilihan-pilihan pengembangan penciptaan kerja yang produktif dan berbasis potensi sumberdaya lokal. Pengukuran ketahanan ekonomi di tingkat rumah tangga tidak hanya didasarkan pada proporsi anggota rumah tangga usia produktif, namun juga memperhatikan aspek tabungan rumah tangga. Tabungan rumah tangga merupakan salah satu bentukantisipasi dampak gejala perubahan iklim pada aktivitas ekonomi, terutama di bidang pertanian dan perikanan.

Studi tentang 'Stuktur Penduduk Kabupaten Lamongan, Jawa Timur : Dampak Terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah

Tangga' dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) di provinsi Jawa Timur yang merupakan kajian tahun pertama dari rangkaian lima tahun penelitian yang difokuskan pada analisis perubahan struktur penduduk terkait dengan ketahanan ekonomi di tingkat rumah tangga. Dengan selesainya penulisan buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi data dan informasi untuk pemahaman tentang keterkaitan antara perubahan struktur penduduk dan ketahanan ekonomi rumah tangga yang dapat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan bagi instansi terkait.

Terlaksananya kegiatan penelitian hingga selesainya penulisan buku tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami tujukan pada lembaga pemerintah, swasta dan perseorangan yang telah membantu dalam memberikan informasi, data dan saran. Kepada Laila Nagib yang telah memberikan saran dan kritik membangun, peneliti PPK-LIPI yang terlibat serta seluruh staf penunjang yang mendukung perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan studi ini, kami juga mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2013

Kepala Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dra. Haning Romdiati, MA
NIP. 195911081984022001

Daftar Isi

Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pergeseran Struktur Penduduk di Indonesia : Menuju Struktur Penduduk Muda Dewasa	1
1.2. Ketahanan Ekonomi: Pengertian, Indikator, dan Hubungannya dengan Struktur Penduduk	4
1.3. Struktur Umur dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga	6
1.4. Struktur Penduduk dan Ketahanan Ekonomi: Suatu Kerangka Analisis	8
1.5. Sumber Data dan Analisis.....	10

BAB II. PERUBAHAN STRUKTUR PENDUDUK DAN KETAHANAN EKONOMI :	
KONDISI MAKRO	17
2.1. Perubahan Kondisi Struktur Penduduk Indonesia	17
2.2. Ketahanan Ekonomi Indonesia.....	25
2.3. Hubungan Perubahan Struktur Penduduk dengan Ketahanan Ekonomi	32
BAB III. KABUPATEN LAMONGAN: KONDISI WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN.....	41
3.1. Lokasi dan Tipologi Wilayah.....	42
3.2. Kondisi Iklim dan Indikasi Perubahannya.....	46
3.3. Perekonomian Daerah.....	52
3.4. Kependudukan.....	59
3.4.1. Jumlah, Komposisi, dan Distribusi Penduduk.....	59
3.4.2. Ketenagakerjaan.....	68
3.5. Kemiskinan.....	70
BAB IV. STRUKTUR ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN KETAHANAN EKONOMI RUMAH TANGGA.....	75
4.1. Komposisi Anggota Rumah Tangga dan Faktor Pengaruh	77

4.1.1. Komposisi Anggota Rumah Tangga Masyarakat Pertanian	77
4.1.2. Komposisi Anggota Rumah Tangga Masyarakat Pesisir.....	88
4.2. Pengeluaran dan Tabungan: Gambaran Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga.....	100
4.2.1. Ketahanan ekonomi rumah tangga di wilayah pertanian.....	100
4.2.2. Ketahanan ekonomi rumah tangga di wilayah pesisir.....	107
4.3. Hubungan Antara Anggota Rumah Tangga Usia Produktif dan Ketahanan Ekonomi.....	120
4.2.3. Masyarakat Pertanian Desa Mantup	120
4.2.4. Masyarakat Pesisir Desa Weru.....	126
 BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 133
5.1. Kesimpulan.....	133
5.2. Rekomendasi.....	138
 DAFTAR PUSTAKA.....	 141
LAMPIRAN.....	151

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Indeks Ketahanan Ekonomi.....	13
Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1990, 2000, 2010	18
Tabel 2.2.	Kondisi Struktur Penduduk Indonesia Tahun 2010	21
Tabel 2.3.	Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2010.....	30
Tabel 2.4.	Tipologi Hubungan Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Pertumbuhan Ekonomi 2005-2010.....	33
Tabel 3.1.	Kondisi Tata Guna Lahan Kabupaten Lamongan	45
Tabel 3.2.	Banyaknya Curah Hujan menurut Stasiun Pengamatan 2008 (mm), Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	48
Tabel 3.3.	Jumlah Hari Hujan (HH) dan Curah Hujan (CH) Per Bulan di Kecamatan Mantup Tahun 2005-2009 (mm).....	49
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Periode 2001 – 2011 (%).....	54

Tabel 3.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Berdasar Lapangan Usaha Tahun 2009-2011.....	55
Tabel 3.6.	Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan dan Nilai Produksi di Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2009.....	57
Tabel 3.7.	Realisasi Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Padi tahun 2007-2009 (Januari-Desember) di Kecamatan Mantup, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur	58
Tabel 3.8.	Perkembangan Jumlah Penduduk Per Desa Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2006-2010.....	65
Tabel 3.9.	Distribusi Penduduk menurut Jumlah dan Pertumbuhan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Periode 2007-2010 ...	67
Tabel 3.10.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2006-2011.....	73
Tabel 4.1.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga menurut Umur dan Jenis Kelamin, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010 (N).....	78

Tabel 4.2.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	89
Tabel 4.3.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga, Desa Weru, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	93
Tabel 4.4.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	95
Tabel 4.5.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Usia 10 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan yang dilakukan seminggu yang lalu, Desa Weru, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Jawa Timur Tahun 2010.....	98
Tabel 4.6.	Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Proporsi Pengeluaran Pangan Terhadap Total Pengeluaran per Bulan dan Jumlah Pengeluaran per Bulan, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	102

Tabel 4.7. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Pemilikan Tabungan dan Jumlah ART Usia Produktif yang Bekerja, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....	105
Tabel 4.8. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran dan Proporsi Pengeluaran Pangan terhadap Pengeluaran Rumah Tangga, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	109
Tabel 4.9. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Pengeluaran, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	110
Tabel 4.10. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Pemilikan Tabungan dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	114
Tabel 4.11. Distribusi Persentase Rumah Tanga menurut Ketahanan Ekonomi dan Karakteristik Kepala Rumah Tangga, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	118
Tabel 4.12. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Ketahanan Ekonomi dan Proporsi Anggota Rumah Usia Produktif, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	123

Tabel 4.13. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Ketahanan Ekonomi dan Kegiatan Utama Anggota Rumah Usia Produktif, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	124
Tabel 4.14. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Ketahanan Ekonomi dan Proporsi ART Produktif, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	130
Tabel 4.15. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Produktif menurut Kegiatan Utama Yang dilakukan Seminggu Yang Lalu, Desa Weru, Kecamatan paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	131

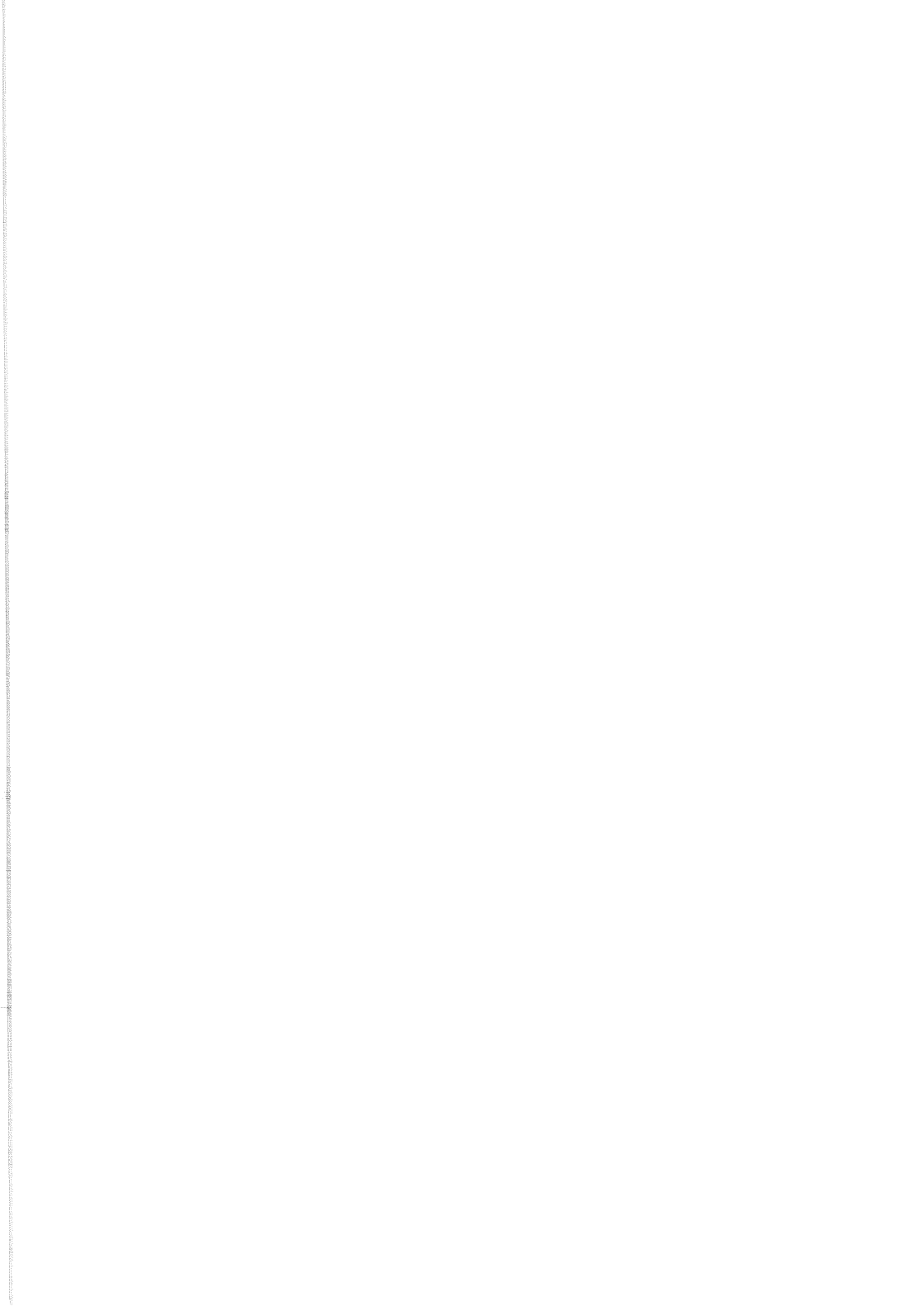
Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2009.....	27
Gambar 2.2.	Grafik Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1996 –2010.....	29
Gambar 3.1.	Peta Administrasi Kabupaten Lamongan....	44
Gambar 3.2.	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur.....	53
Gambar 4.1.	Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah ART, Desa Mantup, Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....	81
Gambar 4.2.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Desa Mantup, Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan 2010.....	82
Gambar 4.3.	Distribusi Anggota Rumah Tangga Menurut Kegiatan Utama, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Jawa Timur 2010.....	85
Gambar 4.4.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	88

Gambar 4.5.	Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Pengeluaran per Kapita per Bulan, Desa Mantup, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	101
Gambar 4.6.	Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Ketahanan Ekonomi, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	106
Gambar 4.7.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Besarnya Pengeluaran Rumah Tangga Per bulan, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	108
Gambar 4.8.	Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Tingkat Ketahanan Ekonomi, Desa Weru, Kecamatan Paciran. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	116
Gambar 4.9.	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Anggota Usia Produktif (15 – 64 Tahun), Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	121
Gambar 4.10.	Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Usia Produktif menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010.....	125
Gambar 4.11.	Distribusi Persentase ART usia Produktif, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tahun 2010.....	128

Daftar Lampiran

Gambar 2.1.1. Piramida Penduduk Indonesia	151
Gambar 2.1.2. Piramida Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	151
Gambar 2.1.3. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat.....	152
Gambar 2.1.4. Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur	152
Gambar 2.1.5. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Timur...	153



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pergeseran Struktur Penduduk di Indonesia: Menuju struktur penduduk muda dewasa

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasar data Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,49 persen per tahun, atau bertambah antara 3,5 – 4 juta jiwa per tahun selama periode 2000-2010 (BPS, 2013),

Di samping jumlah penduduk yang terus bertambah dan tingkat pertumbuhan yang masih jauh dari angka *zero growth*, isu

kependudukan lainnya yang penting untuk diperhatikan adalah pergeseran struktur umur penduduk. Data BPS pada tahun 2000 menunjukkan, proporsi penduduk usia produktif di Indonesia sebesar 64,6 persen, naik menjadi 66,1 persen pada tahun 2010 (BPS, 2011), dan diproyeksikan akan menjadi 69,1 persen pada tahun 2015 (BPS, 2005). Data ini mencerminkan adanya perubahan struktur penduduk dari umur muda ke muda dewasa

Perubahan struktur penduduk berkaitan erat dengan proses transisi demografi yang ditentukan oleh waktu dan kecepatan dari turunnya fertilitas dan mortalitas. Proses transisi demografi yang terjadi di Indonesia pada saat ini dihasilkan dari adanya penurunan tingkat kelahiran yang cukup cepat, walau belum menyamai kecepatan penurunan angka kematian. Penurunan angka kelahiran ini, terutama karena dampak jangka panjang pelaksanaan program keluarga berencana (KB) sejak tahun 70-an yang telah berhasil menurunkan tingkat fertilitas¹. Penurunan fertilitas yang cukup tajam tersebut menyebabkan perubahan struktur penduduk.

Pergeseran struktur umur penduduk Indonesia telah menghasilkan angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang rendah. Rasio ketergantungan Indonesia pada tahun 2000 sebesar 54,7 persen (BPS, 2001), turun menjadi 51,3 tahun pada tahun 2010 (BPS, 2011). Selanjutnya diprediksi menurun lagi menjadi

1 Berdasar data Biro Pusat Statistik (BPS), tingkat kelahiran total (TFR) tahun 1971 sebesar 5,61 per 1000 kelahiran, turun menjadi 4,68 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1980. TFR cenderung semakin turun hingga tahun 1997 (2,78 per seribu kelahiran hidup) dan kemudian dalam kondisi stagnan dalam sepuluh tahun terakhir pada angka 2,6 per 1000 kelahiran hidup (Survei Demografi Indonesia –SDKI 2002, 2007, dan 2012)

44,7 persen pada tahun 2015 (BPS, 2005). Rasio ketergantungan di Indonesia akan mencapai angka paling rendah (antara 43-44 persen) pada periode antara tahun 2020-2030, yang dalam istilah demografi disebut dengan jendela kesempatan (*window of opportunity*). Pada situasi seperti ini, Indonesia memiliki kesempatan yang baik untuk memanfaatkan penduduk usia produktif dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan. Namun, persyaratan lain harus dipenuhi, yaitu pemerintah dapat menyediakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkualitas dan lapangan pekerjaan yang produktif.

Berdasar hasil studinya, Navaneetham (2002) menyimpulkan bahwa munculnya *window of opportunity* membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di semua negara di kawasan Asia Tenggara, kecuali Filipina. Lebih lanjut dikemukakan, meskipun di awal *window of opportunity* kawasan Asia Selatan tidak dapat mengalami pertumbuhan ekonomi secara optimal, diprediksi dalam kurun waktu 20-25 tahun mendatang, sebagian besar negara-negara di Asia Selatan akan mendapat keuntungan lebih besar dengan adanya *window of opportunity*, asalkan kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat mengambil keuntungan dengan adanya keterbukaan ekonomi. Hal ini mengisyaratkan bahwa beberapa persyaratan diperlukan untuk keberhasilan upaya pemanfaatan *window of opportunity* agar menjadi bonus demografi, antara lain dengan adanya dukungan kebijakan investasi pendidikan yang dilakukan dengan tepat serta penyediaan lapangan kerja yang produktif.

Dalam konteks Indonesia, pada tahun 2010 beberapa provinsi telah memiliki rasio ketergantungan yang rendah, misalnya DKI Jakarta (37,4), DI Yogyakarta (45,8 persen) dan Kepulauan Riau (46,8 persen) (bps.go.id/index.php. 2014). Provinsi Jawa Timur,

yang menjadi lokasi penelitian memiliki rasio ketergantungan sebesar 46,2 persen pada tahun 2010. Angka ini lebih rendah dari rasio ketergantungan di Provinsi Jawa Barat (49,9 persen) dan Jawa Tengah (49,9 persen). Rasio ketergantungan yang cukup rendah di Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan faktor yang menguntungkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi apabila mereka bekerja dengan produktif.

Indikator makro ketahanan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, menunjukkan angka yang lebih tinggi dari angka di tingkat nasional. Angka pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 6,67 persen (<http://bpm.jatimprov.go.id>, 22 Januari 2013), sedangkan angka nasional hanya 6,1 persen pada tahun yang sama. Kondisi ini memberikan gambaran kasar bahwa ketahanan ekonomi makro di Provinsi Jawa timur cukup tinggi.

1.2. Ketahanan Ekonomi: Pengertian, Indikator, dan Hubungannya dengan Struktur Penduduk

Pengertian tentang ketahanan ekonomi pada umumnya merujuk pada kepentingan setiap institusi/pihak yang mengembangkan konsep tersebut. Misalnya, *International Labour Organisation*/ILO (tanpa tahun) mengartikan ketahanan ekonomi sebagai kondisi ketahanan kerja untuk pekerja atau pencari kerja yang diukur dari tujuh indikator, yaitu: (1) adanya jaminan atas pendapatan; (2) adanya kesempatan untuk terlibat dalam serikat buruh; (3) terbukanya kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mencari pendapatan; (4) kesempatan pekerja untuk meneruskan karir/kerja di perusahaan; (5) adanya

kemungkinan pekerja mengontrol substansi dari pekerjaan yang dilakukan; (6) kondisi kerja yang kondusif untuk bekerja, termasuk meningkatkan karir; (7) terbukanya peluang bagi pekerja untuk memperoleh pendidikan/ketrampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan karir. Sementara itu, *Canadian Council of Social Development* (2006) mendefinisikan ketahanan ekonomi sebagai kondisi terjaminnya standar kehidupan yang menyediakan keluarga dengan sumberdaya dan *benefits* yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, kultural, dan dihargai dalam kegiatan kemasyarakatan. Pengertian ketahanan ekonomi ini berbeda dengan konsep ketahanan ekonomi menurut *International Committee of the Red Cross-ICRC* (2008), yang mengartikannya sebagai suatu kondisi individu, rumah tangga, atau komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar/esensial dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terelakkan dengan memperhatikan budaya setempat.

Mengacu pada beberapa pengertian tersebut, ketahanan ekonomi rumah tangga dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup dasar ART dan kebutuhan lain sesuai dengan kondisi setempat. Ada sejumlah indikator untuk melihat kebutuhan hidup dasar dan kebutuhan lainnya. Namun dalam tulisan ini kebutuhan hidup dasar dilihat dari besar pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan makanan yang paling mendasar (meliputi pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan), seperti yang biasa dipakai oleh BPS untuk menentukan garis kemiskinan yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Sementara itu, kebutuhan lainnya dilihat dari pemilikan tabungan yang berbentuk uang tunai maupun barang yang bukan aset produksi (seperti sawah, lahan kering/tegal, tambak, dan alat tangkap). Pemilikan tabungan selain dapat menggambarkan

kemampuan rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan lainnya (di luar kebutuhan dasar), tabungan juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sangat mendesak.

1.3. Struktur Umur dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

Merujuk pada kondisi kependudukan (khususnya struktur umur) dan perekonomian di tingkat makro tersebut, tulisan ini melihat struktur umur anggota rumah tangga (ART) yang diperkirakan mempengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga bersangkutan. Struktur umur penduduk yang digunakan dalam tulisan ini difokuskan pada ART pada kelompok usia produktif (15-64 tahun). Penentuan usia produktif didasarkan pada pertimbangan usia wajib belajar untuk Indonesia (9 tahun), yaitu antara umur 7-15 tahun. Selain itu, konsep ketenagakerjaan di Indonesia membatasi usia kerja sebesar 15 tahun ke atas, tetapi diperkirakan pada umur 65 tahun ke atas pada umumnya sudah tidak bekerja lagi. Dengan demikian, penduduk usia 15-64 tahun adalah kelompok usia produktif yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi.

Untuk mendeskripsikan struktur/komposisi umur anggota rumah tangga yang menjadi sampel penelitian ini, maka perlu dibahas pula untuk kelompok umur yang lebih rinci, yaitu pada kelompok usia anak-anak (0-14 tahun), muda (15-24 tahun), kerja utama (25-49 tahun), setengah tua (50-64 tahun), dan usia tua (65 tahun ke atas). Pengelompokan umur ART tersebut merujuk pada hasil analisis Lindh dan Malmberg (1999) terhadap data negara-negara OECD selama kurun 1950-1990, yang menyimpulkan ada

hubungan positif yang kuat antara awal dari bagian penduduk yang berusia pertengahan (50-64 tahun) dan pertumbuhan (ekonomi), sedangkan pada usia 65 tahun ke atas menunjukkan hubungan yang negatif (<http://ideas.repec.org/a/spr/jopoec/v12y1999i3p431-449.html#abstract>).

Hubungan searah antara kondisi kependudukan dan pertumbuhan ekonomi, tersebut kemungkinan besar juga terjadi pada tingkat rumah tangga, karena kondisi struktur penduduk di tingkat nasional dan provinsi dipengaruhi oleh perubahan struktur penduduk di tingkat rumah tangga. Keberhasilan program Keluarga Berencana menyebabkan terjadinya perubahan rata-rata jumlah anak yang sangat signifikan² karena adanya perubahan sikap dan nilai-nilai dalam rumah tangga untuk memiliki keluarga kecil³. Kondisi seperti ini berdampak pada penurunan jumlah ART usia 0-14 tahun dan sebaliknya jumlah ART yang berusia produktif semakin banyak sehingga dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Kajian mikro tentang ketahanan ekonomi di tingkat rumah tangga masih sangat jarang dilakukan, padahal gambaran ketahanan ekonomi dan struktur anggota rumah tangga dapat menggambarkan

-
- 2 Data menunjukkan, rata-rata jumlah anak mengalami penurunan dari 6 anak pada tahun 1970-an menjadi lebih kurang 2,6 anak pada tahun 2002/2003 (Adioetomo, seperti dikutip oleh Sukamdi, 2005).
 - 3 Nilai anak yang semata-mata dipandang sebagai nilai positif (ekonomi, psiko-sosial) mulai mengalami perubahan. Nilai negatif dari keberadaan anak (beban dan biaya besar) maupun nilai yang berkaitan dengan hak anak (kelangsungan hidup dan perkembangan) cenderung membatasi orang tua untuk memiliki jumlah anak.

kemampuan ekonomi penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, kajian yang dilakukan di daerah-daerah dengan tipologi berbeda sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan kondisi ketahanan ekonomi dan struktur penduduk di tingkat makro.

1.4. Struktur Penduduk dan Ketahanan Ekonomi: Suatu Kerangka Analisis

Perubahan struktur penduduk diasumsikan dialami oleh sebagian rumah tangga, yaitu kecenderungan jumlah ART usia produktif (15-64 tahun) yang lebih banyak dibandingkan dengan ART usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Dengan kata lain, proporsi ART usia produktif sudah melebihi 50 persen. Asumsi ini berdasar pada kondisi di tingkat nasional/provinsi yang telah menunjukkan adanya perubahan struktur penduduk, yaitu ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif.

Hubungan antara struktur umur dengan ketahanan ekonomi dapat dijelaskan melalui tingginya proporsi penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang diukur dari pengeluaran dan pemilikan tabungan. Sejalan dengan menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, maka tingkat pengeluaran yang dibelanjakan untuk biaya kesehatan dan pendidikan semakin berkurang. Sebaliknya, semakin banyak penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja diharapkan akan semakin banyak penduduk yang dapat menabung.

Kelly dan Smith (1999, seperti dikutip Navaneetham 2002) berpendapat bahwa menurunnya tingkat kelahiran yang terjadi di beberapa negara menyebabkan menurunnya pengeluaran untuk membesarkan anak, sehingga semakin banyak keluarga yang bisa menabung. Dengan demikian, pergeseran struktur umur memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan investasi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan model pertumbuhan ekonomi yang mengkombinasikan unsur-unsur modal manusia dan teori *the life cycle saving* (Navaneetham 2002). Lebih lanjut dikemukakan, menurut model tersebut, pada awal proses transisi demografi yang ditandai dengan masih banyaknya penduduk usia muda dan kecilnya penduduk usia kerja, pertumbuhan pendapatan per kapita menurun, karena hanya sedikit pekerja dan yang mampu menabung. Setelah proses transisi demografi berjalan ke tahap berikutnya, terjadi penurunan beban ketergantungan penduduk muda dan peningkatan penduduk usia kerja yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita, karena lebih banyak pekerja yang bisa menabung. Ketika proses transisi tersebut selesai, rasio ketergantungan usia tua meningkat dan pertumbuhan pendapatan memburuk.

Terkait dengan ini, pada tingkat rumah tangga dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi proporsi ART usia produktif, maka semakin banyak ART yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Walaupun demikian, kondisi ini dapat terpenuhi jika mereka bekerja secara produktif dan memiliki tabungan. Namun demikian, pengaruh struktur ART produktif terhadap ketahanan ekonomi tersebut tidak terjadi secara otomatis, tetapi disertai dengan peningkatan pendidikan dan ketrampilan SDM/ART serta penyediaan kesempatan kerja yang produktif.

1.5. Sumber Data dan Analisis

Sumber data untuk tulisan ini adalah data hasil penelitian PPK-LIPI yang dilakukan di kabupaten Lamongan, provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Pada penelitian ini dikumpulkan data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan *desk review* terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, dokumen dan berbagai sumber data lain yang tersedia di instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah, serta kajian literatur terhadap tulisan ilmiah yang berhubungan dengan fokus kajian. Data primer diambil dari 300 rumah tangga di kabupaten Lamongan, provinsi Jawa Timur. Daerah ini dipilih karena dua alasan utama yang berkaitan dengan substansi penelitian yang meliputi aspek kependudukan dan ketahanan ekonomi.

Pertama, pada tahun 2007, persentase penduduk usia produktif (15-59 tahun) di kabupaten ini juga cukup tinggi (67,3 persen), hampir sama dengan angka di tingkat provinsi pada tahun yang sama (67 persen) (BPS provinsi Jawa Timur). Artinya, terdapat kemiripan struktur penduduk kabupaten Lamongan dengan penduduk di tingkat provinsi. Penduduk pada kelompok usia tersebut berpotensi tinggi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sepanjang diikuti dengan penyediaan kesempatan kerja yang produktif.

Kedua, indikator makro angka kemiskinan di kabupaten Lamongan pada tahun 2008 sebesar 22,51 persen, lebih tinggi daripada angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur yang sebesar 18,19 persen (BPS provinsi Jawa Timur, 2009). Data ini menggambarkan ada cukup banyak penduduk yang rentan ekonomi.

Pengumpulan data primer di lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan menanyakan sejumlah pertanyaan yang menjadi fokus kajian kepada 150 rumah tangga dengan menggunakan kuesioner. Responden ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Rumah tangga yang menjadi sampel penelitian adalah rumah tangga yang memiliki paling tidak satu anggota rumah tangga berusia produktif (15-64 tahun). Secara umum data primer yang diperoleh mencakup rumah tangga dan individu. Data individu mencakup struktur anggota rumah tangga (umur, jenis kelamin), tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan pekerjaan. Sementara itu data rumah tangga meliputi pemilikan asset produktif, pengeluaran, dan tabungan rumah tangga.

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterkaitan antara struktur penduduk/anggota rumah tangga dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Beberapa teknik pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam/*in-depth interview* (dengan menggunakan pedoman wawancara), diskusi terfokus, dan observasi (pengamatan terhadap keadaan lingkungan/kondisi daerah). Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa informan yang dipilih secara *snowballing* dan menguasai masalah yang dikaji, seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah, anggota rumah tangga responden, dan sumber-sumber lain. Diskusi terfokus dilakukan dengan nelayan dan petani, baik laki-laki maupun perempuan.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan *content analysis*. Sementara itu, analisis data kuantitatif dilakukan dengan

menggunakan tabel frekuensi maupun tabulasi silang. Beberapa variabel bebas dan variabel tergantung juga dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang yang kemudian dikombinasikan pula dengan analisis yang bersifat ekplanatori untuk memahami "mengapa" gejala atau hubungan antara dua variabel tersebut terjadi.

Struktur anggota rumah tangga diukur dari proporsi anggota rumah tangga usia produktif terhadap jumlah anggota rumah tangga seluruhnya. Untuk mengetahui keterkaitan antara ketahanan ekonomi dengan proporsi anggota rumah tangga produktif tersebut, dilakukan uji statistik *chi-square* dengan menggunakan tabel kontingensi.

Hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah:

Ho: Tidak ada hubungan antara proporsi anggota rumah tangga produktif dengan ketahanan ekonomi rumah tangga

H1: Ada hubungan antara proporsi anggota rumah tangga produktif dengan ketahanan ekonomi rumah tangga

Ketahanan ekonomi yang dilihat dari indikator pengeluaran dan pemilikan tabungan dihitung dengan cara mengkombinasikan dua indikator tersebut. Setiap indikator ditentukan nilai *cutting point*, yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai *cutting point* untuk indikator pengeluaran mengacu pada garis kemiskinan BPS yang ditentukan dengan menghitung kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan bagi setiap individu. Berdasar data BPS, pada tahun 2010, garis kemiskinan untuk kabupaten Lamongan sebesar Rp.221.413,- per bulan. Nilai tersebut dipakai sebagai rujukan untuk

mengelompokkan suatu rumah tangga di desa penelitian ke dalam kategori miskin dan tidak miskin. Rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang besar pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan per kapita per bulan lebih kecil dari garis kemiskinan kabupaten Lamongan, Sebaliknya, rumah tangga yang besarnya pengeluaran per kapita sama atau lebih besar dari garis kemiskinan termasuk dalam rumah tangga tidak miskin.

- b. Nilai *cutting point* pemilikan tabungan uang maupun barang berharga adalah nilai median untuk setiap daerah. Tabungan yang berupa barang, seperti ternak (sapi, kambing) dan emas dikonversikan ke nilai rupiah. Semua nilai konversi dan tabungan yang berupa uang dijumlahkan kemudian dicari nilai median sebagai nilai *cutting point*.
- c. Kombinasi antara status kemiskinan dan nilai tabungan menghasilkan nilai indeks ketahanan ekonomi, seperti dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.1. Indeks Ketahanan Ekonomi

<i>Kemiskinan</i> <i>(Pengeluaran RT per kapita)</i>	<i>Pemilikan Tabungan</i>		
	<i>Punya tabungan \geq nilai median</i>	<i>Punya tabungan $<$ nilai median</i>	<i>Tidak punya tabungan</i>
Tidak miskin	Tahan	Kurang Tahan	
Miskin	Kurang Tahan	Kurang Tahan	

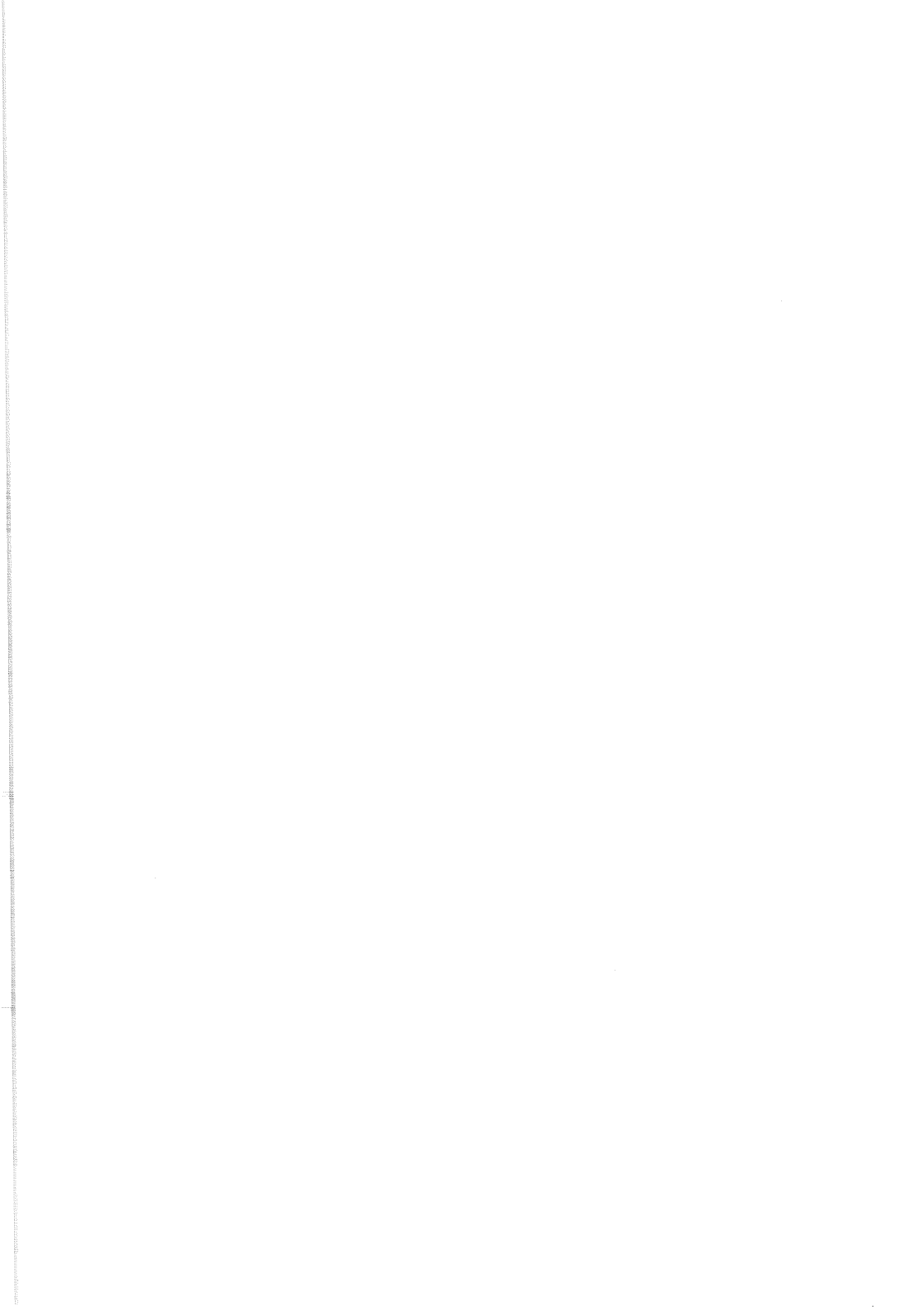
Berdasar matrik tersebut, maka rumah tangga penelitian dapat dibedakan menjadi tiga kategori dilihat dari ketahanan ekonomi, yaitu:

- a. Rumah tangga “tahan ekonomi” adalah rumah tangga yang tidak miskin dan mempunyai tabungan sama dengan atau lebih besar dari nilai median tabungan
- b. Rumah tangga “kurang tahan ekonomi” adalah rumah tangga tidak miskin yang mempunyai tabungan sebesar kurang dari nilai median, rumah tangga tidak miskin yang mempunyai tabungan (baik nilainya sama, lebih besar, maupun lebih kecil dari nilai median tabungan)
- c. Rumah tangga “tidak tahan ekonomi” adalah rumah tangga miskin maupun tidak miskin dan juga tidak mempunyai tabungan.

Dari matrik tersebut diatas dengan jelas terlihat bahwa rumah tangga yang memiliki tabungan dapat dikelompokkan pada rumah tangga “tahan” dan “kurang tahan”, sedangkan rumah tangga tanpa tabungan tergolong rumah tangga “tidak tahan”. Hal ini karena pemilikan tabungan sangat bermanfaat untuk membiayai kebutuhan dasar maupun kebutuhan lain. Dengan demikian, dikelompokkannya rumah tangga tidak miskin yang tidak memiliki tabungan ke dalam kelompok “tidak tahan” adalah karena rumah tangga tersebut mungkin berada pada kelompok hampir miskin⁴. Tanpa kepemilikan tabungan, rumah tangga hampir miskin tersebut termasuk kelompok rentan/”tidak tahan” dari aspek ekonomi. Hal ini karena tanpa tabungan, rumah tangga tersebut kemungkinan

4 Rumah tangga hampir miskin adalah rumah tangga dengan besar pengeluaran per kapita hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

besar tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kondisi lokal (misalnya kebutuhan sosial). Sebaliknya, rumah tangga yang memiliki tabungan, walaupun miskin, diasumsikan lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan mendesak/ sewaktu-waktu diperlukan, termasuk jika ada gangguan/gejolak terhadap sumber kehidupannya.



Bab II

Perubahan Struktur Penduduk dan Ketahanan Ekonomi : Kondisi Makro

2.1. Perubahan Kondisi Struktur Penduduk Indonesia

Struktur penduduk Indonesia menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur dari struktur penduduk usia muda menjadi struktur penduduk usia dewasa selama 20 tahun terakhir. Tabel 2.1 adalah data Sensus Penduduk tahun 1990 yang menunjukkan proporsi penduduk usia muda atau di bawah 15 tahun sebesar 36,7 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, penduduk usia muda pada tahun 2010 hanya 28,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2005).

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1990, 2000, 2010

Umur	1990		2000		2010	
	Juta	%	Juta	%	Juta	%
0-14	66,0	36,7	63,1	30,73	68,6	28,9
15-64	107,2	59,6	132,7	64,62	157	66,1
65+	6,6	3,7	9,6	4,66	11,9	5
Jumlah	179,8	100	205,3	100	237,6	100

Sumber : BPS, 1990, 2000, 2010

Di lain pihak, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, penduduk berumur 15-64 tahun mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk atau sekitar 66,1 persen. Jika disajikan dalam bentuk piramida penduduk, maka piramida akan berbentuk ekspansif yang melebar di bagian bawah, namun semakin cembung di tengah dan semakin sempit di bagian bawah yang berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat, juga bagian atas piramida yang sedikit melebar menunjukkan semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia (Lampiran 2.1).

Bentuk piramida penduduk yang dimiliki oleh Indonesia serupa dengan piramida penduduk di kebanyakan negara berkembang, yang mencerminkan struktur umur transisional. Negara-negara dengan struktur penduduk seperti ini mencerminkan turunnya angka fertilitas di wilayah tersebut. Kondisi ini mengakibatkan distribusi penduduk yang lebih merata pada kelompok umur yang berumur kurang dari 40 tahun. Di negara-negara dengan struktur umur penduduk transisional, proporsi penduduk berumur 0-29

tahun sekitar 45-60 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, proporsi penduduk dewasa yang berusia 30-59 tahun sebesar 27-40 persen, sedangkan proporsi penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) hanya sekitar 8-15 persen. Negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin, Karibia, Asia Selatan, sebagian Timur Tengah dan juga China tergolong dalam wilayah-wilayah dengan struktur umur penduduk transisional (Leahy *et al*, 2007).

Semakin meningkatnya proporsi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun merupakan hasil pendewasaan dari ledakan penduduk di masa lampau. Perubahan struktur penduduk tersebut akan mengakibatkan rasio beban tanggungan (*dependency ratio/ DR*) menjadi semakin rendah. Berdasar data BPS, rasio beban tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 1990 sebesar 67,72 persen, kemudian turun menjadi 54,7 persen pada tahun 2000, dan mencapai 51,3 persen pada tahun 2010. Penurunan rasio beban tanggungan ini merupakan potensi untuk mendapatkan bonus demografi.

Dengan rasio ketergantungan penduduk yang semakin rendah, bonus demografi akan dapat memberikan kesempatan suatu wilayah untuk mendapatkan kondisi penduduk yang ideal dalam hal perbandingan penduduk usia produktif dengan non-produktif. Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030 dengan jumlah usia angkatan kerja mencapai sekitar 70 persen (BKKBN, 2010). Dengan adanya bonus demografi maka Indonesia akan sangat diuntungkan dalam pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan kondisi struktur penduduk di suatu wilayah adalah laju pertumbuhan penduduk (LPP) beserta komponen-komponen yang mempengaruhinya yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang dapat dicermati capaiannya pada tiap provinsi di Indonesia pada tabel 2.2. Pada struktur penduduk Indonesia yang menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk usia muda, laju pertumbuhan penduduknya sangat dipengaruhi oleh adanya penurunan tingkat fertilitas (*total fertility rate* atau TFR) dan juga angka kematian bayi (*infant mortality rate* atau IMR). Penurunan fertilitas di Indonesia memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir yaitu turun hingga mencapai separuhnya. Pada tahun 1971, angka fertilitas total mencapai 5,61 dan turun menjadi 2,82 pada tahun 1995. Pada tahun 2007 hingga 2012, TFR telah mencapai 2,6 (SDKI, 2012).

Pada masa lalu, tingkat fertilitas yang sangat tinggi diikuti pula oleh angka kematian bayi yang sama tingginya. Namun saat angka kematian bayi mulai dapat ditekan, jumlah bayi yang akan hidup hingga dewasa akan bertambah banyak. Hal inilah yang dapat mempengaruhi adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja pada masa yang akan datang. Menurunnya angka kematian bayi di Indonesia dipengaruhi berbagai hal, antara lain karena meningkatnya penyediaan fasilitas kesehatan sehingga dapat menurunkan penyakit infeksi pada bayi melalui imunisasi. Hal ini dapat terlihat dari capaian IMR pada tahun 1971 sebesar 146, kemudian turun menjadi 71 pada tahun 1990, mencapai 39 per 1000 kelahiran pada tahun 2007, dan menjadi 26 pada tahun 2010 (BPS & Macro International, 2008 dan BPS, 2010).

Tabel 2.2. Kondisi Struktur Penduduk Indonesia Tahun 2010

<i>Provinsi</i>	<i>Proporsi penduduk usia produktif</i>	<i>LPP 2000-2010</i>	<i>TFR</i>	<i>IMR</i>	<i>Net Migration Rate</i>
Nanggroe Aceh Darussalam	66.74	2.36	2.79	28.00	-11,30
Sumatera Utara	65.41	1.10	3.01	25.67	-4,40
Sumatera Barat	66.87	1.34	2.91	29.67	-7,10
Riau	66.37	3.58	2.82	23.00	19,00
Jambi	78.97	2.56	2.51	29.00	2,30
Sumatera Selatan	68.47	1.85	2.56	25.33	0,30
Bengkulu	68.20	1.67	2.51	27.67	4,70
Lampung	69.06	1.24	2.45	23.00	0,10
Bangka Belitung	69.41	3.14	2.54	26.67	0,80
Kepulauan Riau	70.05	4.95	2.38	20.33	-7,90
DKI Jakarta	75.33	1.41	1.82	14.00	3,70
Jawa Barat	69.33	1.90	2.43	26.00	-7,10
Jawa Tengah	71.67	0.37	2.20	21.00	3,40
DI Yogyakarta	82.42	1.04	1.94	15.67	-2,60
Jawa Timur	73.54	0.76	2.00	25.00	10,60
Banten	77.08	2.78	2.35	24.33	2,30
Bali	72.28	2.15	2.13	20.00	0,30
Nusa Tenggara Barat	67.37	1.17	2.59	48.33	-1,80
Nusa Tenggara Timur	60.75	2.07	3.82	38.67	0,20
Kalimantan Barat	66.98	0.91	2.64	28.33	10,30
Kalimantan Tengah	68.14	1.79	2.56	23.33	2,00
Kalimantan Selatan	69.80	1.99	2.35	34.33	8,70
Kalimantan Timur	68.67	3.81	2.61	21.00	1,50
Sulawesi Utara	70.50	1.28	2.43	25.00	4,40
Sulawesi Tengah	65.53	1.95	2.94	45.00	-3,40
Sulawesi Selatan	67.31	1.17	2.55	31.00	7,60
Sulawesi Tenggara	63.57	2.08	3.20	39.67	-6,20
Gorontalo	66.79	2.26	2.76	56.33	-0,20
Sulawesi Barat	62.42	2.68	3.33	48.00	-0,10
Maluku	62.33	2.80	3.56	45.00	-11,30
Maluku Utara	63.36	2.47	3.35	39.67	-4,40
Papua Barat	73.45	3.71	3.18	28.00	-7,10
Papua	64.58	5.39	2.87	19.00	19,00
INDONESIA	70.18	1.49	2.41	26.00	2,30

Sumber : BPS, 2005

Jika dilihat persebarannya secara spasial, maka pada tahun 2010 sebagian besar provinsi di Indonesia telah mencapai proporsi penduduk usia produktif di atas 66 persen atau dapat dikatakan jumlah penduduk produktif mencapai dua per tiga dari jumlah penduduk keseluruhan. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Jawa Timur bahkan memiliki proporsi penduduk usia produktif di atas 70 persen. Rendahnya proporsi penduduk non produktif, terutama penduduk usia muda (0-14 tahun), dapat terjadi akibat rendahnya laju pertumbuhan penduduk (kurang dari 1 persen per tahun), yang sangat dipengaruhi oleh capaian TFR yang rendah di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun begitu, beberapa provinsi di Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, diperkirakan masih memiliki proporsi penduduk produktif yang cukup rendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini terutama dipengaruhi proporsi penduduk umur 0-14 tahun yang masih lebih dari 30 persen akibat masih tingginya tingkat kelahiran di daerah-daerah tersebut.

Jika ditinjau berdasarkan provinsi, maka wilayah-wilayah yang masih memiliki TFR tinggi antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sensus Penduduk, 2010). Di lain pihak, wilayah yang telah berhasil mencapai TFR rendah umumnya didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, antara lain DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Bali (Sensus Penduduk, 2010). Capaian TFR pada suatu wilayah secara tidak langsung mencerminkan kondisi pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang memiliki TFR tinggi dapat menggambarkan terbatasnya akses pelayanan kesehatan di wilayah ini, khususnya program KB. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan provinsi-provinsi di

Pulau Jawa yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap program pelayanan kesehatan yang digulirkan pemerintah, sehingga dapat berpengaruh pada rendahnya nilai TFR di wilayah ini. Selain itu, tinggi rendahnya TFR juga dipengaruhi usia kawin pertama kali oleh perempuan usia subur. Semakin tinggi rata-rata usia kawin perempuan di suatu wilayah, maka akan semakin rendah TFR di wilayah tersebut. Ada berbagai hal yang dapat menentukan usia kawin perempuan, antara lain tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan ataupun pekerjaan dari perempuan tersebut (BKKBN, 2012).

Sementara itu, provinsi yang mempunyai IMR tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku (Sensus Penduduk, 2010). Provinsi dengan IMR rendah adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara (Sensus Penduduk, 2010). Capaian IMR dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan kesehatan di suatu wilayah, utamanya kesehatan ibu dan anak. Pembangunan kesehatan tidak hanya terbatas pada pelayanan sarana dan prasarana yang terkait, namun juga peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tersebut, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan ataupun masyarakat miskin.

Penurunan tingkat fertilitas dan angka kematian bayi akan berdampak pada perubahan struktur umur, seperti penduduk usia balita (0-4 tahun) dan usia anak (5-9 tahun) yang semakin menyusut jumlahnya, sementara usia remaja (10-19 tahun) dan penduduk usia dewasa (20-29 tahun) akan cenderung bertambah. Meskipun begitu, pengaruh penurunan fertilitas dan mortalitas bayi pada kelompok-kelompok umur tersebut membutuhkan waktu (*time lag*) yang relatif lama hingga dapat memberikan

pengaruh signifikan terhadap perubahan struktur demografi atau yang dikenal dengan istilah momentum demografi (Tukiran dan Ediasuti, 2004).

Faktor lain yang mempengaruhi perubahan struktur penduduk adalah migrasi. Batasan migrasi yang digunakan adalah *recent migration*, yaitu seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila tempat tinggal pada saat survei berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun lalu sebelum survei. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, salah satu provinsi yang memperlihatkan arus migrasi besar adalah Jawa Barat. Persentase *recent migration* keluar Jawa Barat mencapai 7,66 persen dan migrasi masuk sebesar 13,28 persen. Tingginya arus migrasi ke Jawa Barat pada tahun 2000 disebabkan pada tahun 1990an pembangunan di Jawa Barat sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut, seperempat migran risen masuk ke provinsi ini (BPS, 1995). Perkembangan daerah metropolitan Jabodetabek menyebabkan Jawa Barat menjadi daerah tumpahan (*spill over effect*) pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi daerah *urban sprawl* bagi Jabodetabek (<http://metropolitan.jabarprov.go.id/berita/14>).

Sementara itu, daerah yang arus migrasinya tergolong kecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Migrasi yang masuk di provinsi ini pada tahun 2000 sebesar 0,33 persen dan migrasi keluar sebesar 0,67 persen, sehingga dapat dikatakan faktor migrasi tidak berpengaruh banyak dalam laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini.

Data pertumbuhan penduduk 2000-2010 menunjukkan provinsi-provinsi yang memiliki pola *net migration rate* positif dan lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya antara lain Riau,

Banten, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai tingginya daya tarik wilayah ini sehingga dapat mendorong besarnya migrasi masuk. Daya tarik wilayah ini utamanya dalam hal daya tarik ekonomi, misalnya potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan di wilayah tersebut ataupun kesempatan kerja yang jauh lebih besar dibandingkan daerah asal migran. Di pihak lain, provinsi-provinsi seperti Nangroe Aceh Darusalam dan Maluku memiliki pola *net migration rate* negatif yang cukup tinggi. Pola migrasi di kedua provinsi tersebut cukup mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini, sebab pada proyeksi tahun 2020-2025 hanya kedua provinsi ini yang dipredikasikan memiliki laju pertumbuhan penduduk negatif (BPS, 2005).

2.2. Ketahanan Ekonomi Indonesia

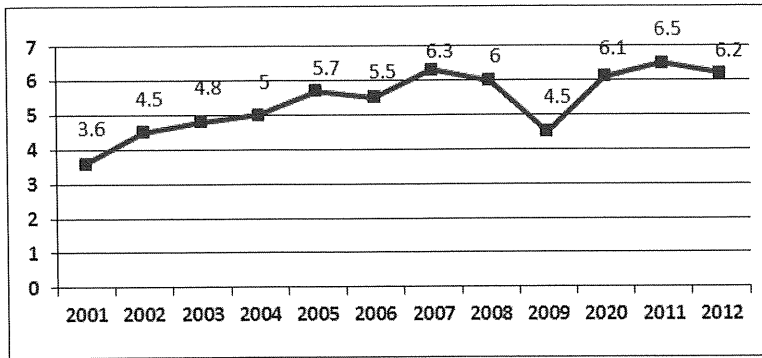
Jika ditinjau dalam konteks makro, ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi serta memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemandirian ekonomi nasional (Yong, 2007). Kestabilan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kestabilan capaian PDB (Produk Domestik Bruto) dari tahun ke tahun. PDB merupakan agregat dari belanja pemerintah, investasi, konsumsi swasta serta selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sempat mengalami kondisi tidak stabil saat krisis ekonomi regional yang terjadi pada tahun 1997, sehingga pada pertengahan tahun 1998 pertumbuhan

ekonomi Indonesia sempat merosot tajam menjadi -13,1 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 7,6 persen. Meskipun begitu, pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai naik menjadi 0,8 persen. Kinerja perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan yang stabil sejak dekade 2000-an. Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,6 persen dan hingga tahun 2007 menjadi sebesar 6,3 persen (gambar 2.1). Pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat pada dekade 2000-an utamanya didorong oleh pertumbuhan konsumsi dan juga penurunan belanja pemerintah (Departemen Keuangan, 2008). Sayangnya, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun kembali menjadi 4,5 persen sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Walaupun terpuruk pada tahun 2009, tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan hingga 6,33 persen (Bank Indonesia, 2010). Berbagai faktor yang mempengaruhi tren pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain terkendalinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, inflasi yang stabil, menurunnya suku bunga, dan penerimaan dalam negeri (pajak) yang terus meningkat (Departemen Keuangan, 2008).

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi, baik dalam cakupan regional dan global, menandakan pentingnya aspek kemandirian ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi suatu negara untuk tetap dapat tumbuh stabil, dengan seminimal mungkin bergantung pada kondisi perekonomian global atau di luar negaranya. Negara yang perekonomiannya mandiri bisa tetap bertahan atau tumbuh ekonominya bahkan ketika sebagian besar negara-negara lain mengalami kondisi goncangan perekonomian. Pondasi utama yang diperlukan dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional adalah konsumsi publik, yang sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat.

Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2012



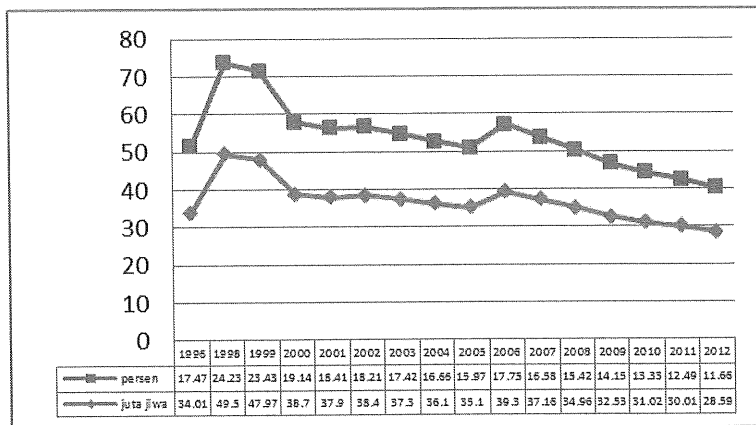
Sumber : www.imf.org, 2010

Pentingnya konsumsi publik dalam menjaga ketahanan ekonomi di suatu negara dapat terlihat pada saat krisis global yang terjadi tahun 2008/2009. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif mulai tahun 2008, sementara pada saat yang bersamaan negara-negara maju di Asia seperti Singapura, Jepang, ataupun Hongkong mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (Bank Indonesia, 2007). Hal ini disebabkan karena pertumbuhan PDB negara-negara maju tersebut sangat bergantung pada komponen ekspor-impor. Akibatnya ketika krisis global terjadi mengakibatkan turunnya permintaan global dan impor di negara-negara tersebut, maka kondisi ekonomi negara itu rawan mengalami guncangan. Indonesia yang PDB-nya bergantung pada komponen konsumsi masyarakat mengalami kondisi perekonomian yang relatif stabil karena ketergantungan pada komponen ekspor-impor yang tidak terlalu besar.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia dapat terlihat jelas melalui pengamatan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan antar pulau dan antar provinsi. Jika ditinjau berdasarkan pulau, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,64 persen terhadap total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2011, sedangkan Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 23,54 persen. Di pihak lain, pulau-pulau lain hanya berkontribusi kurang dari 10 persen, seperti Pulau Kalimantan (9,55 persen), Sulawesi (4,61 persen), Nusa Tenggara (3,88 persen), Maluku (3,88 persen), dan Papua (3,88 persen) (BPS, 2012).

Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan tiga provinsi penyumbang PDB terbesar dengan total kontribusi 45,3 persen. Meskipun begitu, jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi, terdapat provinsi-provinsi lain yang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan di atas 10 persen, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam kurun waktu 2009-2010. Provinsi lainnya yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi rendah adalah Riau, Nangroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Barat.

Gambar 2.2. Grafik Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1996 - 2010



Sumber : BPS (2010b, 2012)

Gambaran mengenai kemampuan konsumsi masyarakat di suatu wilayah dapat dicermati melalui angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan dianggap sebagai indikator kemampuan konsumsi masyarakat sebab kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Menurut Sen (1999), kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut. Jumlah penduduk miskin Indonesia berfluktuatif dari tahun 1996 hingga 2010 meskipun semenjak tahun 2006 cenderung menurun. Puncak jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia pada tahun 1998 setelah krisis ekonomi yang mencapai 24,23 persen atau 49,5 juta jiwa. Meskipun begitu, sejak tahun 2003 jumlah penduduk miskin hampir sama dengan jumlah sebelum krisis yaitu sebesar 17,42 persen. Setelah itu jumlah penduduk miskin turun hingga sebesar 14,15 persen pada tahun 2009. Pada September 2012,

jumlah penduduk miskin kembali turun lagi menjadi 11,6 persen meskipun garis kemiskinan dinaikkan menjadi Rp 259.520 per kapita per bulan dari Rp 200.262 per kapita per bulan pada tahun 2009.

Persebaran jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Jawa pada tahun 2009 mencapai rata-rata 56,6 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2009). Meskipun begitu, jika ditinjau dari persentase penduduk miskin, maka umumnya provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur memiliki proporsi penduduk miskin yang cukup tinggi. Penduduk miskin di Papua, Papua Barat, dan Maluku mencapai kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk provinsi tersebut. Sebaliknya, provinsi DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan Selatan tergolong memiliki proporsi penduduk miskin yang rendah dibandingkan provinsi lainnya. Paparan lebih lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan menurut provinsi dapat dicermati pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Menurut Provinsi Tahun 2010

<i>Provinsi</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	<i>Angka Kemiskinan</i>
NAD	3,50	20,98
Sumatera Utara	6,50	11,31
Sumatera Barat	4,80	9,50
Riau	2,10	8,65
Jambi	6,90	8,34
Sumatera Selatan	5,70	15,47

Bengkulu	5,50	18,30
Lampung	5,50	18,94
Bangka Belitung	6,00	6,51
DKI Jakarta	6,50	3,48
Jawa Barat	6,90	11,27
Jawa Tengah	5,60	16,56
DIY	5,50	16,83
Jawa Timur	6,50	15,26
Banten	5,80	7,16
Bali	5,60	4,88
NTB	11,90	21,55
NTT	5,20	23,03
Kalimantan Barat	5,70	9,02
Kalimantan Tengah	6,70	6,77
Kalimantan Selatan	6,00	5,21
Kalimantan Timur	7,70	7,66
Sulawesi Utara	6,8	9,10
Sulawesi Tengah	13,1	18,07
Sulawesi Selatan	9,2	11,60
Sulawesi Tenggara	9,0	17,05
Gorontalo	7,3	23,19
Sulawesi Barat	18,8	13,58
Maluku	7,2	27,74
Maluku Utara	8,4	9,42
Papua	5,8	34,88
Papua Barat	-17,9	36,80

Sumber : BPS, 2010a

Meskipun terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang positif dengan menurunnya tingkat kemiskinan di tingkat nasional, namun data empiris di tingkat provinsi menunjukkan

tidak ada pola hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. Hubungan yang tidak linear tersebut dapat disebabkan berbagai hal, antara lain pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan juga angka kemiskinan. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi setempat. Konsumsi masyarakat pada sektor yang tidak secara langsung mendorong perolehan PDB di suatu wilayah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, meskipun proporsi penduduk miskin di wilayah tersebut tidak terlampau besar.

2.3. Hubungan Perubahan Struktur Penduduk dengan Ketahanan Ekonomi

Perubahan struktur penduduk Indonesia sebagian besar dikarenakan keberhasilan program KB pada masa lalu. Dengan adanya program KB, angka kelahiran bisa ditekan dan bayi-bayi yang lahir bisa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan kualitas kesehatan lebih baik dan menurunnya tingkat kematian. Menurut proyeksi BPS, terjadi peningkatan proporsi penduduk usia produktif pada tahun 2010 menjadi 68,6 persen.

Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Perekonomian nasional berangsur-angsur mengalami peningkatan setelah diterpa krisis global tahun 2008 – 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh menggeliatnya perekonomian secara global. Selain faktor pertumbuhan ekonomi global, meningkatnya perekonomian

Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor domestik seperti faktor kenaikan konsumsi penduduk, investasi, kegiatan ekspor dan penanaman modal asing.

Secara teoritis, apabila struktur umur penduduk didominasi penduduk berusia produktif maka kesejahteraan ekonomi penduduk di daerah tersebut diharapkan meningkat karena banyaknya jumlah anggota keluarga yang bekerja dan disertai jumlah beban tanggungan yang semakin berkurang. Peningkatan kesejahteraan penduduk dapat meningkatkan daya beli sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Meskipun begitu, keberagaman kondisi wilayah tentunya akan mengakibatkan perbedaan pola hubungan antara struktur umur penduduk dan pertumbuhan ekonomi antar-provinsi di Indonesia (Tabel 2.4).

Tabel 2.4. Tipologi Hubungan Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Pertumbuhan Ekonomi 2005-2010

	<i>Proporsi penduduk usia produktif provinsi > proporsi penduduk usia produktif Indonesia</i>	<i>Proporsi penduduk usia produktif provinsi < proporsi penduduk usia produktif Indonesia</i>
<i>Pertumbuhan ekonomi provinsi > pertumbuhan ekonomi Indonesia</i>	Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara	Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara
<i>Pertumbuhan ekonomi provinsi < pertumbuhan ekonomi Indonesia</i>	DIY, Bali, Kalimantan Selatan, Papua	NAD, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Banten, NTT, Kalimantan Barat

Sumber : diolah dari data BPS (2005, 2010a)

Provinsi Jawa Timur yang menjadi lokasi penelitian ini, termasuk dalam provinsi yang memiliki capaian proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan ekonomi yang melebihi nilai capaian nasional. Hal ini menandakan adanya keefektifan penyerapan penduduk usia produktif di wilayah ini sehingga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari komposisi penduduknya, piramida penduduk Jawa Timur berbentuk konstruktif yang menggelembung di tengah, yang menandakan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non produktif. Penduduk usia produktif di Jawa Timur sebesar 71,95 persen pada tahun 2010 (BPS, 2005). Kondisi ini merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur tergolong rendah, yaitu sebesar 0,76 persen per sepuluh tahun. Angka yang rendah ini karena tingkat kelahiran serta *net migration rate* yang relatif rendah yang menggambarkan tingginya angka migrasi keluar dari Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) utama di Indonesia.

Rendahnya pertumbuhan penduduk Jawa Timur disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat meskipun fluktuatif. Terjadi pertumbuhan ekonomi dari 3,1 persen pada tahun 2003 menjadi 6 persen pada tahun 2007. Tahun 2008 angka pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,9 persen dan menurun lagi pada tahun 2009 menjadi 4,6 persen. Namun pada tahun 2010, terjadi tren peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5 persen (Bank Indonesia, 2010d) dan terus meningkat menjadi 7,22 persen pada tahun 2012 (BPS Jawa Timur, 2012). Pertumbuhan sektor industri dan pertanian menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Walau faktor cuaca

yang tidak menentu mengakibatkan adanya pergeseran musim tanam (memasuki masa berakhirnya musim panen), bencana banjir, ancaman hama wereng dan kelangkaan pupuk di beberapa wilayah. Namun demikian kinerja sektor pertanian masih tetap baik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga ditopang oleh pembiayaan luar negeri terutama remitansi dari para TKI.

Sejalan dengan kecenderungan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung fluktuatif, pertumbuhan penduduk miskin di Jawa Timur yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin mencapai 7.353.400 jiwa dan berangsur-angsur menurun menjadi 6.549.000 jiwa pada tahun 2008, dan turun lagi hingga sebesar 4.960.500 jiwa pada tahun 2012 (BPS, 2013). Keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur dipicu oleh program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah provinsi ini. Salah satu program yang digulirkan adalah program pemberdayaan unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan fokus utama pada petani. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat petani akan semakin meningkat. Peranan pemerintah dalam usaha pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dapat memperlihatkan pentingnya keikutsertaan pemerintah dalam usaha memelihara ketahanan ekonomi dalam suatu wilayah.

Salah satu provinsi yang memiliki proporsi penduduk produktif kurang dari capaian nasional, namun angka pertumbuhan ekonominya melebihi angka nasional adalah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat memberikan gambaran peluang optimalisasi penyerapan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi di provinsi ini. Jika dicermati dari komposisi umur penduduknya, maka struktur penduduk Jawa Barat membentuk piramida konstruktif dengan

tipe melebar pada bagian bawah dan meruncing diatas (lampiran 2.1). Tipe ini memiliki jumlah penduduk yang besar pada kelompok usia muda, dengan laju pertumbuhan penduduk masih di atas 1 persen per tahun. Tipe piramida di Jawa Barat ini serupa dengan bentuk piramida penduduk Indonesia.

Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi ini mengalami kenaikan sejak tahun 2001 hingga tahun 2007 yaitu dari 3,16 persen menjadi 6,4 persen. Dalam kurun waktu 2008-2009, kinerja perekonomian Jawa Barat sempat mengalami penurunan hingga mencapai 4,4 persen karena adanya pengaruh krisis perekonomian global. Meskipun begitu, pada tahun 2012, tren perekonomian Jawa Barat menunjukkan peningkatan menjadi 6,21 persen per tahun (BPS, 2012). Pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan naiknya permintaan konsumsi rumah tangga karena membaiknya daya beli masyarakat, kenaikan penghasilan, inflasi yang terkendali dan terjadi peningkatan penawaran di sektor pertanian (Bank Indonesia, 2010a).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif ini diharapkan dapat mendorong kenaikan kondisi kesejahteraan penduduk di provinsi, terutama karena dibarengi dengan kondisi besarnya proporsi penduduk usia produktif. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dapat mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran sekaligus angka kemiskinan. Hal ini tercermin dari menurunnya jumlah penduduk miskin Jawa Barat dari 4,98 juta jiwa pada tahun 2009 menjadi 4,41 juta jiwa pada tahun 2012 (BPS, 2012). Adanya pertumbuhan ekonomi yang positif dan penurunan jumlah penduduk miskin diharapkan dapat menjamin ketahanan ekonomi

di wilayah ini. Kondisi ekonomi yang tahan tersebut dapat mendorong optimalisasi penyerapan penduduk usia produktif dalam pasar kerja sehingga mendukung kesejahteraan penduduk setempat.

Penyerapan penduduk usia produktif yang kurang optimal tercermin dari tingginya proporsi penduduk produktif namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi tergolong rendah. Salah satu provinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki indikator kependudukan yang cukup baik, yang tercermin dari nilai TFR dan IMR yang rendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia (lihat tabel 2.2). Struktur penduduk provinsi ini semakin menua, yang ditandai dengan angka harapan hidup yang semakin tinggi dan pertumbuhan penduduk yang semakin rendah. Jumlah kelahiran di DIY dari tahun ke tahun semakin menurun serta angka harapan hidup semakin naik sehingga jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih sedikit daripada penduduk usia dewasa. Pada tahun 2010, penduduk usia produktif di DIY mencapai 82,42 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Sayangnya, kondisi kependudukan yang baik di provinsi ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian setempat. Meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 3,64 persen pada tahun 2001 hingga mencapai 5,6 persen pada tahun 2012 (BPS, 2013), namun laju pertumbuhan ekonomi DIY tergolong rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang positif di DIY dalam satu dasawarsa terakhir utamanya didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan juga meningkatnya investasi di daerah ini melalui

pembangunan proyek oleh swasta maupun pemerintah daerah (Bank Indonesia, 2010b).

Laju pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah di DIY terutama akibat adanya permasalahan ketenagakerjaan di wilayah ini. Pada tahun 2009, terjadi peningkatan jumlah penganggur yang cukup besar. Jumlah pengangguran di Yogyakarta pada tahun 2009 mencapai 132.552 jiwa atau mengalami peningkatan 34,66 persen dari tahun 2008 (BPS, 2009). Peningkatan penganggur yang cukup tinggi ini karena adanya pemutusan hubungan kerja pada awal 2009 terkait dengan krisis finansial global yang menghantam industri yang berorientasi ekspor. Walaupun jumlah penganggur di Yogyakarta meningkat namun persentase penduduk miskin justru menurun dari 4,99 pada tahun 2008 menjadi 14,25 persen pada tahun 2009 (Bank Indonesia, 2010b). Penurunan proporsi penduduk miskin pada tahun 2009/2010 dikarenakan gencarnya implementasi program pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembagian beras untuk kelompok miskin dan pembebasan SPP untuk wajib belajar 9 tahun. Namun pada tahun 2012, persentase penduduk miskin DIY meningkat kembali menjadi 15,88 persen (BPS, 2012).

Rendahnya proporsi penduduk usia produktif yang berimbas pada rendahnya pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dicermati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi ini memiliki proporsi penduduk usia produktif sebesar 60,75 persen pada tahun 2010. Angka ini tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Struktur penduduk NTT masih berbentuk ekspansif dengan ciri jumlah penduduk usia muda jauh lebih besar daripada penduduk usia dewasa. Faktor yang mengakibatkan piramida penduduk di Nusa Tenggara Timur berbentuk ekspansif

adalah masih tingginya angka kelahiran serta angka kematian bayi di provinsi ini. Meskipun begitu, tren piramida penduduk NTT menunjukkan adanya penurunan angka kelahiran dan angka kematian bayi dari tahun ke tahun. Rendahnya proporsi penduduk usia produktif di wilayah ini juga disebabkan besarnya angka migrasi keluar, yang ditandai dengan *net migration rate* yang negatif. Besarnya migrasi keluar di provinsi ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa NTT merupakan salah satu provinsi pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) yang relatif besar. Jumlah TKI asal NTT pada tahun 2010 sekitar 40 ribu orang atau 15,02 persen dan mayoritas (sekitar 95 persen) TKI tersebut bekerja di Malaysia (BNP2TKI, 2010).

Tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi kependudukan NTT, keberadaan TKI ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di NTT. Hal ini relatif dipengaruhi oleh adanya remitansi dalam jumlah besar yang dikirimkan oleh para TKI, yaitu mencapai hingga 478,8 miliar rupiah (Provinsi NTT, 2010). Tingginya arus uang yang masuk ke NTT oleh para TKI, diharapkan dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi NTT.

Ditinjau dari kinerja ekonominya, NTT menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Tren peningkatan terjadi pada tahun 2001 (4,78 persen) hingga tahun 2004 (5,34 persen), namun mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 3,46 persen per tahun. Setelah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan 2007 hingga kembali mencapai 5 persen, penurunan pertumbuhan ekonomi terus terjadi sejak tahun 2008 (4,75 persen) (BPS, 2012). Penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terjadi karena penurunan kinerja sektor pertanian

akibat sangat sedikitnya ketersediaan modal. Melemahnya sektor pertanian juga berimbas pada melemahnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran (Bank Indonesia, 2010c).

Usaha percepatan pertumbuhan ekonomi di NTT diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dan penurunan angka kemiskinan di provinsi ini. Penurunan jumlah penduduk miskin NTT telah berjalan cukup konsisten sejak tahun 2006 hingga 2009. Pada tahun 2006 penduduk miskin sekitar 29,34 persen, tahun 2007 sebesar 27,51 persen, hingga pada tahun 2012 menjadi 20,41 persen (BPS, 2009, 2012). Penduduk miskin di NTT umumnya terkonsentrasi di daerah pedesaan dikarenakan belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah di provinsi ini. Hal ini mengindikasikan perlunya usaha pemerataan pembangunan di NTT, termasuk perluasan lapangan kerja di wilayah pedesaan.

Bab III

Kabupaten Lamongan: Kondisi Wilayah dan Kependudukan

Pembahasan mengenai kondisi wilayah mencakup lokasi dan tipologi wilayah, kondisi iklim dan indikasi perubahannya, perekonomian daerah kabupaten Lamongan, serta situasi kependudukan di kabupaten Lamongan maupun daerah penelitian. Jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk selama beberapa tahun terakhir menjadi fokus kajian untuk mengetahui perubahan struktur penduduk di kabupaten Lamongan. Pembahasan tentang kondisi penduduk ini menjadi penting untuk dikemukakan karena salah satu tujuan dari kajian ini adalah memperoleh pemahaman tentang keterkaitan antara perubahan struktur penduduk dengan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga.

3.1. Lokasi dan Tipologi Wilayah

Bagian ini menguraikan kondisi wilayah kabupaten Lamongan dan lokasi penelitian (desa Mantup dan desa Weru), meliputi kondisi topografis dan posisi dari permukaan laut, tata guna lahan serta sebaran dari penggunaan lahan, dan akses terhadap sarana-prasarana kegiatan ekonomi di sekitarnya maupun kegiatan pembangunan lainnya.

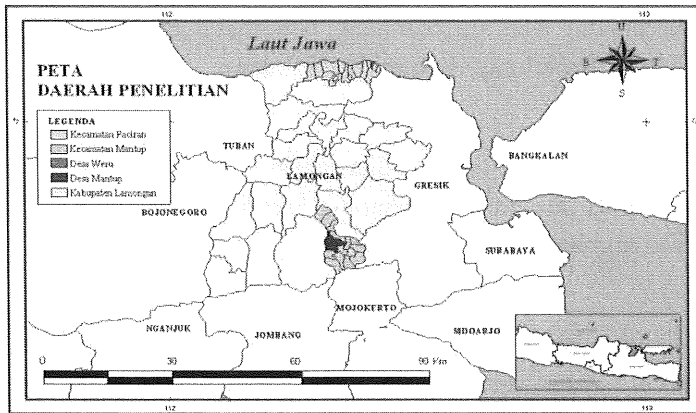
Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan dan 474 desa/ kelurahan yang berbatasan dengan beberapa kabupaten, seperti kabupaten Gresik di sebelah timur, kabupaten Mojokerto dan Jombang di sebelah selatan, kabupaten Bojonegoro dan Tuban di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa. Dilihat dari aspek topografi, kabupaten Lamongan merupakan daerah yang cenderung cekung di tengah, tinggi di sebagian selatan dan utara, serta dilalui oleh sungai Bengawan Solo. Sungai ini memiliki peranan penting untuk usaha pertanian, khususnya di wilayah bagian utara pada saat musim kemarau. Dengan menggunakan pompa air, Bengawan Solo dapat dimanfaatkan untuk usaha tanaman padi dan budidaya ikan/ udang. Wilayah Lamongan sebagian besar terdiri dari daerah dataran rendah dan rawa-rawa. Secara garis besar, kondisi topografi kabupaten Lamongan dapat dibedakan menjadi 3 karakteristik, sebagai berikut:

- a. Bagian tengah selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari kecamatan Kedungpring, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.

- b. Bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan tingkat kesuburan sedang, meliputi kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokuro.
- c. Bagian tengah utara merupakan daerah rawan banjir, meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Tingkat kemiringan tanah di kabupaten Lamongan meliputi sekitar 6 persen dari seluruh wilayahnya berada pada tingkat kemiringan lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15 derajat. Kabupaten Lamongan didominasi oleh daratan rendah (50,17 persen) dengan tingkat ketinggian 0 – 25 m, sedangkan hanya sekitar 4,15 persen berada pada ketinggian lebih dari 100 m di atas permukaan air laut (BPS Lamongan dalam Angka, 2012). Dari segi topografi, kabupaten Lamongan yang merupakan dataran rendah merupakan daerah yang subur untuk pengembangan tanaman padi dan tanaman pangan lainnya. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai kondisi sektor pertanian di kabupaten ini yang telah dikenal sebagai daerah 'lumbung padi'.

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Lamongan



Sumber : Peta Dasar BPS 2010

Luas wilayah kabupaten Lamongan adalah 1.812,80 km² atau setara dengan 181.280 ha. Penggunaan lahan di kabupaten Lamongan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang terdiri dari tiga kawasan yaitu perlindungan setempat, rawan bencana alam, dan lindung geologi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan pesisir.

Ditinjau dari pemanfaatannya, kondisi tata guna tanah kabupaten Lamongan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1. Kondisi Tata Guna Lahan Kabupaten Lamongan

<i>No</i>	<i>Jenis Penggunaan Lahan</i>	<i>Luas (Ha)</i>	<i>Persentase</i>
1	Permukiman	13.030,00	7.19
2	Sawah Irigasi	45.841,00	25.29
3	Sawah Tadah Hujan	33.479,00	18.47
4	Perkebunan	9.919,14	5.47
5	Hutan	33.717,30	18.60
6	Hutan Rakyat	7.098,10	3.92
7	Tambak	1.380,05	0.76
8	Sungai	8.760,00	4.83
9	Waduk	8.719,50	4.81
10	Tegalan/Ladang	12.138,91	6.70
11	Pertambangan	1.200,00	0.66
12	Peruntukan Lainnya (rawa, tanah tandus dll)	5.997,00	3.31
Total		181.280,00	100

Sumber : RTRW Kabupaten Lamongan 2011-2031

Dari tabel di atas tergambar bahwa lahan di kabupaten Lamongan masih didominasi oleh persawahan (43,76 persen). Kawasan pertanian yang terdapat di kabupaten Lamongan secara keseluruhan seluas 91.458,91 ha dengan rincian : pertanian lahan basah (sawah) seluas 79.320 ha dan pertanian lahan kering/ hortikultura (bukan sawah) seluas 12.138,91 ha. Kawasan pertanian tersebar diseluruh kecamatan di kabupaten Lamongan.

Lokasi penelitian adalah desa Mantup dan Weru yang berturut-turut terletak di wilayah kecamatan Mantup dan

Paciran. Kecamatan Mantup yang luasnya 93,07 km² terdiri dari 15 desa berbatasan dengan kecamatan Sambeng dan Kembangbahu. Sebagian besar lahan di desa Mantup digunakan untuk pertanian (443.38 ha).

Sementara itu kecamatan Paciran berbatasan dengan laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur dengan kecamatan Panceng, kabupaten Gresik, sebelah selatan dengan kecamatan Solokuro dan sebelah barat dengan kecamatan Brondong. Kecamatan Paciran terdiri dari 17 desa dan memiliki luas 61.303 km². Dilihat dari kondisi geografisnya, desa Mantup di kecamatan Mantup berupa wilayah dataran, sementara desa Weru di kecamatan Paciran merupakan daerah pantai yang terletak kira-kira 2 meter dari permukaan air laut. Desa Weru yang seluas 11,4 ha, sebagian besar lahannya digunakan untuk permukiman (7,5 ha).

3.2 Kondisi Iklim dan Indikasi Perubahannya

Rata-rata musim hujan per tahun di kabupaten Lamongan cenderung lebih lama daripada musim kemarau. Dalam kondisi normal, musim penghujan terjadi antara pertengahan September sampai pertengahan Februari. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan kondisi iklim yang diindikasikan dari musim penghujan mulai turun pada awal Oktober sampai bulan Mei, sedangkan musim kemarau hanya berlangsung selama lima bulan, yaitu mulai Juni sampai September (Renstra SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan tahun 2006-2010; Kantor Ketahanan Pangan 2009). Memperhatikan data curah hujan menurut stasiun pengamatan pada tahun 2011 pada tabel 3.2, rata-rata curah hujan dalam 10 tahun terakhir di beberapa kecamatan adalah di atas 1.800 mm, yaitu di kecamatan

Kedungpring, Ngimbang, dan Modo. Curah hujan di kecamatan Mantup termasuk tinggi yaitu rata-rata mencapai 1.444 mm. Sementara itu curah hujan rata-rata di kecamatan Paciran dalam 10 tahun hanya sekitar 543 mm. Dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang termasuk dalam wilayah kabupaten Lamongan, maka rata-rata curah hujan di Paciran adalah yang terendah (BPS kabupaten Lamongan 2012).

Terjadinya perubahan kondisi iklim diasumsikan membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap masa panen raya padi dan pola tanam yang menunjukkan pergeseran waktu, seperti yang dipaparkan oleh narasumber dari Bappeda tingkat provinsi Jawa Timur. Gejala perubahan iklim, menurut narasumber tersebut, mulai dirasakan dalam 1-2 tahun belakangan ini yang ditandai dengan curah hujan yang relatif sering frekuensinya.

Berita Resmi Statistik BPS Jawa Timur 2010 mencatat bahwa telah terjadi pergeseran panen raya padi, dari yang semula diperkirakan terjadi pada bulan Februari – Maret 2010 menjadi Maret – April 2010. Adanya pergeseran panen raya padi ini kemungkinan menyebabkan sektor pertanian tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap PDRB Jawa Timur, dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar 0,99 persen. Sumbangan dari sektor pertanian dibandingkan dengan sektor-sektor 'tradable goods' lainnya pada tahun 2010 tidak termasuk yang dominan dalam pertumbuhan roda ekonomi Jawa Timur. Meskipun faktor lainnya seperti ketersediaan pupuk, alih fungsi lahan pertanian, usaha tani yang terbatas, dan ketersediaan sarana irigasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap hasil produksi pertanian, namun diindikasikan adanya variabilitas perubahan iklim yang membawa pengaruh cukup signifikan terhadap sektor pertanian. Kondisi

ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara umum. (Lampiran RKPD Kab. Ponorogo, 2013:60-62).

Tabel 3.2. Banyaknya Curah Hujan menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2011 (mm) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

No	Stasiun pengamatan	Kecamatan	Curah hujan	Rata-rata 10 th terakhir
1	Lamongan	Lamongan	1.722	1.421
2	Takeran	Tikung	2.053	1.717
3	Mantup	Mantup	1.672	1.517
4	Kembangbahu	Kembangbahu	1.638	1.399
5	Sukodadi	Sukodadi	1.670	1.444
6	Gondang	Sugio	1.975	1.763
7	Kedungpring	Kedungpring	2.117	1.719
8	Gandang	Ngimbang	1.484	625
9	Prijetan	Kedungpring	1.970	1.828
10	Kayen	Ngimbang	1.596	527
11	Bluluk	Bluluk	2.623	1.704
12	Ngimbang	Ngimbang	2.023	1.671
13	Girik	Ngimbang	1.736	1.890
14	Modo	Modo	1.815	1.801
15	Pucuk	Pucuk	1.445	1.256
16	Babat	Babat	1.978	1.711
17	Jabung	Laren	1.516	1.580
18	Paciran	Paciran	1.229	543
19	Brondong	Brondong	3.306	1.480
20	Bluri	Solokuro	1.343	1.342
21	Pangkatrejo	Maduran	1.435	1.469
22	Karanggeneng	Karanggeneng	2.097	1.705
23	Blawi	Glagah	1.506	1.474
24	Kuro	Karangbinangun	1.721	1.699
25	Karangbinangun	Karangbinangun	1.488	1.425
Jumlah Total			45.158	36.710

Sumber: Lamongan Dalam Angka, 2012

*Tabel 3.3. Jumlah Hari Hujan (HH) dan Curah Hujan (CH)
Per Bulan di Kecamatan Mantup Tahun 2005-2009 (mm)*

<i>Bulan</i>	<i>2005</i>		<i>2006</i>		<i>2007</i>		<i>2008</i>		<i>2009</i>	
	<i>HH</i>	<i>CH</i>	<i>HH</i>	<i>CH</i>	<i>HH</i>	<i>CH</i>	<i>HH</i>	<i>CH</i>	<i>HH</i>	<i>CH</i>
Januari	9	354	8	276	7	256	17	271	19	266
Februari	14	335	15	390	16	342	15	214	16	271
Maret	13	350	12	105	13	215	13	125	18	234
April	2	20	3	36	2	43	7	243	10	183
Mei	2	106	1	0	3	0	5	14	4	26
Juni	1	0	1	0	2	0	0	36	1	31
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0
September	0	0	0	0	0	0	2	16	4	14
Oktober	0	0	1	36	2	86	11	7	8	18
November	3	93	2	115	3	106	16	82	17	112
Desember	8	225	7	276	6	221	19	14	17	98
Jumlah	52	1483	50	1234	54	1269	108	1028	114	1253

Sumber : Kecamatan Mantup Dalam Angka, 2010

Fenomena perubahan iklim juga terjadi di lokasi penelitian. Hal ini antara lain diindikasikan oleh tingginya rata-rata curah hujan dalam 10 tahun terakhir di kecamatan Mantup. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kecamatan Mantup memiliki rata-rata curah hujan 1.684 mm (BPS Kabupaten Lamongan 2008). Data tentang curah hujan per bulan yang dikeluarkan oleh Stasiun Pengamat Hujan kecamatan Mantup (2005-2008) juga mengindikasikan adanya perubahan musim penghujan. Data tersebut jelas memperlihatkan adanya musim hujan yang lebih panjang, terutama terjadi pada tahun 2008, yaitu dari Januari sampai bulan Juni (biasanya hujan berhenti bulan April), kemudian turun hujan lagi pada bulan Agustus yang pada kondisi normal tidak memasuki pada musim kemarau.

Perubahan iklim menyebabkan masa panen juga menjadi mundur. Masyarakat petani sulit untuk menentukan masa tanam karena iklim yang berubah-ubah sehingga sulit untuk memperkirakan datangnya musim hujan atau kemarau. Pada tahun lalu frekuensi hujan sangat kurang, namun saat ini yang seharusnya sudah memasuki musim kemarau, justru hujan masih sering terjadi, bahkan dengan curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi hasil produksi padi dan palawija (jagung dan kedelai), yang juga merupakan jenis tanaman yang diusahakan petani di kecamatan Mantup. Selain itu, hujan yang berkepanjangan juga sangat mempengaruhi produksi tanaman tebu yang merupakan salah satu komoditi pertanian cukup penting di kabupaten Lamongan. Kelebihan air hujan menyebabkan kadar gula (rendemen) pada tebu menjadi rendah (bisa turun hingga 6, sementara untuk menghasilkan gula yang baik diperlukan rendemen sebesar 8,5). Perubahan iklim juga berdampak pada menurunnya produksi/hasil panen akibat ikan terbawa air banjir maupun mengecilnya ukuran ikan

Variabilitas perubahan curah hujan yang melanda sebagian daerah di Indonesia telah menyebabkan total produksi padi pada tahun 2011 hanya mampu mencapai 678.042 ton, sementara tahun 2010 sekitar 857.638 ton. Bandingkan dengan sasaran produksi padi sebesar 899.871 ton (GKG) yang ditetapkan tahun 2012. Gencarnya serangan hama wereng coklat sebagai dampak dari turunnya hujan yang berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu 2010-2011 telah mendorong merebaknya serangan

hama wereng di daerah. Begitu parahnya dampak perubahan iklim sehingga pemerintah di tingkat pusat dan provinsi merasa perlu turun tangan membantu menanggulangnya⁵.

Masyarakat di wilayah pesisir juga merasakan terjadinya perubahan musim yang ditandai dengan pergeseran musim Barat. Biasanya musim Barat terjadi dari pertengahan bulan Januari sampai dengan Februari, namun fenomena yang terjadi dalam satu tahun belakangan ini musim barat masih berlangsung sampai dengan bulan Mei. Musim Barat ditandai dengan turunnya hujan, angin kencang dan arus air laut yang deras. Adanya pergeseran musim Barat ini menyebabkan para nelayan berhenti melaut dalam jangka waktu cukup lama.

Perubahan iklim di wilayah pesisir ini pada gilirannya juga berdampak terhadap hasil produksi ikan. Sektor perikanan juga rentan terdampak perubahan iklim. Perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya intensitas dan frekuensi badai di lautan dan pesisir (Miller, 2009). Hal ini tentunya juga menyebabkan terganggunya aktivitas melaut para nelayan, yang sangat bergantung pada hasil tangkapan sumberdaya laut. Data hasil produksi perikanan sektor laut yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, kabupaten Lamongan menunjukkan produksi perikanan laut selama kurun waktu 2008 -2009 meskipun tidak menunjukkan penurunan secara drastis, namun demikian peningkatannya hanya sedikit saja. Menurut data yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Pelelangan Ikan Kranji, kecamatan Paciran, produksi perikanan

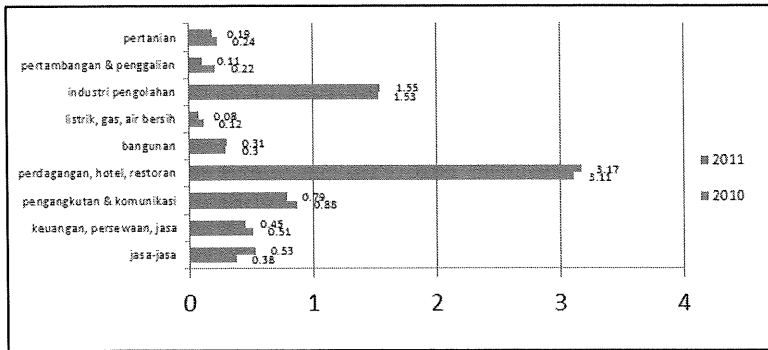
5 <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/berita-jawa-timur-targetkan-produksi-padi-1231-juta-ton.html#ixzz33eTW6CP1>
(27 Mei 2013)

laut pada tahun 2008 sebesar 3.692.564 kg, sedangkan pada tahun 2009 meningkat sekitar 0,50 persen, menjadi 3.711.027 kg. Kondisi yang sama juga terjadi untuk Pelabuhan Pelelangan Ikan Weru, yaitu pada tahun 2008 produksi perikanan lautnya tercatat sebesar 2.183.119 kg, meningkat hanya sebesar 0,49 persen (2.194.034 kg) di tahun 2009

3.3. Perekonomian Daerah

Perekonomian Jawa Timur yang diindikasikan dengan angka pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2006-2011. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010 dimana PDRB mencapai 6,68 persen. Pertumbuhan perekonomian pada tahun 2010 berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 2.84 persen, sementara kontribusi dari sektor lainnya, seperti jasa, pertanian, industri pengolahan di bawah 1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 masih terus berlanjut hingga triwulan IV 2011 menjadi 7,12 persen. Kondisi pertumbuhan perekonomian Jawa Timur jauh di atas kondisi nasional yang mencapai 6,50 persen pada tahun yang sama. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian (Perkembangan Ekonomi Makro Regional, 2011).

Gambar 3.2. Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS Jawa Timur, 2010, 2011

Beberapa fenomena ekonomi lainnya yang ditengarai menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, seperti membaiknya ekonomi global (ditandai dengan cukup tingginya kenaikan ekspor-impor Jawa Timur) dan tingginya pertumbuhan sektor 'non tradeable goods' Jawa Timur. Di samping itu, beberapa kebijakan fiskal dan moneter, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi telah mendorong kinerja perekonomian Jawa Timur sehingga mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,12 persen pada tahun 2011

*Tabel 3.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan
Periode 2001-2011 (%)*

<i>Tahun</i>	<i>Pertumbuhan ekonomi (%)</i>
2001	2,87
2002	3,25
2003	3,68
2004	4,47
2005	5,08
2006	5,39
2007	5,76
2008	6,22
2009	6.31
2010	6,89
2011	7,12

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2001-2011.

Selanjutnya pada tabel 3.4 menunjukkan , perkembangan ekonomi Jawa Timur selama periode tahun 2010 - 2011 (y-to-y) yaitu meningkat sebesar 0,23 persen. Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan sektor jasa (lihat gambar 3.2). Kondisi struktur perekonomian Jawa Timur pada tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan 2010, hingga triwulan IV 2011 masih didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 30 persen, diikuti sektor industri pengolahan 27,13 persen dan sektor pertanian 15,39 persen.

Pada tingkat kabupaten, sektor pertanian, terutama tanaman pangan dan hortikultura merupakan subsektor yang berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di

kabupaten Lamongan (42,57%). Setelah sektor pertanian, struktur perekonomian kabupaten Lamongan juga disumbang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 33,48 persen (BPS Kabupaten Lamongan 2012). Secara umum, perekonomian kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2011. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Lamongan dari tahun 2009 sampai dengan 2011, dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Lamongan berdasar Lapangan Usaha Tahun 2009-2011

<i>Lapangan Usaha</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
1. Pertanian	4,82	4,63	2,36
a. Tanaman bahan makanan	2,91	2,56	-3,22
b. Tanaman perkebunan	6,50	2,18	8,22
c. Peternakan dan hasilnya	3,98	7,89	8,56
d. Kehutanan	-57,00	-34,16	0,26
e. Perikanan	8,90	8,52	11,36
2. Pertambangan dan Penggalian	0,91	1,48	10,73
3. Industri Pengolahan	7,13	7,63	12,04
4. Listrik, gas, air bersih	6,41	5,80	8,01
5. Bangunan/konstruksi	3,28	3,50	9,10
6. Perdagangan, hotel, restoran	9,43	9,85	12,90
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,75	6,83	7,15
8. Keuangan, persewaan, jasa perusahaan	10,73	12,23	12,32
9. Jasa-jasa	4,92	10,45	10,39
PDRB Lamongan	6,31	6,89	7,02

Sumber : BPS kabupaten Lamongan, 2012

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Lamongan sektor pertanian pada tahun 2011 mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi ironis karena kabupaten Lamongan merupakan salah satu lumbung padi di pulau Jawa. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian memang tergantung dari beberapa faktor, yaitu teknis, sosial dan ekonomi. Faktor teknis meliputi kualitas dan luas lahan, ketersediaan air, potensi produksi, dan umur tanaman. Selain itu, tingkat kesesuaian terhadap iklim, termasuk di dalamnya variabilitas perubahan iklim juga merupakan faktor teknis yang berpengaruh terhadap hasil produksi.

Di beberapa daerah di Indonesia mulai tahun 2008 perubahan iklim sudah dirasakan. Selanjutnya, sampai tahun 2011 perubahan iklim semakin ekstrem dirasakan di beberapa daerah yang ditandai dengan kemarau panjang atau hujan berkepanjangan sehingga merusak daerah pertanian dan perikanan tambak. Meskipun demikian belum semua daerah secara proaktif melakukan kegiatan pencegahan maupun adaptasi atas perubahan iklim. Menurut informasi dari seorang narasumber (Bappeda provinsi Jawa Timur (?), sejauh ini belum ada program/kebijakan khusus dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengantisipasi gejala perubahan iklim, karena fenomena tersebut dianggap belum berpengaruh secara ekstrim terhadap hasil produksi pertanian.. Selama ini jenis kegiatan yang dilakukan masih tetap seperti biasa, yaitu merujuk pada kondisi iklim normal. Upaya yang dilakukan lebih difokuskan untuk meningkatkan hasil produksi di daerah-daerah pertanian yang pengairannya kurang, dengan program-program seperti membuat sumur, memperpanjang saluran irigasi, pembuatan resi gudang, misalnya di kabupaten Tulung Agung dan Jombang.

Upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi di kalangan masyarakat petani lokal, harus menjadi komitmen dan dilakukan saat ini juga oleh segenap pihak, baik pemerintah maupun masyarakat petani, baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Meskipun dampak dari perubahan iklim tersebut dianggap belum berpengaruh secara ekstrem terhadap hasil pertanian, namun perlu juga diberikan pemahaman yang utuh dan mudah dimengerti khususnya kepada kelompok masyarakat petani untuk proaktif melakukan upaya pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Untuk sektor perikanan, berdasar data tentang produksi perikanan sektor laut dari beberapa pelabuhan pelelangan ikan di kabupaten Lamongan, menunjukkan peningkatan produksi dalam kurun waktu tahun 2006 - 2009 (lihat tabel 3.6). Produksi pada periode 2005-2006 terjadi penurunan hasil sebesar 5,79 persen. Namun sulit untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan turunnya hasil produksi pada saat itu.

Tabel 3.6. Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan dan Nilai Produksi di Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2009

<i>Pelabuhan Pelelangan Ikan</i>	<i>Produksi (Kg)</i>	<i>Nilai Produksi (Juta Rupiah)</i>
Lohgung	3.232.512	68.749
Labuhan	2.264.292	48.156
Brondong/Blimbing	52.510.073	1.111.678
Kranji	3.711.027	78.926
Weru	2.194.034	46.622

Kab. Lamongan 2009	63.911.938	1.354.131
Tahun 2008	63.593.969	1.352.516
Tahun 2007	41.568.325,80	884.075,15
Tahun 2006	37.618.316,34	800.066,35
Tahun 2005	39.934.380,08	849.284,46

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lamongan

Kondisi perekonomian di dua daerah penelitian, yaitu di kecamatan Mantup dan Paciran, menunjukkan adanya peningkatan produksi untuk komoditas padi sejak tahun 2007. Cakupan luas daerah panen juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 4.881 ha (tahun 2007) menjadi 4.867 ha (tahun 2008) dan kemudian meningkat lagi secara signifikan pada tahun 2009 menjadi 5.234 ha sehingga dapat memproduksi padi sebanyak 32.006 ton (lihat tabel 3.7).

Tabel 3.7. Realisasi Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Padi tahun 2007-2009 (Januari-Desember) di kecamatan Mantup, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Kecamatan	Januari - Desember								
	Panen (ha)			Rerata (ku/ha)			Produksi (ton)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Mantup	4.841	4.867	5.234	63,59	63,54	61,15	30.783	30.927	32.006
Paciran	293	331	425	59,57	53,31	57,50	1.745	1.765	2.444
Lamongan	132.882	134.117	139.304	61,70	62,63	64,08	819.832	839.986	892.613

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan

Kondisi perekonomian di kecamatan Paciran didominasi oleh subsektor perikanan laut. Menurut data BPS kecamatan Paciran tahun 2009, jumlah keluarga yang menggantungkan kehidupannya

pada subsektor perikanan laut sebanyak 9.660 keluarga, sedangkan keluarga yang berusaha di subsektor tanaman pangan hanya sekitar 5.784 keluarga. Menurut data BPS kecamatan Paciran (2009), hasil penangkapan ikan laut selama satu tahun yang tercatat di TPI Kranji, adalah 568.360 kg. Retribusi yang diperoleh dari hasil penjualan ikan mencapai sebesar Rp. 144.389.906,-. Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) tahun 2010 didominasi oleh sektor perikanan dengan sumbangan sebesar 85 juta rupiah. Ada peningkatan PDRB pada tahun 2010 dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 55 juta rupiah (2009) menjadi 116 juta rupiah.

3.4. Kependudukan

3.4.1. Jumlah, Komposisi dan Distribusi Penduduk

Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang diperlukan dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi hasil pembangunan. Beberapa aspek kependudukan yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan antara lain mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2011, jumlah penduduk kabupaten Lamongan 1.185.692 jiwa, terdiri dari 576.513 jiwa laki-laki dan 609.179 jiwa perempuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada penurunan jumlah penduduk kabupaten Lamongan sebesar -1 persen. Selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2007, rasio penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang relatif seimbang dibanding dengan penduduk perempuan, yaitu 99,88 (2007), 99,90 (2008), 99,99 (2009), 100,05 (2010), dan 97,08 (2011).

Komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui struktur penduduk dan mengukur tingkat beban ketergantungan/tanggungan. Komposisi penduduk kabupaten Lamongan menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang termasuk usia produktif (berusia 15-64 tahun) hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kelompok penduduk yang tergolong pada umur tidak produktif. Data BPS kabupaten Lamongan (2011) menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 24,82 persen, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 64,71 persen, dan yang berusia tua (> 65 tahun) sebesar 10,47 persen. Jumlah penduduk produktif yang relatif besar ini merupakan modal untuk pembangunan daerah di segala bidang. Dengan komposisi penduduk demikian maka Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) penduduk kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sebesar 54,53.

Selain ditentukan oleh penambahan penduduk secara alami (kelahiran dan kematian), pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh migrasi masuk atau keluar wilayah. Pertumbuhan penduduk kabupaten Lamongan lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan penduduk Indonesia dalam dekade 2000-2010, yaitu sebesar 1,49 persen per tahun⁶. Selama periode 2000-2010, pertumbuhan penduduk kabupaten Lamongan per tahun mencapai -0,02 persen (BPS Kabupaten Lamongan 2011).

Rendahnya laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan tingkat kelahiran lebih cepat daripada penurunan tingkat kematian.

6 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=2

Selain pertumbuhan alami, faktor perpindahan penduduk juga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Melihat data tren kelahiran di kabupaten Lamongan, tampak ada penurunan angka kelahiran kasar. Dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, angka kelahiran kasar kabupaten Lamongan pada tahun 2011 adalah terendah, yaitu mencapai 1 (1,808 kelahiran), sedangkan angka kelahiran pada tahun 2008, 2009, dan 2010 berturut-turut adalah 3 (4,503 kelahiran), 9 (13,905 kelahiran), dan 7 (10490 kelahiran).

Sementara itu, angka kematian kasar di kabupaten Lamongan menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2008-2011. Data Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan menunjukkan angka kematian kasar menurun secara drastis pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2008, angka kematian kasar sebesar 9 atau 13,098 kematian, dan turun menjadi 4 atau 5,463 kematian pada tahun 2010, hingga mencapai titik terendah menjadi 1 atau 5,463 kematian. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya perkembangan angka kematian kasar dalam kurun waktu tahun 2008-2011 mengalami penurunan yang cukup besar. Penurunan angka kematian kasar menunjukkan kualitas hidup penduduk di kabupaten Lamongan semakin baik

Indikator yang lebih sensitif untuk menggambarkan situasi kematian adalah angka kematian bayi (AKB). Selama beberapa tahun terakhir, AKB di kabupaten Lamongan menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Penurunan tingkat AKB tersebut dapat memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) di provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar 26,9 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan di kabupaten Lamongan pada tahun

2007 sebesar 36,62 per 1000 kelahiran hidup. AKB Lamongan ini sudah di bawah angka nasional yang mencapai 40 per 1000 kelahiran hidup. Berbagai faktor ditengarai mempengaruhi penurunan tingkat AKB, di antaranya adalah akses penduduk terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan yang semakin besar, tersedianya tenaga medis yang semakin terampil, dan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran penduduk akan pentingnya perilaku hidup sehat.

Seperti dikemukakan sebelumnya, penambahan penduduk di suatu daerah juga dipengaruhi oleh migrasi. Data yang bersumber dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Lamongan, menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah migran masuk ke Lamongan selama kurun waktu 2005-2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009-2011. Pada tahun 2005, jumlah migran masuk ke kabupaten Lamongan adalah 47.468 jiwa. Pada tahun 2008 naik menjadi 52.280 jiwa. Peningkatan arus migrasi masuk mencapai puncaknya pada tahun 2009 yaitu sebesar 56.073 jiwa dan menurun drastis lebih dari separuhnya pada tahun 2010 menjadi 22.658 jiwa dan 1.020 jiwa pada tahun 2011 (Lamongan Dalam Angka, 2012). Sementara itu, migran keluar juga terus mengalami penurunan pada kurun waktu 2007-2011. Data catatan sipil setempat menyebutkan arus migrasi masuk pada tahun 2007 mencapai 46.750 jiwa dan terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2008 hingga sekarang. Penurunan drastis arus migrasi keluar terjadi pada kurun waktu 2009/2010. Pada tahun 2009, arus migrasi masuk mencapai 17.897 jiwa kemudian menurun menjadi 5.780 jiwa pada tahun 2010 dan 1.152 jiwa pada tahun 2011. Tidak ada keterangan yang dapat secara pasti menjelaskan mengapa dalam kurun waktu tertentu terjadi penurunan arus migrasi keluar secara drastis dari Lamongan. Namun, kemungkinan hal ini bisa saja dipengaruhi

oleh faktor kesempatan kerja yang tersedia di Lamongan yang kemudian menyerap tenaga kerja dari sekitar kabupaten itu sendiri. Merebaknya usaha perikanan tambak di sekitar Lamongan bagian Utara, adalah salah satu lapangan pekerjaan yang kemungkinan menyerap banyak tenaga kerja dari sekitar Lamongan pada saat itu. Sehingga para buruh atau tenaga kerja yang biasa bermigrasi keluar, dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia di daerahnya. .

Tingkat kepadatan penduduk kabupaten Lamongan pada tahun 2008 mencapai 794 jiwa/km², kepadatan tertinggi di kecamatan Paciran yaitu 1.998 jiwa/km², sedangkan terendah di kecamatan Sambeng (261 jiwa/km²). Tingginya tingkat kepadatan di kecamatan Paciran dipengaruhi oleh luas wilayah kecamatan ini yang hanya 47,89 km², sementara jumlah penduduknya relatif besar. Di samping itu, kecamatan Paciran termasuk kawasan industri dan wisata, sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk bekerja di sektor industri atau melakukan kegiatan perdagangan di kawasan wisata..

Kondisi kependudukan di daerah penelitian berdasarkan hasil pendataan BPS tahun 2011 menunjukkan, jumlah penduduk di kecamatan Mantup sebesar 2.963 jiwa, terdiri dari 21.177 laki-laki dan 21.786 perempuan. Penduduk tersebut tersebar di 15 desa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 7.911 jiwa per km². Adapun di desa Mantup, yang menjadi lokasi penelitian, jumlah penduduknya pada tahun 2010 mencapai 6.187 jiwa, meliputi perempuan (3.238 jiwa) lebih besar daripada laki-laki (2.939 jiwa). Tingkat kepadatan penduduk di desa Mantup adalah 406 jiwa per km² dan rata-rata jumlah anggota per rumah tangga adalah 4 orang (Registrasi Penduduk Kecamatan Mantup, 2011).

Perkembangan jumlah penduduk per desa di kecamatan Mantup menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar dari tahun 2006 ke 2007, yaitu dari 22.307 jiwa menjadi 43.969 jiwa. Namun pada tahun 2010, jumlah penduduk di kecamatan tersebut turun menjadi 42.863 jiwa. Fenomena yang sama juga terlihat di Desa Mantup, yaitu terlihat peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2006 (3.391 jiwa) ke tahun 2007 (6.464 jiwa), namun di tahun 2011 berikutnya terjadi penurunan jumlah penduduk menjadi 6.187 jiwa (lihat tabel 3.8). Ada dua kemungkinan yang menyebabkan adanya kecenderungan penurunan jumlah penduduk di desa Mantup tersebut, yaitu penurunan tingkat fertilitas dan adanya peningkatan tingkat migrasi ke luar daerah untuk mencari kerja atau untuk melanjutkan pendidikan. Informasi dari diskusi kelompok dengan beberapa ibu di desa tersebut diketahui bahwa penurunan jumlah kelahiran antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan usia kawin dan keberhasilan program KB. Kecenderungan penurunan kelahiran yang diindikasikan oleh semakin sedikitnya jumlah anak pada rumah tangga pasangan muda antara lain karena pertimbangan biaya pendidikan yang semakin mahal dan tuntutan ekonomi lainnya yang semakin meningkat. Rata-rata keluarga muda tersebut hanya mempunyai jumlah anak dua orang. Dari faktor keberhasilan program KB, antara lain dipengaruhi oleh semakin mudahnya pasangan usia subur (PUS) mendapatkan alat kontrasepsi, di samping meningkatnya kesadaran PUS berkaitan dengan nilai keluarga kecil.

Tabel 3.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Per desa kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2006-2010

<i>Desa</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2010</i>
Sumber Dadi	1.863	3.709	3.909	3.944
Keduk Bembem	924	1.756	1.783	1.736
Kedung Soko	1.443	3.076	3.187	2.957
Sido Mulyo	964	1.920	1.940	1.727
Sukosari	1.112	2.340	2.332	2.383
Mojosari	1.286	2.406	2.534	2.391
Rumpuk	911	1.807	1.850	1.719
Pelabuhan Rejo	1.327	2.639	2.644	2.326
Sumber Kerep	1.203	2.399	2.237	2.386
Sumber Agung	892	1.613	1.750	1.708
Mantup	3.391	6.464	6.127	6.187
Tugu	996	1.990	2.003	1.809
Sumber Bendo	830	1.661	1.708	1.656
Tunggu Jager	2.294	4.516	4.528	4.413
Suko Bendo	2.889	5.673	5.025	5.539
Kecamatan Mantup	22.307	43.969	43.557	42.883

Sumber: Kecamatan Mantup dalam Angka 2009, 2011.

Tabel 3.9 memperlihatkan jumlah penduduk di kecamatan Paciran tahun 2010 adalah 78.791 jiwa yang terdiri dari 38.121 penduduk laki-laki dan 40.670 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk di kecamatan ini 93,7. Penduduk tersebut tersebar di 17 desa yang termasuk dalam kecamatan Paciran dengan tingkat kepadatan 1.285 jiwa per km². Rata-rata anggota keluarga untuk tingkat kecamatan adalah 3,68. Sementara itu, pertumbuhan penduduk kecamatan Paciran sebesar 0,512 persen.

Desa Weru yang menjadi lokasi penelitian memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.093 jiwa dengan rasio jenis kelamin 83,4. Artinya, penduduk laki-laki jumlahnya lebih sedikit daripada penduduk perempuan. Desa seluas 0,114 km², maka kepadatan penduduk desa Weru adalah 44.519 jiwa per km² dan rata-rata ART sebesar 4,9 pada tahun 2010. Selama lima tahun terakhir, kepadatan penduduk di desa Weru menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini mengindikasikan jumlah penduduk di desa tersebut bertambah. Berdasarkan data BPS Pada tahun 2010, jumlah penduduk yang masuk ke desa Weru sebanyak 24 jiwa, sementara penduduk yang keluar sekitar 20 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk desa Weru dalam kurun waktu 2009-2010 adalah sebesar 0,89 persen. Dibanding dengan desa-desa lainnya yang termasuk dalam wilayah kecamatan Paciran, laju pertumbuhan penduduk desa Weru termasuk tinggi (lihat tabel 3.9).

Tabel 3.9. Distribusi Penduduk kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Periode 2007-2010

<i>Desa</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>				
	2005	2006	2007	2008	2010
Blimbing	15.073	15.160	15.258	15.345	15.485
Kandangsemangkon	5.210	5.214	5.210	5.214	5.273
Paciran	14.037	14.268	14.560	14.791	15.148
Sumurgayam	2.609	2.609	2.610	2.610	2.610
Sendangagung	5.590	5.593	5.633	5.636	5.663
Sendangduwur	1.640	1.603	1.627	1.626	1.625
Tunggul	3.761	3.760	3.767	3.766	3.896
Kranji	5.746	5.745	5.776	5.775	5.774
Drajat	1.274	1.261	1.258	1.245	1.232
Banjarwati	4.552	4.591	4.622	4.661	4.700
Kemantren	3.965	3.965	3.960	3.960	3.987
Sidokelar	1.697	1.705	1.713	1.721	1.729
Tlogosadang	1.335	1.333	1.327	1.325	1.323
Paloh	1.328	1.328	1.331	1.331	1.331
Weru	4.935	4.976	5.011	5.052	5.093
Sidokumpul	2.244	2.244	2.241	2.241	2.241
Warulor	1.675	1.677	1.677	1.679	1.681
Jumlah	76.635	77.032	77.581	77.978	78.791

Sumber: Kecamatan Paciran dalam Angka 2009, 2011

Melihat data komposisi penduduk kecamatan Paciran, terlihat bahwa sebagian besar penduduk mengelompok pada usia produktif yaitu 15-64 (74 persen). Kelompok usia produktif ini merupakan asset/modal pembangunan apabila mereka dapat terserap dan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan.

Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap kelompok usia produktif tersebut. Dengan komposisi penduduk yang mayoritas merupakan kelompok usia produktif, maka angka beban ketergantungan di kecamatan Paciran sudah cukup rendah, yaitu sebesar 42,16 persen yang artinya 1-2 orang usia produktif hanya menanggung beban satu orang usia tidak produktif.

Selanjutnya, apabila komposisi penduduk dilihat dari jenis kelaminnya, maka jumlah penduduk perempuan mendominasi setiap kelompok usia, baik pada kelompok 0-14, 15-64 maupun 65 tahun ke atas. Perbandingan laki-laki dan perempuan tersebut juga ditunjukkan oleh angka rasio jenis kelamin untuk kecamatan Paciran sebesar 93,5.

3.4.2. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di kabupaten Lamongan secara makro digambarkan dari dominasi oleh sektor pertanian. Sebesar 52 persen penduduk di kabupaten ini terserap di sektor tersebut⁷. Petani di Lamongan tersebut tidak hanya mengusahakan tanaman padi, tetapi juga banyak yang bekerja sebagai petani tambak, khususnya yang tinggal di wilayah Lamongan bagian utara. Menurut informasi dari Penelitian dan Pengembangan kabupaten Lamongan, selain sektor pertanian, sektor jasa dan pariwisata juga telah mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja di kabupaten Lamongan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terlihat

7 Diantara mereka yang bekerja di sektor pertanian, sebanyak 62,16 % tergolong penduduk miskin (BPS, 2008).

peningkatan PAD dari sekitar 6 milyar rupiah menjadi 110 milyar rupiah. Peningkatan PAD yang cukup signifikan tersebut, antara lain karena sumbangan sektor pariwisata. Sebagai gambaran, kegiatan Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang terletak di kecamatan Paciran mampu 'memasok' PAD Lamongan sebesar 10 milyar setiap tahunnya .

Penduduk Lamongan juga dikenal mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi sehingga banyak di antara mereka yang menjadi pengusaha di bidang perikanan darat dan laut. Menurut informasi dari Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dinas Pertanian kabupaten Lamongan, kegiatan usaha perikanan darat dan laut telah memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap perekonomian kabupaten Lamongan. Ungkapan seorang narasumber dari instansi tersebut menggambarkan pentingnya usaha tambak dalam menyerap tenaga kerja di kabupaten Lamongan, yaitu sebagai berikut.

“... penghasilan dari ikan tawar.. ikan tambak.. kalau tidak salah luasnya itu untuk kabupaten Lamongan mencapai 700 Ha, jadi posisi bagian tengah Lamongan sampai dengan Bengawan Solo, itu hampir semuanya tambak yang menghasilkan ikan panama, ikan bandeng, ya ikan-ikan yang lain juga, apa ikan mujair, ikan nila, ikan tombro..ikan mas itu.. ini dari perikanan darat, demikian juga dari perikanan laut... ini yang membuat penduduk Lamongan berwirausaha...”

Selain berwirausaha, penduduk Lamongan juga dikenal sebagai pedagang 'kaki lima'. Sebagian dari mereka mencari nafkah keluar daerah di sekitar kabupaten Lamongan, seperti ke Gresik,

Bojonegoro, Tuban, dan Kediri. Pada umumnya setelah selesai musim tanam di daerahnya, petani pergi ke daerah lain untuk berjualan makanan (sebagai pedagang kaki lima), seperti tahu tek, tahu campur, bebek goreng. Diperkirakan sekitar 60 persen petani termasuk petani tambak melakukan migrasi secara temporer dan berjualan makanan. Sementara penduduk di daerah Utara Lamongan, seperti di desa Solokuro, Paciran, Kali Tengah, banyak yang bekerja ke luar negeri sebagai TKI.

Melihat kondisi ketenagakerjaan di lokasi penelitian, banyak penduduk desa Mantup yang terserap di sektor pertanian, sedangkan sebagian besar penduduk di desa Weru bekerja di subsektor perikanan tangkap. Jumlah penduduk desa Mantup yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 1.306 orang sedangkan yang bekerja di sektor perdagangan maupun industri kurang lebih hanya sekitar 200 orang saja. Data lainnya yang dapat diketahui terkait dengan kondisi ketenagakerjaan adalah jumlah angkatan kerja berusia 15-55 tahun sekitar 1.560 orang, sementara yang belum bekerja sekitar 203 orang. Berbeda halnya dengan kondisi ketenagakerjaan di Desa Weru, mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan (1.814 orang), hanya sebagian kecil saja penduduknya yang bekerja di sektor jasa/perdagangan atau industri. Adapun jumlah angkatan kerja yang berusia 15-55 tahun berjumlah 352 orang sementara yang belum bekerja terdata lebih dari separuhnya yaitu sekitar 189 orang (Kecamatan Mantup dalam Angka, 2009, 2011).

3.5. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sebesar 17,41 persen. Angka ini jauh

lebih rendah apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2008 yang sebesar 22,51 persen (BPS, 2011). Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut antara lain disebabkan oleh diimplementasikannya berbagai program pengentasan kemiskinan serta adanya peningkatan kegiatan ekonomi Jawa Timur secara umum (Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Perencanaan Pembangunan 2010). Salah satu program kemiskinan yang diaplikasikan adalah Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program atau APP) tahun 2010 yang memiliki konsep dasar pemberdayaan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin. Program ini difasilitasi pendampingan dan mitra usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (pasar). Bantuan sarana dan prasarana produksi yang bersifat hibah diberikan kepada pokmas untuk selanjutnya disalurkan ke para anggota yang bersifat pinjaman. Pokmas dapat menjual hasil produksinya ke mitra usaha. Sasaran dari program APP adalah kelompok masyarakat miskin berdasarkan data dari Pendataan Program Perlindungan (PPLS) 088. Sumber pendanaan APP tahun 2010 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan APBD tingkat kabupaten/kota yang menjadi lokasi pelaksanaan program. Alokasi dana APBD provinsi lebih bersifat stimulan sehingga kelanjutan dan pengembangan pelaksanaan program sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokasi program (Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Perencanaan Pembangunan 2010).

8 Menurut hasil pendataan PPLS 08, jumlah penduduk miskin di kabupaten Lamongan adalah 84.694 orang yang terdiri dari kriteria: sangat miskin : 15.669 jiwa, miskin : 13.193 jiwa, dan hampir miskin: 29.832 jiwa.

Lebih lanjut, kondisi kemiskinan kabupaten Lamongan yang diukur dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2011 dibandingkan dengan tingkat provinsi Jawa Timur, menunjukkan nilai indeks di Lamongan sedikit lebih tinggi daripada tingkat provinsi, yaitu 2,07 berbanding dengan 2,00. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh pengeluaran rata-rata penduduk dari garis kemiskinan. Sementara diukur dari indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa antara kabupaten Lamongan dengan provinsi Jawa Timur, nilainya hampir sama yaitu 0,45 (Lamongan) berbanding dengan 0,46 (Jawa Timur). Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menurut seorang narasumber di kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, kabupaten ini dikenal sebagai daerah paling miskin kedua di provinsi Jawa Timur setelah kabupaten Pacitan. Dua kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama, keduanya berada di daerah pesisir yang salah satu sisinya diapit oleh gunung kapur yang tandus. Jenis tanah tidak subur untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dengan demikian, kondisi dan karakteristik geografis telah menjadikan daerah Lamongan terperangkap ke dalam kemiskinan yang akut, terutama Kabupaten Lamongan bagian selatan yang mencakup 11 kecamatan. Pada tahun 1970-an sampai pertengahan tahun 1990-an *paceklik* masih sering melanda daerah ini. Kondisi tanah yang sangat tandus serta curah hujan yang relatif sedikit menyebabkan hasil pertanian sangat terbatas, jumlah maupun jenisnya. Jumlah hari hujan pada tahun 2011 untuk Lamongan hanya 96 hari, jauh lebih rendah bila dibanding dengan Pacitan yang mencapai 149 hari atau Sumenep yang mencapai 162 hari per tahun (Jawa Timur Dalam

Angka, 2012). Sementara itu, wilayah Lamongan bagian selatan yang sangat minim dengan sumber air, jumlah hujan yang sangat sedikit merupakan kendala bagi wilayah ini. Namun, pada beberapa tahun terakhir, curah hujan sangat tinggi sehingga mempengaruhi produksi pertanian yang berdampak pada kehidupan petani yang menjadi semakin sulit⁹.

Tabel 3.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2006-2011

Tahun	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin	P1	P2	Garis kemiskinan (Rp/Kap/bln)
2006	304,2	25,74	4,16	1,04	172.062
2007	297,6	25,79	4,17	1,02	176.738
2008	259,7	22,51	4,68	1,12	177.008
2009	259,7	22,51	4,68	1,12	177.003
2011	206,7	17,41	2,07	0,45	242.441

Sumber: BPS 2012

Kondisi kemiskinan daerah menimbulkan situasi yang dilematis bagi penduduk, karena apabila penduduk tetap bertahan tinggal di daerahnya, sulit bagi mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menopang kehidupan ekonomi, sebagian penduduk Lamongan mencari penghidupan di luar daerah, walaupun harus bekerja pada pekerjaan-pekerjaan

9 <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=7>

di sektor informal yang penghasilannya tidak besar akibat keterbatasan ketrampilan/ pendidikan yang mereka miliki. Daerah tujuan migran asal Lamongan tidak hanya terbatas pada kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga ke luar negeri, antara lain ke Malaysia. Sebagai gambaran, pada tahun 2003, jumlah penduduk kabupaten Lamongan yang bekerja ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 551 orang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga (bagi perempuan) atau sebagai pekerja bangunan (bagi laki-laki)¹⁰.

10 <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=7>

BAB IV

STRUKTUR ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN KETAHANAN EKONOMI RUMAH TANGGA

Seperti telah dibahas pada bab I, ketahanan ekonomi rumah tangga dihitung dari variabel pengeluaran dan tabungan. Ketahanan ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah komposisi anggota rumah tangga, khususnya dari segi umur dan kegiatan (ekonomi) anggota rumah tangga usia produktif. Secara spesifik, anggota rumah tangga usia produktif yang berkontribusi positif terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga adalah mereka yang bekerja karena pendapatan yang mereka peroleh kemudian digunakan rumah tangga untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggota rumah tangga. Semakin

banyak jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, maka semakin baik pula ketahanan ekonomi rumah tangga, yang dalam penelitian ini dilihat dari pengeluaran (pangan dan non pangan) serta pemilikan tabungan rumah tangga.

Adioetomo, dkk. (2005) mengemukakan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif berpengaruh positif terhadap tabungan rumah tangga. Semakin banyak jumlah ART usia produktif, makin banyak pula yang menghasilkan pendapatan, yang selanjutnya memungkinkan rumah tangga menyimpan sebagian diantaranya dalam berbagai bentuk, baik uang maupun aset-aset produktif lainnya. Namun, kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika disertai dengan upaya-upaya lain, terutama investasi di bidang ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.

Bagian ini membahas keterkaitan antara struktur penduduk, yang diwakili oleh anggota rumah tangga sampel dengan kondisi ketahanan rumah tangga. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, pembahasan mencakup komposisi anggota rumah tangga berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, secara khusus dibahas perbandingan/komposisi anggota rumah tangga berdasarkan usia produktif dan non produktif serta kegiatan ekonomi anggota rumah tangga berusia produktif yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Pembahasan mengenai tingkat pendidikan, khususnya di antara anggota rumah tangga berusia produktif dilakukan berdasarkan asumsi bahwa tingkat pendidikan yang tinggi membuka kesempatan bagi penduduk, termasuk anggota rumah tangga responden, untuk memperoleh pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih tinggi pula. Penghasilan yang lebih tinggi memungkinkan rumah tangga untuk mempunyai

ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, dengan pendapatan yang rendah, meskipun jumlah anggota rumah tangga yang bekerja lebih banyak, maka ketahanan ekonomi rumah tangga sulit untuk dicapai.

Bahasan pada bagian ini dilakukan secara terpisah antara kedua desa yang menjadi lokasi penelitian. Pemisahan ini terutama karena dua lokasi mempunyai tipologi dan kondisi wilayah yang berbeda, di samping juga untuk memahami aspek yang dikaji dengan lebih detail.

4.1. Komposisi Anggota Rumah Tangga dan Faktor Pengaruh

4.1.1. Komposisi Anggota Rumah Tangga Masyarakat Pertanian

Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 menyajikan data tentang komposisi anggota rumah tangga sampel berdasarkan umur dan jenis kelamin. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas anggota rumah tangga (78 persen) adalah mereka yang berada dalam kelompok usia produktif. Penduduk berusia non produktif kurang dari seperlima seluruh anggota rumah tangga, yang terdiri dari 18 persen (anak-anak berumur kurang dari 15 tahun) dan 4 persen penduduk lanjut usia. Jika mengacu pada asumsi bahwa banyaknya penduduk usia produktif berdampak positif terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga sampel penelitian ini potensial untuk mencapai kondisi yang relatif baik. Namun, data ini perlu dianalisa lebih dalam, misalnya dengan mengkaji kegiatan ekonomi anggota rumah tangga usia produktif tersebut.

Tabel 4.1. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga menurut Umur dan Jenis Kelamin, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010 (Persen)

Kelompok umur	Jenis kelamin		Jumlah (N)
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 14	19,2	16,9	18,0
15 – 24	14,6	17,6	16,1
25 – 49	47,2	47,2	47,2
50 – 64	15,3	14,6	15,0
65 +	3,5	3,7	3,6
Jumlah	100,0	100,0	100,0
(N)	(286)	(267)	(553)

Sumber : Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecilnya proporsi anggota rumah tangga berusia muda (0-14 tahun) adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah Desa Mantup (bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur) memberikan layanan kontrasepsi gratis berupa operasi tubektomi kepada masyarakat sekali dalam setiap tahun atau 6 bulan. Kegiatan ini memberikan akses kepada masyarakat untuk menjadi peserta program KB tanpa harus mengeluarkan biaya pelayanan. Selain memanfaatkan pelayanan gratis dari pemerintah, masyarakat di lokasi penelitian pada umumnya juga menjadi peserta KB mandiri. Wawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan di lokasi penelitian mendapatkan bahwa penggunaan alat

kontrasepsi sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehingga tanpa pelayanan gratis dari pemerintah sekalipun, mereka berinisiatif mencarinya. Sejak era otonomi daerah, khususnya setelah desentralisasi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) pada tahun 2004, akses masyarakat untuk memperoleh layanan KB secara gratis makin terbatas, namun minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut tidak berkurang. Kutipan berikut ini adalah pernyataan dua orang narasumber mengenai besarnya keinginan masyarakat di lokasi penelitian untuk berpartisipasi dalam program KB.

“... Pasangan usia muda rata-rata ikut KB, jumlah anak rata-rata 3 orang, malah banyak yang punya anak cuma 1 atau 2 orang. Dulu waktu KB gratis orang ragu-ragu untuk ikut. Sekarang sudah tahu sendiri fungsinya, dengan sadar ikut KB” (*wawancara dengan Bapak Ng, salah seorang kepala dusun*).

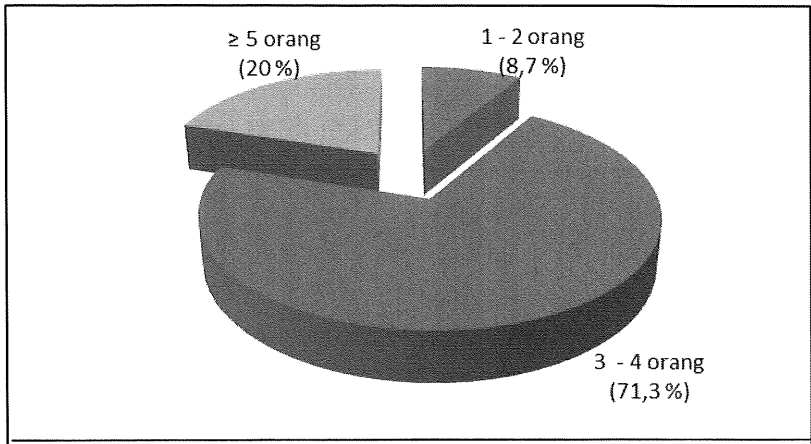
“... Kalau saya anak itu jangan banyak-banyak, soalnya nggak bisa nyekolahkan tinggi. Di sini rata-rata punya anak 2 orang. *Nek* dulu ya banyak bu. Mak saya 7 anaknya. KB sekarang bayar sendiri. Tidak berkeberatan mbayar, karena penting. Kalau tidak ikut KB tiap tahun punya anak” (*pernyataan salah seorang ibu peserta FGD di dusun Panjeran, desa Mantup*).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proporsi anggota rumah tangga laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Hanya pada kelompok usia 15- 24 tahun persentase penduduk laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena lebih banyak penduduk laki-laki dalam kelompok umur ini yang meninggalkan daerah asal untuk mencari pekerjaan daripada

perempuan, meskipun tidak dalam jumlah besar. Sebagian dari mereka pergi ke Surabaya untuk bekerja di pabrik-pabrik yang terdapat di kota tersebut. Sebagian lainnya bahkan meninggalkan daerah asal untuk bekerja di daerah-daerah yang lebih jauh seperti di pulau Kalimantan. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang ibu yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, *"...anak saya yang besar pergi merantau ke Kalimantan ikut tetangga, ndak tau entar kerja apa di sana"*.

Keberhasilan program KB berdampak pada jumlah anggota rumah tangga sampel penelitian ini yang relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen rumah tangga sampel mempunyai anggota paling banyak 3 - 4 orang (gambar 4.1). Kelompok ini kemungkinan besar adalah rumah tangga yang hanya memiliki 2 orang dan atau bahkan 1 orang anak. Nilai keluarga kecil yang ditanamkan melalui program Keluarga Berencana (KB) sudah diterima dalam masyarakat. Hal ini tergambar dari wawancara dengan para narasumber dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh seorang informan dengan dua orang anak berikut, *"... kalau punya anak banyak kan repot. Sekarang apa-apa mahal, biaya sekolah mahal. Anak banyak nanti ndak sanggup menyekolahkan"*. Pandangan ini kemudian mendorong masyarakat, khususnya pasangan usia reproduksi untuk berpartisipasi memakai alat kontrasepsi.

Gambar 4.1. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah ART, desa Mantup, kecamatan Mantup kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



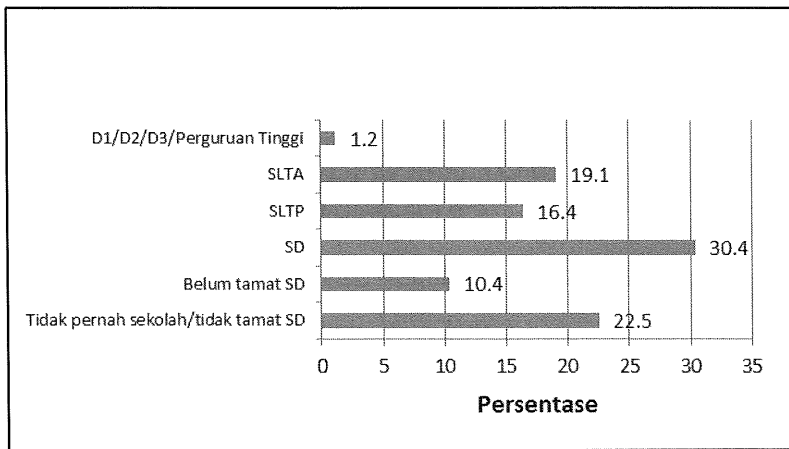
Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Pendidikan

Anggota rumah tangga sampel dalam penelitian ini tergolong pada kelompok berpendidikan rendah. Hal ini terlihat dari data pada gambar 4.2. yang menunjukkan bahwa hampir dua per tiga dari mereka hanya berpendidikan SD atau kurang. Kelompok ini terdiri dari 12 persen penduduk berusia sangat muda yang memang belum sekolah dan belum tamat SD (0 – 4 tahun dan 5 – 9 tahun) serta penduduk lanjut usia yang memang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Sisanya, kemungkinan penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menamatkan sekolah dasar, termasuk mereka

yang tamat SD sebelum pemerintah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Dengan demikian, tidak ada “dorongan” untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Gambar 4.2. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Pada saat ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah makin meningkat. Mereka menyekolahkan anak-anak sampai ke tingkat SLTA, dan bagi mereka yang mampu secara ekonomi bahkan membiayai pendidikan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Salah seorang kepala dusun yang diwawancarai dalam penelitian ini mengemukakan bahwa anak-anak muda pada umumnya berpendidikan setingkat SLTA, terutama sejak

didirikannya SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di sekitar desa Mantup. Di samping karena kesadaran yang semakin tinggi tentang pentingnya pendidikan, banyaknya anak yang melanjutkan sekolah sampai ke tingkat SLTA ini juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar tempat tinggal. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang perangkat desa sebagai berikut,

“... Anak-anak sekarang pada sekolah semua, jarang ada anak yang ndak sekolah. Kalau sudah lulus SD terus lanjut SMP, lulus SMP lanjut ke SMA. Ada rasa malu bagi orang tua kalau punya anak yang sudah lulus SMP tidak (melanjutkan) sekolah. Makanya orang tua berusaha biar anaknya tetap sekolah”.

Sikap para orang tua di atas mempunyai nilai positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di lokasi penelitian. Meskipun pada awalnya dipicu oleh “persaingan di antara sesama tetangga”, menyekolahkan anak-anak sampai ke tingkat pendidikan tinggi sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Pendidikan tinggi yang dimiliki oleh penduduk desa selanjutnya berimplikasi positif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ketahanan ekonomi rumah tangga yang baik. Hal ini karena pendidikan tinggi memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang dapat menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan hidup.

Pekerjaan

Mayoritas anggota rumah tangga yang berusia di atas 15 tahun adalah mereka yang bekerja, seperti terlihat dari data pada

gambar 4.3. Aktivitas ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kenyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lokasi penelitian berikut.

“... Orang sini semua bekerja, ndak ada yang nganggur. Ibu-ibu juga bekerja, apa saja dikerjakan, ya di sawah, cari kayu atau cari apa-apa yang bisa dijual. Mana ada yang bisa nganggur, kalau nganggur ya ndak bisa makan” (*wawancara dengan seorang ibu berusia pertengahan 40-an*).

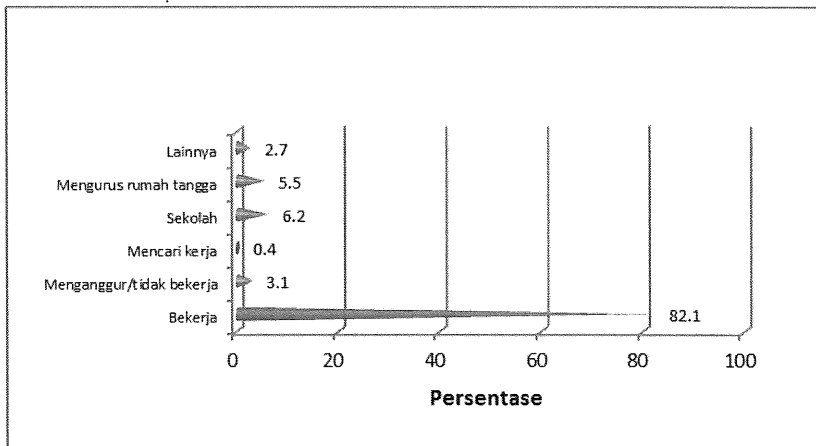
“... Perempuan tidak ada yang nganggur, mereka kerja di sawah, pelihara ternak. Ada yang jadi buruh cuci, ikut kerja batu sama suami. Suami cari batu, istrinya yang mecah sampai kecil-kecil untuk bahan bangunan” (*wawancara dengan Bp. S, salah seorang kepala dusun*).

Sebagian penduduk tidak hanya melakukan satu pekerjaan. Mereka melakukan banyak pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penduduk laki-laki, misalnya, selain bekerja sebagai petani, juga bekerja sebagai kuli bongkar muat pasir. Ada pula yang bekerja mencari keong untuk dijual dan diolah menjadi pakan ternak. Sementara itu, sebagian perempuan bekerja sebagai pemecah batu, di samping juga bekerja sebagai petani. Hal ini telah berlangsung sejak lama, tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini ketika masyarakat sudah mengalami dampak dari gejala perubahan iklim. Kenyataan ini merupakan kondisi yang khas di daerah perdesaan di berbagai negara berkembang. Marquette (2007) mengemukakan bahwa diversifikasi aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk perdesaan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan penghasilan, di samping juga untuk

meminimalkan risiko jika terjadi “kondisi yang buruk” yang dapat mengganggu kehidupan ekonomi keluarga.

Anak-anak yang sudah tidak bersekolah juga bekerja, baik untuk membantu orang tua maupun untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Salah seorang bapak peserta FGD di dusun Mantup Tengah mengemukakan bahwa “... *anak-anak yang kerja itu kalau sayang sama orang tuanya ya ngasih, tapi yang penting sudah gak minta uang sama orang tua*”. Seperti halnya orang-orang dewasa, banyak di antara anak-anak tersebut bekerja lebih dari satu jenis pekerjaan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika salah seorang perangkat desa mengemukakan bahwa hampir tidak ada penduduk desa Mantup yang menganggur.

Gambar 4.3. Distribusi Anggota Rumah Tangga Menurut Kegiatan Utama, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

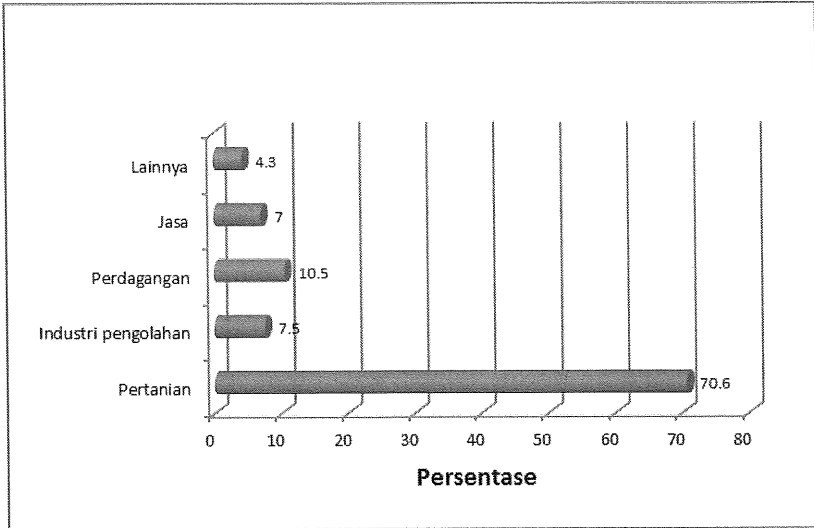
Sejalan dengan karakteristik dan tipologi wilayah yang merupakan daerah pertanian, sebagian besar penduduk yang bekerja adalah mereka yang berusaha di sektor pertanian (gambar 4.4). Kelompok ini mencakup mereka yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan (padi dan palawija), serta perkebunan (tebu). Dalam kenyataannya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, mereka yang bekerja di sektor pertanian juga mengerjakan berbagai pekerjaan lainnya di luar sektor tersebut. Hal ini dilakukan terutama pada saat cuaca tidak mendukung untuk melaksanakan kegiatan pertanian dengan baik. Pola bekerja seperti ini sudah dilakukan sejak lama, tetapi sejak masyarakat menghadapi iklim/cuaca yang berubah, utamanya diindikasikan oleh pergeseran musim hujan dan kemarau, semakin banyak penduduk yang melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian. Pernyataan salah seorang pemimpin formal desa Mantup berikut ini memperlihatkan dinamika pekerjaan penduduk, baik yang sudah terjadi sejak lama maupun beberapa waktu terakhir.

“... Kalau sudah mentok, tidak bisa lagi di pertanian, yang mau nggak mau bawa sekrop, nguli. Ada yang gali batu di pegunungan sana (galian C), batunya untuk dijual. Ini sudah lama berjalan. Justru sekarang lahan galian makin sempit. Kalau truk yang bawa pasir dari arah Mojokerto, dari Jombang ke Kediri yang lewat sini ke Lamongan, orang sini bisa kerja. ... Untuk perempuan, ya kerja buruhan nyuci, masak. Ini kerja musiman, tidak tetap. Ada juga yang ikut cari batu di kali-kali, dikumpulin dan dipecah-pecah. Ini biasanya dilakukan pada musim kemarau. Untuk orang sini baru-baru saja”.

Penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan pada umumnya adalah anak-anak muda yang bekerja di berbagai pabrik di sekitar Kabupaten Lamongan seperti di Gresik, Mojokerto dan beberapa di antaranya di Surabaya. Mereka adalah lulusan SLTA yang tinggal di rumah kontrakan/kost di kota tempat bekerja. Pada umumnya mereka tidak pindah domisili dan pulang ke desa pada hari libur. Namun, kebanyakan dari mereka beralih pekerjaan sebagai kuli (bangunan dan bongkar muat pasir) karena pabrik-pabrik tempat mereka bekerja tidak memproduksi lagi.

Penduduk yang bekerja di sektor peternakan adalah mereka yang memelihara hewan ternak milik sendiri dan membesarkan ternak kepunyaan orang lain dengan sistim bagi hasil (dikenal dengan istilah "*nggadub*"). Hewan ternak meliputi jenis besar (sapi) dan hewan kecil (kambing). Bagi sebagian penduduk ternak yang dipelihara juga dianggap sebagai tabungan yang dapat dijual sewaktu-waktu ketika ada kebutuhan mendesak.

Gambar 4.4. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

4.1.2. Komposisi anggota rumah tangga masyarakat pesisir

Umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan anggota rumah tangga menurut Lindh dan Malmberg (1999) memperlihatkan bahwa anggota rumah tangga sampel didominasi oleh kelompok usia kerja utama (37 persen), diikuti oleh kelompok usia muda (26,4 persen), kelompok usia

pemuda (19 persen) dan hanya sebagian kecil kelompok usia tua (Tabel 4.2). Tingginya proporsi anggota rumah tangga kelompok usia kerja utama disebabkan oleh tingginya kasus-kasus kelahiran di masa lalu karena belum diterapkan atau belum berhasilnya program KB pada masa itu. Pengelompokan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar anggota rumah tangga sampel termasuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun), yaitu mencapai 69,4 persen sedangkan sisanya adalah usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Besarnya penduduk usia produktif tersebut mengindikasikan bahwa struktur anggota rumah tangga di desa Weru berada pada struktur penduduk transisional dari muda ke dewasa.

Tabel 4.2. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-14	56,6	43,4	100 (196)
15-24	58,4	41,6	100 (137)
25-49	46,1	53,9	100 (271)
50-64	52,0	48,0	100 (98)
65+	32,1	67,9	100 (28)
Jumlah	51,5	48,5	100 (730)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Apabila komposisi anggota rumah tangga sampel dirinci menurut jenis kelamin terlihat bahwa proporsi kelompok usia kerja utama perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, masing-masing sebesar 53,9 persen dan 46,1 persen. Tingginya proporsi wanita usia kelompok usia tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya migrasi yang dilakukan oleh sebagian anggota rumah tangga laki-laki pada kelompok usia kerja utama di desa ini untuk bekerja di luar negeri. Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat desa Weru menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk laki-laki di desa Weru menjadi TKI di luar negeri, terutama di Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah. Pada umumnya mereka bekerja sebagai tenaga kasar di bidang konstruksi besi dan kayu serta menjadi buruh bangunan.

Komposisi anggota rumah tangga menurut umur juga memperlihatkan bahwa proporsi anggota rumah tangga sampel yang termasuk dalam kelompok usia muda tergolong rendah. Rendahnya proporsi penduduk usia muda mengindikasikan bahwa kasus-kasus kelahiran selama 15 tahun terakhir di lokasi penelitian mengalami penurunan. Penurunan tingkat kelahiran semakin nyata pada lima tahun terakhir, ditunjukkan oleh menurunnya proporsi anggota rumah tangga kelompok usia 5-14 tahun menjadi separuhnya pada kelompok usia balita (5,6 persen). Menurunnya kasus-kasus kelahiran kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya partisipasi penduduk yang mengikuti program KB. Peningkatan partisipasi KB berdampak terhadap berkurangnya jumlah anak yang dimiliki oleh ibu-ibu terutama yang berusia muda seperti yang terungkap dari hasil diskusi kelompok dengan ibu-ibu di di desa Weru:

“Kalau orang dulu punya anak sampai 10 orang.
Dulu kan penghasilan banyak. Ekonomi murah,
barang-barangnya murah. Kalau sekarang semua

mahal. Anaknya mulai sedikit mulai kayak aku ini (saat ini umur 36). Kalau mereka yang umur di atas 40 kadang empat, lima, atau tiga. Pada saat ini sudah pada ikut KB, KB bisa di bidan. Juga bisa di puskesmas.....”

Tingginya partisipasi penduduk dalam mengikuti program KB di desa Weru juga dilatarbelakangi oleh tingginya biaya yang diperlukan untuk membesarkan seorang anak terutama biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai anak di masyarakat di lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Soeparmanto pada tahun 1980 di Jawa Timur menemukan nilai anak bagi orang tua pada saat itu sebagai tambahan tenaga kerja sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga. Pandangan tersebut mendorong orang tua pada saat itu untuk mempunyai anak banyak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hierarti (2004) dua dekade kemudian menunjukkan adanya perubahan nilai anak bagi orang tua. Anak tidak lagi dianggap sebagai tambahan tenaga kerja tetapi sebagai jaminan bagi orang tua dimasa tuanya. Oleh karena itu, orang tua berusaha sedemikian rupa untuk membekali anak-anak dengan pendidikan yang lebih baik, sehingga nantinya mempunyai akses terhadap pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Keinginan untuk memberikan pendidikan yang baik berdampak pada besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan untuk membiayai seorang anak sehingga mempengaruhi orang tua untuk membatasi jumlah anak yang dimiliki. Kondisi ini juga terjadi di desa Weru, seperti yang terungkap dari hasil diskusi kelompok dengan ibu-ibu di desa Weru dibawah ini

“...Punya anak dua saja sudah keberatan bu. Sekolahnya sekarang saja mahal. Kalau punya anak

2 penghasilan tidak cukup. Kadang-kadang nelayan dapatnya itu Rp. 50.000 atau Rp. 60.000, trus pengeluaran itu Rp. 60.000. Ya isteri-isteri ikut bantu cari uang, apa saja yang penting halal....”

Rendahnya kasus-kasus kelahiran yang mengakibatkan rendahnya proporsi anggota rumah tangga usia muda berdampak terhadap meningkatnya proporsi anggota rumah tangga usia produktif (15-64 tahun) diikuti oleh rendahnya angka beban tanggungan (44 persen) di samping adanya pengaruh dari rendahnya proporsi anggota rumah tangga non produktif (65 tahun ke atas). Angka beban ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa setiap 2 orang penduduk usia produktif menanggung kurang dari 1 orang penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 15-64 tahun). Angka ini lebih rendah dari beban tanggungan yang diperkirakan akan dicapai Indonesia pada tahun 2020-2030 yaitu 45 persen (Adioetomo, 2006). Kondisi ini sebenarnya membuka peluang bagi penduduk di desa Weru untuk mengalihkan pendapatan yang diperoleh menjadi tabungan karena selama ini penduduk usia muda menggantungkan pengeluaran mereka untuk kesehatan, pendidikan dan konsumsi lainnya terhadap penduduk usia produktif (Naveenatham, 2002).

Seperti dijelaskan di atas, pada saat ini telah terjadi pergeseran nilai anak bagi orangtua dibandingkan dua dekade sebelumnya. Kondisi ini mendorong orang tua terutama rumah tangga muda untuk membatasi jumlah anak yang dimiliki. Tabulasi silang antara jumlah anggota rumah tangga dengan usia kepala keluarga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah anggota rumah tangga yang dimiliki dengan umur kepala rumah tangga. Proporsi tertinggi rumah tangga dengan jumlah anggota

rumah tangga 1-2 dan 3-5 orang berasal dari keluarga muda (usia kepala rumah tangga kurang dari 35 tahun). Kemungkinan rumah tangga muda tersebut sudah mengikuti program KB dan memiliki 1-3 orang anak. Tidak demikian halnya dengan rumah tangga berusia lebih tua (usia kepala rumah tangga 60 tahun ke atas) yang cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih banyak. Berdasarkan data diketahui proporsi tertinggi rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia tua mempunyai jumlah anggota rumah tangga 6 orang atau lebih. Rumah tangga ini kemungkinan mempunyai anak lebih dari 4 orang. Hal ini bisa dimaklumi mengingat meskipun program KB di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an namun diterima secara luas tahun 1992-an, yaitu sejak ditetapkannya Undang-undang No 10/1992 oleh pemerintah mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Herartri, 2004).

Tabel 4.3. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Kelompok Umur	Jumlah Anggota Rumah Tangga			Jumlah
	1-2	3-5	6+	
<35	14,3	71,4	14,3	100 (14)
35-59	4,4	64,6	31,0	100 (113)
60+	8,3	54,2	37,5	100(24)
Jumlah	6,0	63,6	30,5	100 (151)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Meskipun sebagian besar masyarakat di desa Weru sudah mengalami perubahan dalam memandang nilai seorang anak sehingga membatasi jumlah anak yang dimiliki, namun sebagian kecil masyarakat masih menganggap memiliki banyak anak adalah lebih baik. Anak dianggap sebagai teman dan saudara di usia tua, sehingga semakin banyak anak semakin banyak saudara yang dimiliki. Hanya keterbatasan kondisi ekonomilah yang menyebabkan mereka membatasi jumlah anak. Namun apabila mereka mempunyai kondisi ekonomi yang mencukupi, akan memiliki jumlah anak yang lebih banyak seperti yang diungkapkan oleh ibu-ibu dalam diskusi kelompok seperti di bawah ini:

”...Kalau ekonomi cukup maunya anak banyak, karena enak bu. Kalau banyak saudara. Kalau kita sudah tua banyak anak, anaknya punya teman banyak untuk berunding. Kalau ekonomi baik, saya mau punya anak limo. Punya anak sedikit sekarang karena penghasilan kurang saja”.

Pendidikan

Secara keseluruhan tingkat pendidikan anggota rumah tangga masih rendah. Hampir separuh dari anggota rumah tangga berusia 7 tahun ke atas hanya berpendidikan SD atau kurang, sekitar 23 persen anggota rumah tangga berpendidikan SLTP dan hampir sepertiga anggota rumah tangga berpendidikan SLTA atau lebih (30 persen). Meskipun demikian, hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa Weru yang menjadi lokasi penelitian sudah meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada umumnya anak-anak muda desa Weru mempunyai pendidikan

sampai tingkat SMA. Kondisi ini disebabkan antar lain telah tersedianya fasilitas Pendidikan Aliyah yang lokasinya tidak terlalu jauh dari desa sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan setingkat SMA menjadi lebih baik . Menurut hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, sekolah tersebut didirikan secara swadaya oleh masyarakat dan sebagian besar merupakan sumbangan dari masyarakat desa yang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Sebagian kecil penduduk desa Weru bahkan ada yang bersekolah sampai perguruan tinggi terutama bagi keluarga yang mempunyai kemampuan finansial untuk menyekolahkan anaknya.

Tabel 4.4. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SD kebawah	47,3	44,6	46,0
SLTP	25,6	21,1	23,4
SLTA +	27,1	34,4	30,7
Jumlah	100,0 (336)	100,0 (323)	100,0 (659)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Apabila tingkat pendidikan ART usia 7 tahun ke atas di rinci menurut jenis kelamin terlihat bahwa tingkat pendidikan ART perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki, terutama pada tingkat pendidikan SLTA+. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses perempuan di lokasi penelitian terhadap pendidikan sudah mulai

terbuka. Dari hasil wawancara dengan nelayan diketahui sebagian anak laki-laki hanya bersekolah sampai SLTP kemudian langsung bekerja sebagai nelayan. Sementara itu anak-anak perempuan lebih memilih untuk melanjutkan sekolah sampai SLTA.

Pekerjaan

Sebagai wilayah yang bertipologi pesisir, maka sebagian besar anggota rumah tangga di desa Weru bekerja di perikanan tangkap, perdagangan dan industri pengolahan sumberdaya laut. Hasil survei menunjukkan lapangan perikanan tangkap menyerap hampir separuh dari anggota rumah tangga sampel (41 persen) sedangkan perdagangan dan industri pengolahan masing-masing 27 persen dan 17 persen. Umumnya anggota rumah tangga sampel yang bekerja di usaha perikanan tangkap adalah nelayan. Nelayan di desa ini biasanya dibagi dua yaitu nelayan siang dan nelayan malam. Nelayan malam adalah nelayan yang bekerja pada malam hari, mereka biasanya berangkat pada sore hari dan pulang pada pagi hari sedangkan nelayan siang adalah nelayan yang berangkat pada pagi hari dan pulang pada siang hari.

Pekerjaan sebagai nelayan sangat tergantung pada musim atau arah angin. Nelayan di desa Weru membagi musim menjadi dua yaitu musim timur dan musim barat. Musim timur biasanya terjadi antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari, sementara musim barat berlangsung antara bulan Mei sampai dengan bulan November. Pada musim timur, angin berhembus dengan tenang sehingga nelayan dapat melaut tiap hari dan hasil tangkapan yang diperoleh relatif banyak. Berbeda dengan musim timur, pada

musim barat angin berhembus dengan kencang, ombak besar dan biasanya disertai dengan hujan. Pada musim barat ini nelayan tidak bisa melaut dan biasanya digunakan untuk memperbaiki alat tangkap yang rusak. Meskipun musim barat dianggap merugikan namun kehadiran musim barat sangat diperlukan. Menurut hasil diskusi kelompok dengan nelayan, angin yang sangat kencang pada musim barat dianggap membawa banyak ikan. Setelah musim barat berakhir, awal musim timur dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk melaut karena pada waktu itu masih terdapat banyak ikan yang terbawa angin musim barat.

Pembahasan tentang lapangan pekerjaan menurut jenis kelamin memperlihatkan bahwa perdagangan dan industri pengolahan didominasi oleh perempuan, yaitu masing-masing 29,8 persen dan 49,7 persen. Sebagian besar responden yang bekerja di lapangan pekerjaan perdagangan berstatus sebagai istri nelayan. Mereka umumnya menjual hasil tangkapan suaminya pada para pengumpul atau langsung ke pasar ikan yang terdapat di desa tersebut. Sementara itu perempuan yang bekerja di industri pengolahan umumnya sebagai buruh "*mbelek ikan*". Dominasi perempuan dalam pekerjaan ini terjadi karena sifat pekerjaan ini memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Selain istri-istri nelayan pekerjaan ini juga melibatkan anak-anak setelah pulang dari sekolah. Menurut hasil wawancara dengan beberapanelayan diketahui bahwa tingginya partisipasi perempuan yang bekerja pada kedua lapangan pekerjaan ini mulai tampak setelah banyak nelayan yang mengalami penurunan pendapatan akibat kenaikan harga bahan bakar dan perubahan musim yang tidak menentu. Para istri mengambil inisiatif untuk bekerja membantu suami menjual ikan atau mencari penghasilan tambahan dengan menjadi buruh *mbelek ikan* di pabrik pengolahan ikan. Perlu diketahui, sebelumnya

mayoritas para istri hanya tinggal di rumah, sementara itu pekerjaan menjual ikan biasanya juga dilakukan oleh nelayan sendiri. Setelah harga bahan bakar meningkat, para istri mulai mengambil alih pekerjaan menjual ikan. Mereka dianggap lebih gigih karena dalam menjual ikan juga memperhatikan perbedaan harga yang berlaku (pada pengumpul atau pasar), sehingga hasil tangkapan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.

Tabel 4.5. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Usia 10 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan yang dilakukan seminggu yang lalu, desa Weru, kecamatan Paciran kabupaten Lamongan Tahun Jawa Timur Tahun 2010

Karakteristik pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Lapangan pekerjaan utama			
Pertanian	0,5	0,0	0,3
Perikanan tangkap	70,0	2,6	41,0
Penggalian	3,5	0,0	2,0
Industri pengolahan	6,5	29,8	16,5
Perdagangan	9,0	49,7	26,5
Jasa	7,5	16,6	11,4
Lainnya	3,0	1,3	2,3
Total	100,0	100,0	100,0
N	200	151	351
Status Pekerjaan			
Bekerja sendiri	12,5	51,7	29,3
Bekerja dengan ART	7,5	4,0	6,0
Bekerja dengan buruh tidak tetap	6,0		3,4
Buruh/karyawan	12,5	39,7	24,2

Pekerja keluarga	5,5	4,0	4,8
Bagi hasil	56,0	0,7	32,2
Total	100,0	100,0	100,0
N	200	151	351

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Pengelompokan menurut status pekerjaan memperlihatkan tiga status pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh anggota rumah tangga yaitu sistem bagi hasil (32,2 persen), bekerja sendiri (29,3 persen) dan buruh/karyawan). Sistem bagi hasil biasanya dilakukan oleh nelayan yang menggunakan perahu “baito”. Penangkapan ikan menggunakan perahu baito biasanya dilakukan oleh 3 orang nelayan yang terdiri dari 1 orang nakhoda dan 2 orang anak buah. Bagi hasil dilakukan terhadap hasil penjualan ikan setelah dikurangi biaya bahan bakar. Hasil penjualan ikan dibagi 5, masing-masing nelayan mendapatkan 1 bagian, 2 bagian lainnya untuk pemilik perahu dan pemilik alat tangkap.

Pekerja dengan status pekerjaan ‘bekerja sendiri’ sebagian besar dilakukan oleh perempuan (51,7 persen). Pada umumnya mereka bekerja sebagai penjual ikan, berjualan kue dan makanan kecil lainnya. Menurut hasil diskusi kelompok terfokus dengan beberapa perempuan yang bekerja, perempuan yang bekerja sebagai penjual makanan dan membuka warung-warung tersebut pada umumnya bukan penduduk asli desa melainkan pendatang.

Tidak berbeda dengan status pekerjaan bekerja sendiri, pekerjaan sebagai buruh/karyawan juga didominasi oleh

perempuan. Hal ini diperlihatkan oleh proporsi perempuan yang bekerja sebagai buruh karyawan yang lebih tinggi dari pada laki-laki, masing-masing 39,7 persen dan 12,5 persen. Seperti sudah dijelaskan di atas, pada umumnya perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan tersebut bekerja sebagai buruh *mbelek* ikan. Mereka biasanya melakukan pekerjaan tersebut setelah menjual hasil tangkapan suaminya. Kondisi ini mengindikasikan tingginya partisipasi perempuan dalam bekerja karena mereka mempunyai pekerjaan rangkap. Hal ini terjadi terutama setelah kenaikan bahan bakar dan musim yang tidak menentu.

4.2. Pengeluaran dan Tabungan: Gambaran Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga

4.2.1. Ketahanan ekonomi rumah tangga di wilayah pertanian

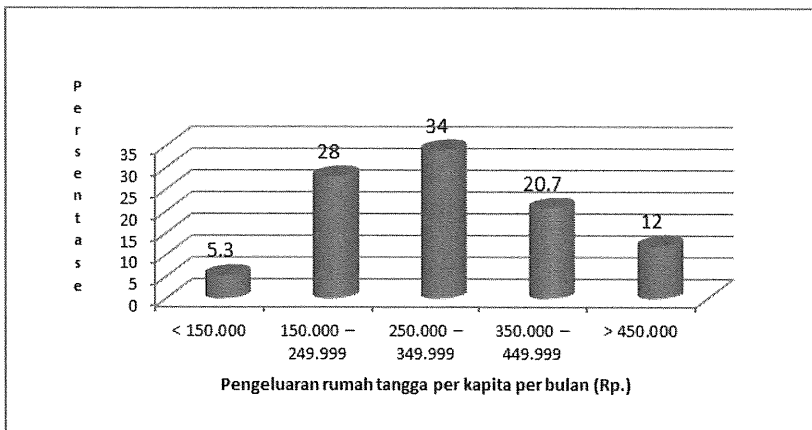
Pengeluaran Rumah Tangga

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur ketahanan ekonomi rumah tangga adalah pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan dan jumlah tabungan yang dimiliki rumah tangga (median). Pengeluaran rumah tangga mencakup belanja untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan, sedangkan tabungan terdiri dari berbagai bentuk seperti uang, emas (perhiasan) serta hewan ternak (sapi dan kambing).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran (pangan dan non pangan) per kapita per bulan rumah tangga sampel

di desa Mantup sebesar Rp. 317.440,-. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari garis kemiskinan kabupaten Lamongan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.221.413. Dengan menggunakan indikator kemiskinan tersebut, sebanyak 77 persen rumah tangga sampel termasuk kelompok rumah tangga tidak miskin. Artinya sejumlah rumah tangga tersebut mempunyai pengeluaran per kapita lebih besar dari Rp. 177.003,-. Berdasar pengelompokan pengeluaran, proporsi terbesar (34 persen) penduduk mempunyai pengeluaran per kapita sebesar Rp. 250.000,- hingga Rp. 349.999,-, diikuti oleh mereka dengan pengeluaran per kapita sebanyak Rp. 150.000,- hingga Rp. 249.999,- (lihat gambar 4.5). Berdasar data distribusi pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan tersebut semakin jelas terlihat bahwa mayoritas rumah tangga termasuk kategori tidak miskin.

Gambar 4.5. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Pengeluaran per Kapita per Bulan, desa Mantup, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu pangan dan non pangan, penelitian ini mendapatkan bahwa sekitar 87 persen rumah tangga menggunakan lebih dari separuh pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan pangan (tabel 4.6). Tabel 4.6 juga memperlihatkan bahwa semakin rendah pengeluaran rumah tangga, semakin besar pula proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan. Pada kelompok pengeluaran terendah (< 1 juta rupiah) semua rumah tangga bahkan mempunyai pengeluaran pangan lebih dari separuh total pengeluaran per bulan. Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa rumah tangga-rumah tangga yang menjadi sampel penelitian masih tergolong tidak sejahtera karena memiliki proporsi pengeluaran untuk pangan lebih besar daripada non pangan.

Tabel 4.6. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Proporsi Pengeluaran Pangan Terhadap Total Pengeluaran per Bulan dan Jumlah Pengeluaran per Bulan, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Pengeluaran rumah tangga per bulan (Rp.)	Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga per bulan		Jumlah (N)
	≤ 50 persen	> 50 persen	
< 500.000	-	100,0	100,0 (6)
500.000 – 999.999	-	100,0	100,0 (61)
1.000.000 – 1.499.999	8,9	91,1	100,0 (56)
1.500.000 – 1.999.999	50,0	50,0	100,0 (18)
≥ 2.000.000	66,7	33,3	100,0 (9)
<i>Jumlah (N)</i>	<i>13,3 (20)</i>	<i>86,7 (130)</i>	<i>100,0 (150)</i>

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Tabungan

Hasil penelitian ini menemukan lebih dari separuh rumah tangga sampel (57 persen) memiliki tabungan dengan berbagai bentuk. Tabungan dalam bentuk uang (3 rumah tangga dengan jumlah masing-masing Rp. 18.000,-, Rp. 3.000.000,-, dan Rp. 10.000.000,-); perhiasan (20 rumah tangga dengan nilai berkisar antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 6.500.000); serta hewan ternak berupa sapi dan kambing. Bentuk tabungan yang paling banyak dimiliki rumah tangga sampel (76 rumah tangga atau 51 persen) adalah sapi, dengan jumlah 1 sampai 10 ekor. Di antara rumah tangga yang memiliki tabungan jenis hewan ini, proporsi terbesar (39 persen) adalah rumah tangga yang memiliki 1 ekor, diikuti oleh rumah tangga yang memiliki 2 ekor sapi (34 persen) dan hanya 7 rumah tangga yang memiliki tabungan berupa kambing, dengan nilai antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 4.500.000,-. Jika seluruh tabungan yang dimiliki rumah tangga dikonversi dengan nilai rupiah, rata-rata (mean) tabungan yang dimiliki rumah tangga sebesar Rp. 10.193.727,-. Selanjutnya, nilai median tabungan rumah tangga berjumlah Rp. 8.000.000,-. Artinya, kebanyakan rumah tangga mengelompok pada pemilikan tabungan sebesar Rp. 8.000.000,-.

Beberapa cara dilakukan oleh penduduk untuk memiliki hewan ternak. Salah satu cara adalah dengan membeli hewan yang masih kecil ketika mendapat arisan. Hal ini, seperti penuturan salah seorang ibu peserta FGD di dusun Sambilan berikut ini, “... *kalau dapat arisan saya beli anak kambing, terus dipelihara sampai besar*”. Di lokasi penelitian ada kegiatan arisan yang diikuti oleh ibu-ibu. Jumlah uang arisan yang diterima sebesar Rp. 500.000,-. Sebagian di antara mereka menggunakannya untuk membeli kambing dan

dipelihara sampai cukup umur untuk dijual. Untuk ternak besar, yaitu sapi, sebagian penduduk memperolehnya dengan cara memelihara sapi milik orang lain sampai mempunyai anak. Anak-anak sapi yang dipelihara kemudian dibagi dengan pemiliknya (masyarakat mengenai dengan istilah *nggaduh*).

Selain kedua hewan ternak di atas, mayoritas rumah tangga juga memiliki tabungan berupa ayam. Namun demikian, dalam penelitian ini analisis mengenai jumlah tabungan rumah tangga tidak memasukkan kepemilikan jenis unggas tersebut. Hewan ini lebih dipandang sebagai hewan peliharaan di pekarangan karena tidak memerlukan perlakuan khusus dalam pemeliharaannya. Ayam yang dimiliki pada umumnya dibiarkan berkeliaran di pekarangan dan di sekitar rumah. Kebiasaan memelihara ayam ini sudah dilakukan sejak lama oleh hampir semua rumah tangga, tidak hanya rumah tangga sampel, akan tetapi rumah tangga pada umumnya. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang narasumber, aparat desa penelitian berikut ini,

“... Kalau cuma ayam semua orang punya, itu dilepas saja di pekarangan, dibiarkan, ndak dikasih makanan khusus. Ayam itu kan juga tabungan, kalau ada keperluan mendadak, anak minta beli buku atau apa, ya jual saja ayam, tangkap, jual. Seperti itu sudah biasa”

Pemilikan tabungan kemungkinan besar berkaitan dengan jumlah ART usia produktif dalam rumah tangga yang bekerja. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki tabungan semakin besar sejalan dengan bertambah banyaknya ART usia produktif yang bekerja (tabel 4.8). Semakin banyak jumlah ART yang bekerja menyebabkan penghasilan yang

dimiliki oleh rumah tangga meningkat. Kondisi ini memungkinkan rumah tangga tersebut untuk menyimpan sebagian penghasilan, terutama setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Hal ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Adioetomo, dkk. (2005) bahwa banyaknya penduduk yang bekerja (produktif secara ekonomi) memungkinkan rumah tangga memiliki tabungan.

Tabel 4.7. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Pemilikan Tabungan dan Jumlah ART Usia Produktif yang Bekerja, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan Tahun 2010

Jumlah ART usia produktif yang bekerja	Pemilikan tabungan		Jumlah (N)
	Memiliki	Tidak memiliki	
1 orang	49,3	50,7	100,0 (75)
2 orang	64,8	35,2	100,0 (71)
3 orang	100,0	-	100,0 (2)
4 orang	-	100,0	100,0 (1)
Jumlah (N)	57,3 (85)	42,7 (64)	100,0 (149)*

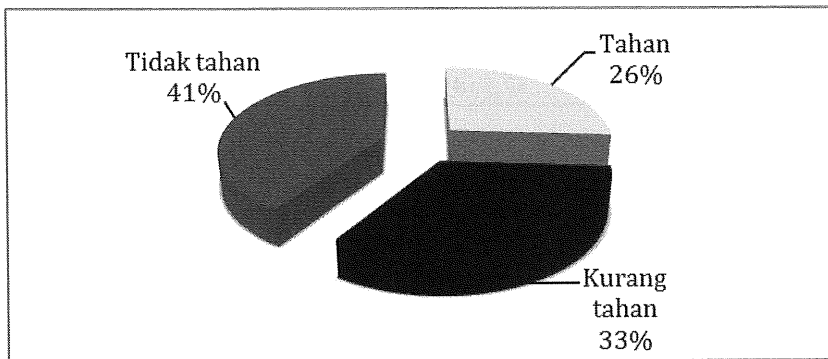
Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Catatan: 1 rumah tangga tidak memiliki ART usia produktif yang bekerja, tetapi memiliki tabungan

Mengacu pada indikator ketahanan ekonomi rumah tangga seperti yang dikemukakan sebelumnya, sebanyak 41 persen rumah tangga terpilih dalam penelitian ini termasuk kategori 'tidak tahan'. Sisanya, masing-masing 26 persen dan 33 persen rumah tangga

adalah yang tergolong 'tahan' dan 'kurang tahan' (gambar 4.6). Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa tidak semua rumah tangga yang tergolong tidak miskin (menggunakan indikator pengeluaran per kapita) termasuk dalam kategori rumah tangga tahan ekonomi. Hal ini terlihat dari proporsi rumah tangga tidak miskin yang berjumlah 77 persen, sementara proporsi rumah tangga yang termasuk kelompok tahan ekonomi jauh lebih sedikit, hanya 26 persen. Jika diteliti lebih lanjut, kemungkinan besar hal ini karena sekitar 43 persen rumah tangga tidak memiliki tabungan, yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam kelompok rumah tangga tidak tahan (lihat pembahasan mengenai pengelompokan ketahanan ekonomi rumah tangga).

Gambar 4.6. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Ketahanan Ekonomi, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

4.2.2. Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Wilayah Pesisir

Pengeluaran rumah tangga

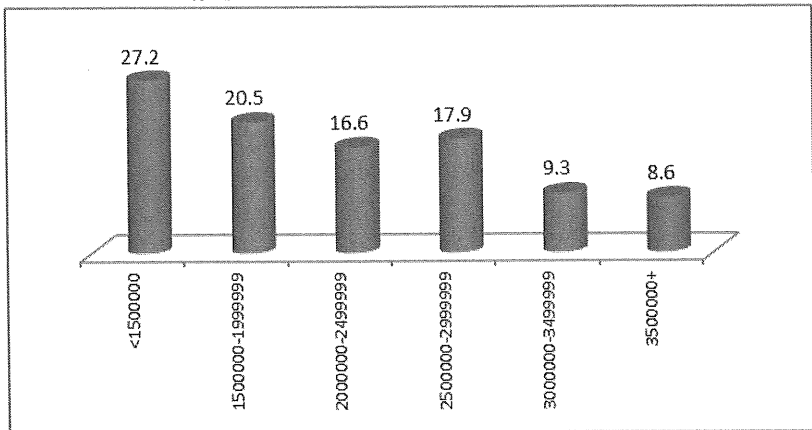
Pengeluaran rumah tangga sampel per bulan di desa Weru cukup bervariasi yaitu berkisar antara Rp. 700.000 sampai dengan Rp.10.000.000 dengan rata-rata Rp.2.235.692. Dari distribusi pengeluaran rumah tangga menurut kelompok pengeluaran (gambar 4.7) diketahui bahwa hampir separuh rumah tangga sampel mempunyai pengeluaran kurang dari Rp. 2.000.000 dan hanya sekitar 18 persen yang mempunyai pengeluaran lebih dari Rp. 3.000.000.

Pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemiskinan rumah tangga yaitu melalui pengeluaran perkapita. Rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin apabila mempunyai pengeluaran perkapita kurang dari garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Berdasarkan garis kemiskinan untuk kabupaten Lamongan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 221.413 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga di desa Weru cukup rendah. Data empiris menunjukkan dari 151 rumah tangga sampel hanya 7 rumah atau kurang dari 5 persen rumah tangga yang tergolong miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan rumah tangga sampel di desa Weru tergolong rendah.

Selain pengeluaran perkapita, tingkat kesejahteraan rumah tangga juga dapat dilihat dari besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga menurut jenis pengeluaran (pangan dan non pangan). Rumah tangga yang mempunyai tingkat kesejahteraan rendah atau

rumah tangga miskin dicirikan oleh tingginya pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran pangan, semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Data empiris menunjukkan, secara umum rata-rata pengeluaran rumah tangga sampel untuk pangan sekitar 60 persen. Proporsi rumah tangga yang mempunyai pengeluaran pangan >50 persen tersebut mencapai lebih dari 80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga sampel masih rendah karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan meskipun hampir keseluruhan rumah tangga tersebut termasuk dalam kategori tidak miskin menurut garis kemiskinan BPS.

Gambar 4.7. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Besarnya Pengeluaran Rumah Tangga Per bulan, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh tabulasi silang antara kelompok pengeluaran rumah tangga sampel dengan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Tabel 4.8 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan proporsi rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan >50 persen dengan semakin menurunnya pengeluaran. Tabel 4.8 juga memperlihatkan bahwa rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan >50 persen berasal dari rumah tangga dengan pengeluaran rendah (miskin). Data tersebut mendukung asumsi bahwa semakin tinggi pengeluaran rumah tangga untuk pangan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Tabel 4.8. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Kelompok Pengeluaran dan Proporsi Pengeluaran Pangan terhadap Pengeluaran Rumah Tangga, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Kelompok Pengeluaran	Proporsi Pengeluaran Pangan		Jumlah
	<=50	>50	
<1500000	6,1	93,9	100 (41)
1500000-1999999	29,0	71,0	100 (31)
2000000-2499999	12,0	88,0	100 (25)
2500000-2999999	26,9	73,1	100(26)
3000000-3499999	21,4	78,6	100(14)
3500000+	23,1	76,9	100 (13)
Total	18,0	82,0	100 (150)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Apabila pengeluaran rumah tangga dirinci lebih detail menurut jenis pengeluaran ditemukan pengeluaran rumah tangga sampel terbesar digunakan untuk jajan yaitu mencapai 15 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Besarnya pengeluaran untuk jajan sangat dipengaruhi oleh perilaku hidup masyarakat di daerah pesisir yang lebih suka mengkonsumsi makanan jadi daripada makanan rumah. Kebiasaan membeli makanan jadi tidak hanya dilakukan oleh anak-anak tetapi juga ibu-ibu. Tingginya pengeluaran untuk jajan di desa Weru ini juga terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa orang nelayan seperti dibawah ini

“....Anak-anak di sini banyak jajan. Anak-anak di pesisir pada umumnya memang suka jajan bu. Jika dilarang anaknya bisa menangis. Ibu-ibu juga suka jajan.....”

Tabel 4.9. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Pengeluaran, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Jenis pengeluaran	Persen
Pangan	
Beras	12,6
Lauk-pauk	12,7
Minyak	7,6
Gula	4,6
Jajan	15,0
Lainnya	0,1
Rokok	7,0
Total	59,5
Non pangan	
Bahan bakar	10,6

Transpor	2,7
Pendidikan	10,5
Listrik	5,7
Sosial	3,7
Kebutuhan sehari-hari	3,3
Kesehatan	4,0
Total	40,5

Sumber : Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Di samping pengeluaran untuk jajan, pengeluaran rumah tangga untuk rokok di desa Weru ternyata cukup besar yaitu mencapai 7 persen. Tingginya pengeluaran untuk rokok ini sangat terkait dengan kebiasaan merokok di kalangan nelayan. Pada waktu melaut, rokok menjadi salah satu kebutuhan wajib bagi nelayan. Besarnya pengeluaran rumah tangga untuk jajan dan untuk rokok di desa Weru ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Saliem dan Ariningsih (tt) terhadap data Susenas 1999-2005. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadinya perubahan pola konsumsi rumah tangga perdesaan yang mengarah pada pola konsumsi rumah tangga di perkotaan. Kondisi ini diperlihatkan oleh adanya peningkatan konsumsi makanan jadi dan rokok pada masyarakat perdesaan menggantikan konsumsi beras. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran rokok yang cukup signifikan pada periode tahun 1999-2005 dari 9 persen menjadi 14 persen.

Tabungan

Dari hasil survei diketahui bahwa mayoritas rumah tangga sampel di desa Weru tidak mempunyai tabungan (62,3 persen). Hal ini menunjukkan bahwa menabung tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat di desa ini. Rendahnya pemilikan tabungan kemungkinan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kemudahan untuk memperoleh uang tunai dan jenis tabungan yang dimiliki rumah tangga tidak termasuk dalam konsep/pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini. Letak desa yang berdekatan dengan laut menyebabkan penduduk desa mempunyai akses untuk memperoleh sumberdaya laut dengan mudah dan menjualnya untuk memperoleh uang. Hasil yang diperoleh biasanya dihabiskan dalam waktu satu hari, apabila uang tunai sudah habis penduduk kembali mengambil hasil laut dan menjualnya. Hal ini sudah menjadi tipologi dari masyarakat pesisir. Kemungkinan lain, sebagian rumah tangga di desa Weru tidak menabung dalam bentuk uang, perhiasan maupun ternak (sapi atau kambing). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan (tokoh masyarakat) diketahui sebagian rumah tangga menabung dalam bentuk barang seperti sepeda motor karena dianggap mudah dijual atau digadaikan pada saat rumah tangga kesulitan menangkap ikan di musim barat seperti dituturkan di bawah ini:

“...biasanya apabila hasil yang diperoleh nelayan cukup besar, hasilnya digunakan untuk membeli barang-barang seperti sepeda motor atau televisi... sebagian kecil menyimpan uang di BRI atau membeli perhiasan. Pada musim barat saat angin kencang nelayan tidak dapat melaut. Barang-barang tersebut bisa dijual atau digadaikan di pegadaian.....”

Selain dalam bentuk barang, sebagian rumah tangga di desa Weru menyimpan hasil penjualan tangkapannya pada pengumpul. Biasanya nelayan hanya menjual hasil tangkapannya pada satu pengumpul. Sebagian hasil tangkapan tidak diambil tetapi disimpan pada pengumpul dan baru ditarik pada saat dibutuhkan.

Apabila ditelusuri lebih lanjut bentuk-bentuk tabungan yang dimiliki rumah tangga sampel di wilayah pesisir, dapat diketahui bahwa proporsi terbesar tabungan disimpan dalam bentuk perhiasan emas (26 persen). Sedangkan rumah tangga juga mempunyai tabungan dalam bentuk uang dan ternak (kambing) masing-masing 19 persen dan 2 persen. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa beberapa rumah tangga sudah menggunakan jasa bank dalam menyimpan tabungan. Besarnya jumlah tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga setelah dirupiahkan bervariasi mulai dari Rp.150.000 - Rp.50.000.000. Dengan median tabungan sebesar Rp. 1.000.000 yang dimiliki oleh sekitar 18 persen rumah tangga sampel. Nilai median ini selanjutnya akan digunakan sebagai *cutting point* dalam penentuan tingkat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Pemilikan tabungan juga ditentukan oleh jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja maka semakin besar kemungkinan rumah tangga untuk memiliki tabungan. Hal ini menggunakan asumsi bahwa semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja maka semakin besar jumlah pendapatan rumah tangga. Jumlah pendapatan yang besar memungkinkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semua anggota rumah tangga dan sisanya dapat disimpan sebagai tabungan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian ini. Tabel 4.10 menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya proporsi

rumah tangga yang memiliki tabungan dengan semakin besarnya jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Hanya 24 persen dari rumah tangga dengan anggota rumah tangga 1 orang yang memiliki tabungan., Proporsi rumah tangga yang memiliki tabungan meningkat sejalan dengan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja. Data menunjukkan proporsi tabungan meningkat menjadi 37,5 persen apabila jumlah anggota rumah tangga yang bekerja bertambah menjadi 2 orang, dan menjadi 48,0 persen bila mempunyai anggota rumah tangga 3 orang atau lebih. Jumlah ini meningkat sebesar dua kali lipat bila dibandingkan dengan rumah tangga yang hanya memiliki 1 orang anggota yang bekerja.

Tabel 4.10. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Pemilikan Tabungan dan Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Jumlah ART bekerja	Pemilikan tabungan		Jumlah
	Ya	Tidak	
1	24,1	75,9	100 (29)
2	37,5	62,5	100 (72)
3+	48,0	52,0	100 (50)
Jumlah	38,4	61,6	100 (151)

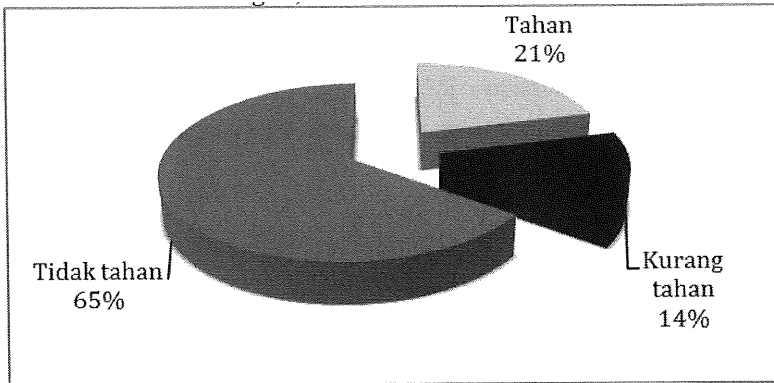
Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Ketahanan ekonomi rumah tangga

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketahanan ekonomi rumah tangga ditentukan berdasarkan indikator kemiskinan dan besarnya jumlah tabungan. Ketahanan ekonomi rumah tangga dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu tahan, kurang tahan dan tidak tahan.

Berdasarkan hasil pengelompokan ketahanan ekonomi rumah tangga dapat diketahui bahwa lebih dari separuh rumah tangga sampel di desa Weru termasuk dalam kategori tidak tahan, kurang dari seperempat rumah tangga termasuk tahan dan sisanya termasuk dalam kelompok kurang tahan. Tingginya proporsi rumah tangga yang termasuk dalam kategori tidak tahan, terutama dipengaruhi oleh rendahnya kepemilikan tabungan rumah tangga. Lebih dari separuh rumah tangga sampel tidak mempunyai tabungan. Padahal pada penelitian ini, kepemilikan tabungan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam penentuan tingkat ketahanan ekonomi rumah tangga. Rumah tangga yang tidak mempunyai tabungan secara langsung dikelompokkan sebagai rumah tangga tidak tahan tanpa mempedulikan tingkat kemiskinan rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa rumah tangga yang tidak mempunyai tabungan (baik miskin maupun tidak miskin) akan sangat rentan ketahanan ekonominya. Pada saat kondisi ekonomi rumah tangga mengalami gangguan karena sesuatu dan lain hal dan rumah tangga tidak memiliki tabungan maka ia tidak dapat mempertahankan kondisi ekonominya agar tetap sama seperti sebelumnya.

Gambar 4.8. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Tingkat Ketahanan Ekonomi, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Proporsi rumah tangga yang termasuk dalam kategori kurang tahan sangat rendah yaitu hanya mencakup 14 persen dari rumah tangga sampel. Pada kelompok ini jumlah tabungan yang dimiliki rumah tangga mempunyai peranan yang sangat besar. Rumah tangga yang termasuk kategori kurang tahan ini seluruhnya merupakan rumah tangga tidak miskin tetapi mempunyai tabungan kurang dari median rumah tangga sampel di desa.

Data ketahanan ekonomi juga menunjukkan bahwa sekitar 21,2 persen rumah tangga sampel termasuk dalam kategori tahan. Rumah tangga yang termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga tidak miskin yang memiliki tabungan lebih besar dari Rp. 1.000.000 (median tabungan). Dengan jumlah tabungan

tersebut, diasumsikan rumah tangga tidak miskin akan dapat mempertahankan kondisi ekonominya apabila mendapat gangguan.

Ketahanan ekonomi rumah tangga kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik kepala rumah tangga seperti umur dan lapangan pekerjaan. Untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik kepala rumah tangga dibuat tabulasi silang antara ketahanan ekonomi rumah tangga dengan karakteristik kepala rumah tangga. Pada penelitian ini umur kepala rumah tangga dikategorikan berdasarkan pengelompokan umur Lindh and Mambelg (1999). Hasil tabulasi silang antara ketahanan ekonomi dengan umur kepala rumah tangga memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa proporsi terbesar rumah tangga dalam kategori 'tahan' berasal dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia pertengahan. Proporsi terbesar rumah tangga dalam kelompok 'kurang tahan' terdapat pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia tua. Sedangkan kelompok tidak tahan berasal dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga berusia muda. Kemungkinan pada rumah tangga usia pertengahan, anak-anak sudah termasuk kelompok usia kerja dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, sehingga sebagian besar pendapatan rumah tangga dapat ditabung. Kepala rumah tangga tua kemungkinan sudah tidak bekerja dan menjadi beban bagi anak-anak yang sudah bekerja. Kondisi tersebut mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh rumah tangga, sehingga jumlah tabungan berkurang. Rumah tangga tersebut termasuk dalam kategori 'kurang tahan'. Sementara itu rumah tangga muda mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan biaya cukup besar, sedangkan pendapatan rumah tangga yang diperoleh relatif kecil, karena hanya bergantung pada kepala keluarga. Akibatnya tidak ada pendapatan yang bisa ditabung.

Tabel 4.11. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Ketahanan Ekonomi dan Karakteristik Kepala Rumah Tangga, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Karakteristik Kepala Rumah Tangga	Ketahanan ekonomi			Jumlah
	Tahan	Kurang tahan	Tidak tahan	
Umur				
<50	15,3	12,9	71,8	100 (85)
50-64	29,8	14	56,1	100 (57)
65+	22,2	22,2	55,6	100 (9)
Jumlah	21,2	13,9	64,9	100 (151)
Lapangan Pekerjaan				
Tidak bekerja	21,4	28,6	50,0	100 (14)
Perikanan tangkap	19,5	5,7	74,7	100 (87)
Bukan perikanan tangkap	24,0	24,0	52,0	100 (50)
Jumlah	21,2	13,9	64,9	100 (151)

Sumber : Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Berdasarkan kelompok lapangan pekerjaan tabel 4.11 memperlihatkan bahwa proporsi tertinggi rumah tangga yang termasuk kategori 'tidak tahan' merupakan rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja pada perikanan tangkap (74,7 persen). Rumah tangga dengan predikat 'kurang tahan' adalah rumah tangga dengan proporsi tertinggi yang berasal dari rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja (28,6 persen). Sementara itu rumah tangga pada kelompok 'tahan' berasal

dari rumah tangga bukan perikanan tangkap yaitu sebesar 24,0 persen. Apabila mengacu pada indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan ekonomi rumah tangga yaitu kemiskinan dan tabungan maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan rumah tangga perikanan tangkap tidak mempunyai tabungan. Bagi masyarakat di desa Weru pekerjaan sebagai nelayan tidak dapat memberikan pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan sebagai nelayan bagi sebagian masyarakat bahkan dianggap sebagai pekerjaan bagi orang-orang melarat karena tidak dapat memberikan kepastian penghasilan. Nelayan lebih sering mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kondisi ini terutama terjadi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak sebagaimana diungkapkan oleh seorang nelayan dalam diskusi kelompok dengan nelayan-nelayan di desa Weru sebagai berikut:

”...orang melaut itu sekali melarat-melarat. Nelayan itu *bantal ombak kemul angin* kerjanya kerja otot. Berat sama sekali. Kalau pabrik kan jelas upahnya. Kalau dari nelayan pendapatannya tidak pasti. Sering rugi, apalagi sejak harga bbm mahal.... “

Perubahan musim yang tidak menentu dua tahun belakangan ini semakin memperparah kondisi ekonomi rumah tangga nelayan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, nelayan sangat tergantung musim. Biasanya kedatangan musim-musim tersebut dapat diprediksi sehingga nelayan dapat menentukan kapan waktunya pergi melaut. Namun sekarang ini musim relatif tidak dapat ditentukan lagi. Musim barat yang biasanya terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari namun pada saat dilakukan penelitian yaitu pada bulan Mei, musim barat masih berlangsung. Menurut nelayan, angin kencang dan hujan lebat yang

biasanya muncul pada musim barat masih sering muncul. Akibatnya nelayan tidak dapat melaut. Padahal biasanya pada bulan tersebut sudah masuk musim timur yang disebut nelayan sebagai musim ikan karena pada bulan tersebut nelayan dapat melaut setiap hari.

Musim yang tidak seperti biasanya lagi tersebut menyebabkan nelayan kesulitan untuk menentukan waktu untuk melaut. Sebagai contoh, pada suatu waktu nelayan memutuskan melaut karena pada saat itu kondisi angin terlihat teduh dan bersahabat. Namun setelah turun ke laut bisa saja tiba-tiba muncul awan yang menjadi pertanda bahwa hujan dan angin kencang akan datang. Kondisi ini menyebabkan nelayan terpaksa harus pulang meskipun belum memperoleh hasil tangkapan. Akibatnya biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli solar/bensin tidak dapat ditutupi dari hasil tangkapan.

4.3. Hubungan Antara Anggota Rumah Tangga Usia Produktif dan Ketahanan Ekonomi

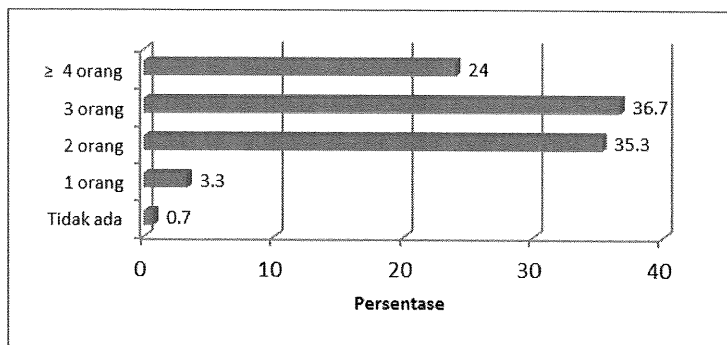
4.3.1. Masyarakat Pertanian desa Mantup

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga adalah banyaknya anggota rumah tangga usia produktif yang menghasilkan dan “menyumbangkan” pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi terbesar (36,7 persen) rumah tangga sampel mempunyai 3 orang anggota berusia produktif. Selanjutnya, sekitar seperempat rumah tangga mempunyai 4 orang atau lebih anggota dalam kelompok usia produktif (gambar 4.9). Namun demikian, informasi mengenai

jumlah anggota rumah tangga usia produktif saja tidak memadai untuk menganalisis kaitan antara variabel tersebut dan kondisi ketahanan rumah tangga. Informasi lain diperlukan, terutama proporsi anggota rumah tangga usia produktif terhadap jumlah seluruh anggota rumah tangga.

Berdasar penjelasan di atas, untuk analisa mengenai hubungan antara anggota rumah tangga usia produktif dengan ketahanan ekonomi rumah tangga, digunakan proporsi anggota rumah tangga usia produktif terhadap jumlah seluruh anggota rumah tangga. Rata-rata proporsi anggota rumah tangga usia produktif di desa Mantup adalah 78,99. Untuk analisa selanjutnya, rumah tangga dikelompokkan menjadi dua, yaitu rumah tangga dengan rata-rata proporsi anggota usia produktif $< 78,99$ (selanjutnya disebut proporsi “rendah”) dan rumah tangga yang mempunyai rata-rata proporsi anggota usia produktif $\geq 78,99$ (disebut proporsi “tinggi”).

Gambar 4.9. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Anggota Usia Produktif (15 – 64 Tahun), desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Rumah tangga dengan proporsi ART usia produktif tinggi diasumsikan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibanding rumah tangga yang mempunyai proporsi ART usia produktif rendah. Hal ini karena proporsi ART usia produktif yang lebih tinggi berpotensi memberikan penghasilan bagi rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan meningkatkan tabungan. Data pada tabel 4.12 mendukung asumsi tersebut. Proporsi terbesar rumah tangga yang termasuk kelompok tahan secara ekonomi adalah yang mempunyai proporsi ART usia produktif tinggi. Selanjutnya, pada kelompok rumah tangga kurang tahan, persentase terbesar adalah rumah tangga yang mempunyai proporsi ART usia produktif rendah. Namun, asumsi tersebut tidak terbukti pada rumah tangga yang termasuk kelompok tidak tahan. Data pada tabel yang sama menunjukkan bahwa persentase terbesar rumah tangga tidak tahan ekonomi justru yang mempunyai proporsi ART usia produktif yang tinggi (seperti rumah tangga yang termasuk kelompok tahan ekonomi). Meskipun demikian, secara statistik hubungan antara usia produktif dengan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal ini didukung oleh analisis statistik menggunakan metode uji *Chi-Square* yang menghasilkan nilai 7,183 pada taraf nyata = 0,028 (lebih kecil dari 0,05). Tingginya persentase anggota rumah tangga berusia produktif namun tidak tahan secara ekonomi kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu : 1) sebagian besar dari anggota rumah tangga usia produktif pada rumah tangga tersebut tidak bekerja, sehingga pendapatan rumah tangga tersebut tetap rendah; 2) meskipun sebagian anggota rumah tangga pada rumah tangga tidak tahan sudah bekerja namun pendapatan yang diterima rendah (gaji rendah) sehingga pendapatan rumah tangga secara keseluruhan tetap rendah dan berada di bawah garis kemiskinan. Akibatnya rumah tangga tersebut termasuk dalam kategori tidak tahan secara ekonomi.

Tabel 4.12. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Ketahanan Ekonomi dan Proporsi Anggota Rumah Usia Produktif, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Proporsi ART usia produktif	Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga			Jumlah (N)
	Tahan	Kurang Tahan	Tidak Tahan	
< 78,99 (rendah)	22,4	42,4	35,3	100,0 (84)
≥ 78,99 (tinggi)	30,8	21,5	47,7	100,0 (88)
Jumlah	26,0	33,3	40,7	100,0 (149*)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Catatan: * 1 rumah tangga yang tidak mempunyai ART usia produktif tidak dimasukkan dalam analisa.

Ada kemungkinan keadaan di atas terjadi karena anggota rumah tangga usia produktif pada kelompok tidak tahan lebih banyak yang tidak bekerja (sekolah dan mengurus rumah tangga) dibanding anggota rumah tangga yang bekerja. Hal ini menyebabkan penghasilan yang bisa “disumbangkan” pada rumah tangga juga kecil. Akibatnya, rumah tangga tersebut tidak bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, yang menyebabkan rumah tangga jatuh dalam kelompok tidak tahan ekonomi. Data pada tabel 4.13 berikut mendukung argumen tersebut. Rumah tangga tidak tahan ekonomi mempunyai proporsi ART usia produktif yang tidak bekerja paling besar. Selanjutnya,

semakin baik ketahanan ekonomi rumah tangga, makin kecil pula proporsi ART usia produktif yang tidak bekerja.

Tabel 4.13. Distribusi Persentase Rumah Tangga menurut Ketahanan Ekonomi dan Kegiatan Utama Anggota Rumah Usia Produktif, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

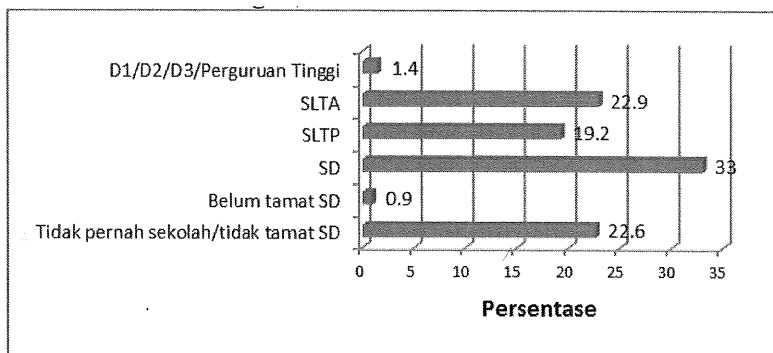
Kegiatan utama ART usia produktif	Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga			Jumlah (N)
	Tahan	Kurang Tahan	Tidak Tahan	
Bekerja	26,3	33,3	40,3	100,0 (357)
Tidak bekerja	20,0	34,7	45,3	100,0 (75)
Jumlah (N)	29,5 (109)	29,5 (145)	40,9 (178)	100,0 (432)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Selain kegiatan utama ART usia produktif, beberapa faktor lain diduga berperan dalam menyebabkan pola hubungan antara anggota rumah tangga usia produktif dan ketahanan ekonomi rumah tangga di atas. Salah satu di antaranya adalah relatif homogenya pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk/anggota rumah tangga usia produktif. Data memperlihatkan bahwa mayoritas anggota rumah tangga yang bekerja adalah pekerja di sektor pertanian (lihat gambar 4.4), yang dalam kenyataannya tidak mampu memberikan penghasilan yang besar. Hal ini diperparah

oleh perubahan kondisi cuaca selama beberapa waktu terakhir yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian. Musim hujan dan kemarau yang tidak teratur menyebabkan biaya produksi menjadi lebih besar dan pada gilirannya menyebabkan kegiatan pertanian mengalami kerugian. Oleh karena itu, banyaknya anggota rumah tangga usia produktif yang bekerja tidak memberi kontribusi yang terlalu signifikan terhadap kemampuan rumah tangga untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Gambar 4.10. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Usia Produktif menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, desa Mantup, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Banyaknya anggota rumah tangga usia produktif yang bekerja di sektor pertanian kemungkinan besar disebabkan oleh relatif rendahnya tingkat pendidikan mayoritas responden. Data pada gambar 4.10. memperlihatkan sebaran anggota rumah tangga usia produktif berdasarkan tingkat pendidikan. Sama halnya dengan

pola distribusi seluruh penduduk, persentase terbesar anggota rumah tangga usia produktif memiliki pendidikan sekolah dasar atau lebih rendah. Dengan pendidikan yang rendah, akses untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian, termasuk yang memberikan pendapatan besar, menjadi terbatas. Walaupun rumah tangga memiliki anggota usia produktif lebih banyak, pendidikan yang rendah menyebabkan mereka hanya bisa bekerja di sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang kurang produktif, sehingga tidak memberikan penghasilan tinggi.

Berdasar bahasan di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah ART usia produktif dan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga mempunyai hubungan positif jika penduduk kelompok umur tersebut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Semakin banyak ART usia produktif yang bekerja, semakin baik pula kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang mengatakan bahwa jumlah penduduk usia ekonomi produktif banyak mempunyai pengaruh positif terhadap penambahan pendapatan rumah tangga dan memungkinkan rumah tangga untuk mempunyai tabungan. Dalam lingkup yang lebih luas, semakin banyak jumlah kelompok penduduk tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun harus disertai dengan investasi di bidang pekerjaan dan sumber daya manusia.

4.3.2. Masyarakat Pesisir Desa Weru

Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya penelitian ini akan melihat hubungan antara jumlah anggota rumah tangga produktif dengan ketahanan ekonomi. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa semakin banyak jumlah anggota

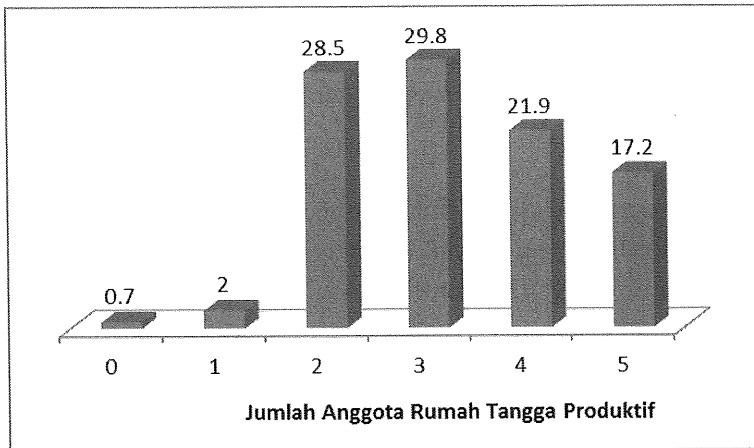
rumah tangga produktif yang dimiliki dapat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Hal ini didasarkan pada asumsi anggota rumah tangga produktif akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga dan dapat menanggung dirinya sendiri dan tidak membebani rumah tangga. Meskipun demikian jumlah anggota rumah tangga produktif tidak dapat menggambarkan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi beban tanggungan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan proporsi jumlah anggota rumah tangga produktif terhadap keseluruhan jumlah anggota rumah tangga menggambarkan jumlah anggota rumah tangga produktif dan beban tanggungannya. Semakin besar proporsi jumlah anggota rumah tangga produktif maka akan semakin kecil jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungannya.

Data untuk lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga produktif di tingkat rumah tangga berkisar antara 0 dan 10 dengan rata-rata 3,35 orang. Distribusi rumah tangga menurut jumlah anggota rumah tangga produktif memperlihatkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga mempunyai jumlah anggota rumah tangga produktif antar satu dan tiga orang. Sekitar seperlima rumah tangga memiliki empat orang anggota rumah tangga produktif dan 17,2 persen rumah tangga dengan lima orang rumah tangga produktif. Terdapat 1 rumah tangga yang tidak memiliki anggota rumah tangga produktif. Setelah ditelusuri ternyata rumah tangga tersebut hanya mempunyai 1 orang anggota rumah tangga dan sudah berusia lanjut. Hanya terdapat tiga rumah tangga dengan anggota rumah tangga produktif satu orang.

Data proporsi jumlah anggota rumah tangga produktif menunjukkan bahwa rata-rata proporsi rumah tangga produktif

rumah tangga sampel di desa Weru sebesar 70,67 persen. Angka ini menggambarkan bahwa setidaknya diantara tujuh orang anggota rumah tangga terdapat lima orang anggota rumah tangga produktif. Nilai rata-rata proporsi anggota rumah tangga produktif selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelompok dengan proporsi anggota produktif lebih kecil dari nilai rata-rata dan kelompok yang lebih tinggi atau sama dengan nilai rata-rata.

Gambar 4.11. Distribusi Persentase ART usia Produktif, desa Weru, kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tahun 2010



Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Hasil uji statistik *chi-square* memperlihatkan nilai Chi-square Pearson sebesar 0,908 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,635. Oleh karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima artinya tidak ada hubungan

antara proporsi anggota rumah tangga produktif dengan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Meskipun hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara ketahanan ekonomi dengan proporsi anggota rumah tangga produktif namun dapat dilihat kecenderungan hubungan antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan analisa deskriptif terhadap tabulasi silang kedua variabel. Tabulasi silang kedua variabel (Tabel 4.14) memperlihatkan proporsi tertinggi rumah tangga sampel pada rumah tangga tahan berasal dari rumah tangga dengan proporsi anggota rumah tangga produktif tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok rumah tangga kurang tahan. Sebaliknya pada kategori tidak tahan, proporsi rumah tangga tertinggi berada pada kelompok rumah tangga dengan proporsi anggota rumah tangga produktif rendah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan hubungan yang positif antara ketahanan ekonomi dengan proporsi anggota rumah tangga produktif. Rumah tangga dengan proporsi anggota produktif tinggi cenderung mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi rumah tangga produktif rendah.

Tabel 4.14. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Ketahanan Ekonomi dan Proporsi ART Produktif, desa Weru, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Proporsi ART produktif	Ketahanan ekonomi			Jumlah
	Tahan	Kurang Tahan	Tidak Tahan	
Rendah	18,4	13,2	68,4	100 (76)
Tinggi	24,0	14,7	61,3	100 (75)
Jumlah	21,2	13,9	64,9	100 (151)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dalam kategori tidak tahan relatif tinggi (lebih dari 60 persen) untuk kedua kelompok sampel (ART produktif tinggi dan rendah). Proporsi rumah tangga tidak tahan dengan ART produktif tinggi termasuk besar (61 persen) meskipun lebih rendah dari kelompok rumah tangga dengan ART produktif rendah (68 persen). Kondisi ini sangat berkaitan dengan kegiatan utama yang dilakukan oleh anggota rumah tangga usia produktif. Data menunjukkan bahwa sebagian anggota rumah tangga usia produktif tidak bekerja terutama kelompok pemuda yang berusia antara 15-24 tahun (Tabel 4.15). Sebagian dari kelompok usia ini masih duduk di bangku sekolah. Jadi, meskipun secara demografis harusnya kelompok usia tidak menjadi tanggungan namun pada kenyataan masih menjadi beban rumah tangga. Semua penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga termasuk termasuk untuk kebutuhan sekolah sehingga tidak ada penghasilan yang bisa disisihkan untuk dijadikan tabungan.

Tabel 4.15. Distribusi Persentase Anggota Rumah Tangga Produktif menurut Kegiatan Utama Yang dilakukan Seminggu Yang Lalu, desa Weru, kecamatan paciran, kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2010

Kegiatan utama	Kelompok usia			Jumlah
	15-24	25-49	50-64	
Bekerja	36,5	84,5	69,4	68,6 (347)
Tidak bekerja	63,5	15,5	30,6	31,4 (159)
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0 (549)

Sumber: Data Primer, Penelitian Struktur Penduduk, Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga, PPK-LIPI 2010.

Hal yang serupa juga terjadi pada rumah tangga tahan yang mempunyai proporsi anggota rumah tangga produktif rendah cukup besar (sekitar 18 persen) atau hampir seperlima dari jumlah rumah tangga tahan. Kemungkinan sebagian anggota rumah tangga tidak produktif yang dimiliki rumah tangga tersebut ikut bekerja. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, banyak di antara anak-anak perempuan nelayan di desa Weru ikut bekerja sebagai buruh *mbelek* ikan setelah pulang sekolah. Dengan demikian penghasilan yang mereka peroleh merupakan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, meskipun secara demografis usia mereka belum termasuk usia produktif dan tidak menjadi beban bagi rumah tangga. Tambahan pendapatan dari pekerja anak-anak tersebut dapat mengurangi kemiskinan rumah tangga bahkan dapat mengangkat status rumah tangga dari kelompok miskin. Hal ini memberikan peluang untuk menyisihkan sebagian penghasilan rumah tangga menjadi tabungan. Oleh karena itu meskipun rumah tangga

tersebut mempunyai proporsi anggota rumah tangga produktif rendah namun tetap dapat masuk dalam kategori tahan secara ekonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan tingginya proporsi anggota rumah tangga berusia produktif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sepanjang mereka bekerja secara produktif. Kondisi seperti ini terjadi di dua desa penelitian PPK-LIPI tahun 2010. Struktur penduduk yang digambarkan oleh komposisi umur anggota rumah tangga (ART) sampel menunjukkan struktur penduduk transisional dari muda ke dewasa. Hal ini ditandai oleh tingginya ART usia produktif yang merupakan suatu keuntungan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Penduduk usia produktif dapat bekerja dan diharapkan dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung.

Pada kenyataannya, tingginya proporsi ART usia produktif tersebut belum dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini terutama ditemukan di desa Weru, kecamatan Paciran. Ketahanan ekonomi rumah tangga yang ditentukan berdasar indikator kemiskinan dan besarnya jumlah tabungan memperlihatkan bahwa di desa Weru, lebih dari separuh rumah tangga sampel termasuk dalam kategori tidak tahan. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak mempunyai tabungan, padahal kepemilikan tabungan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam penentuan tingkat ketahanan ekonomi rumah tangga. Hal ini karena dalam penelitian ini rumah tangga tanpa memiliki tabungan dikategorikan pada rumah tangga tidak tahan, walaupun rumah tangga tersebut berstatus tidak miskin dari dimensi pengeluaran. Padahal masyarakat pesisir tidak terbiasa menabung antara lain karena mereka cenderung mudah mendapatkan uang tunai dari hasil melaut. Walaupun kenyataan ini memunculkan pemikiran untuk meninjau kembali penggunaan indikator tabungan untuk mengukur ketahanan ekonomi rumah tangga, namun sulit disangkal bahwa kepemilikan tabungan memungkinkan rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan mendesak/darurat dan mempertahankan kondisi ekonominya ketika ada gangguan, seperti krisis, bencana, dan jenis gangguan lain.

Terkait dengan status ketahanan ekonomi rumah tangga, karena penentuan nilai cutting point untuk perhitungan indeks ketahanan ekonomi berdasar pada kondisi masing-masing desa, yaitu (1) jumlah tabungan sebagai salah satu variabel untuk mengukur ketahanan ekonomi dan (2) proporsi ART usia produktif untuk pengelompokan rumah tangga berdasar struktur umur, maka untuk memahami pola hubungan antara ketahanan ekonomi

rumah tangga dan struktur ART dilakukan untuk masing-masing daerah penelitian (tidak dibandingkan antara satu dengan lainnya).

Di desa Mantup, proporsi rumah tangga tidak tahan ekonomi yang memiliki proporsi ART usia produktif tinggi hampir mencapai separuh dari total rumah tangga sampel, lebih tinggi daripada rumah tangga tidak tahan ekonomi dengan proporsi ART usia produktif rendah (35,7 persen). Hal ini menggambarkan bahwa hubungan tersebut terbalik karena tingginya proporsi ART usia produktif cenderung tidak berkontribusi pada ketahanan ekonomi rumah tangga. Sejumlah faktor melatarbelakangi pola hubungan yang terbalik ini, tetapi secara garis besar dapat dijelaskan dengan merujuk pada kondisi wilayah, kegiatan ekonomi penduduk/ART yang berkontribusi terhadap tingkat pengeluaran dan tabungan yang merupakan indikator untuk mengukur ketahanan ekonomi rumah tangga.

Desa Mantup bertipologi daerah pertanian (pangan maupun perkebunan tebu rakyat) dengan rata-rata pemilikan tanah seluas 0,4 hektar. Walau sebagian kecil rumah tangga sampel, terutama mereka yang tidak memiliki lahan, dapat menyewa lahan milik pihak lain, namun jumlahnya tidak banyak. Selain berlahan sempit, usaha yang dilakukan pada umumnya serupa dan cenderung masih 'tradisional', yakni tanaman padi, palawija, dan sebagian tebu. Masih jarang petani yang mengusahakan tanaman yang cepat panen dan lebih menguntungkan (misalnya hortikultura). Disadari bahwa keterbatasan sumber air merupakan persoalan, tetapi setidaknya pada musim hujan dapat dikembangkan. Pola dan jenis tanaman seperti yang ada, ditambah dengan sempitnya pemilikan dan penguasaan lahan menyebabkan banyak ART yang bekerja kurang produktif sehingga hasil dari lahan pertanian pada

umumnya tidak berlebih untuk bisa ditabung. Walau kebanyakan petani juga memiliki pekerjaan sambilan pada sektor non pertanian, tetapi pada umumnya hanya terserap pada pekerjaan-pekerjaan yang memberikan pendapatan/upah rendah, seperti mencari batu, nggethug kremil (memecah batu menjadi kerikil), dan kuli angkut pasir. Hanya sejumlah kecil ART, khususnya mereka yang berusia muda (15-24 tahun) bekerja di luar desa menjadi buruh pabrik karena belakangan ini cukup banyak pabrik yang gulung tikar sehingga banyak yang kembali ke desa dan bekerja serabutan yang tersedia di desa dan sekitarnya. Kondisi pekerjaan yang tingkat produktifitasnya rendah seperti ini, walau mungkin dikerjakan oleh semua ART produktif yang dimiliki (kebanyakan antara 3-4 orang), kemungkinan besar tidak bisa mengumpulkan pendapatan yang cukup besar. Kemungkinan lain termasuk rumah tangga dengan proporsi usia produktif tinggi dan tidak tahan ekonomi tersebut juga terdiri dari rumah tangga yang memiliki ART usia produktif dengan status sekolah sehingga mereka belum bisa berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, sementara biaya pendidikan besar. Artinya, pengeluaran rumah tangga menjadi cukup besar dan berada sejajar atau di atas garis kemiskinan (pengeluaran per kapita) kabupaten Lamongan. Dengan demikian, kelompok rumah tangga tersebut tergolong tidak miskin, tetapi karena mereka tidak memiliki tabungan (uang atau ternak atau barang berharga), maka mereka termasuk pada kelompok tidak tahan ekonomi.

Untuk lokasi penelitian lain, yakni di desa Weru yang merupakan daerah pesisir, ketahanan ekonomi sebagian besar rumah tangga tergolong tidak tahan. Faktor yang memengaruhi rumah tangga tidak tahan ekonomi di desa Weru adalah karena tidak memiliki tabungan, baik yang miskin maupun tidak miskin. Hubungan antara ketahanan ekonomi dan struktur anggota rumah

tangga di desa Weru cenderung pada pola hubungan linier positif. Persentase rumah tangga tahan ekonomi yang memiliki proporsi ART berusia produktif pada kategori tinggi lebih besar dibanding dengan mereka yang proporsi ART usia produktif pada kategori rendah. Sebaliknya, persentase rumah tangga tidak tahan ekonomi yang memiliki proporsi ART usia produktif pada kategori rendah mencapai empat kali lipat lebih besar dari rumah tangga yang proporsi ART usia produktif pada kategori tinggi. Sejumlah faktor memengaruhi hal tersebut, di antaranya adalah kegiatan ekonomi ART usia produktif dan tipologi maupun kondisi wilayah. Sebagaimana kondisi wilayah pesisir pada umumnya, mayoritas penduduk di desa Weru bekerja sebagai nelayan dengan kapasitas penangkapan rendah. Jenis pekerjaan ini juga banyak ditekuni oleh ART sampel. Dengan menggunakan kapal motor bermesin kecil dan alat-alat tangkap jaring maupun pancing berukuran kecil menyebabkan hasil tangkapan tidak banyak. Hasil tangkapan bukan menjadi milik perseorangan, karena mayoritas nelayan bekerja dengan sistem bagi hasil yang biasanya terdiri dari tiga orang. Bahkan, untuk sebagian nelayan, hasil tangkapan masih harus dibagi dengan pemilik perahu dan mesin sehingga harus dibagi menjadi lima bagian: dua bagian untuk pemilik perahu dan mesin, tiga bagian untuk tiga nelayan. Kondisi dan sistem kerja seperti ini menyebabkan sebagian besar nelayan berpendapatan rendah, tetapi pada musim timur yang lautnya dalam kondisi tenang, nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan berlebih. Pada saat hasil tangkapan berlebih ini, sebagian nelayan membelanjakan uang hasil penjualan ikan dan jenis sumberdaya laut lainnya untuk kebutuhan konsumtif, seperti memperbesar konsumsi makanan (jajan), alat/barang rumah tangga. Kebiasaan jajan masih sangat melekat, baik di kalangan anak-anak maupun orang tua sehingga sebagian besar penghasilan hanya dipakai untuk konsumsi sehari-

hari. Bahkan, walau dalam satu rumah tangga ada lebih dari satu ART yang bekerja (misalnya KRT bekerja sebagai nelayan dan dibantu anak, sedang isteri menjadi buruh mbeleak ikan), tetapi ada kecenderungan semakin banyak pula uang yang dibelanjakan untuk konsumsi sehari-hari, dan kemungkinan sebagian kecil dari penghasilannya tidak ditabung. Kebiasaan menabung boleh dikatakan tidak ada, dan jika ada biasanya dilakukan oleh mereka yang berpendidikan cukup tinggi. Tanpa tabungan, maka rumah tangga ini termasuk pada kelompok tidak tahan ekonomi, walau mereka tidak miskin.

5.2. Rekomendasi

Studi ini mencoba mengembangkan ukuran tingkat ketahanan ekonomi rumah tangga yang kemudian dilihat hubungannya dengan struktur anggota rumah tangga. Berdasar temuan penelitian beberapa pemikiran/rekomendasi berhubungan dengan pengembangan konsep pengukuran dan kebijakan atau program adalah seperti berikut ini.

Ketahanan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan mengkombinasikan variabel pengeluaran dan tabungan. Masing-masing variabel ditentukan nilai *cutting point* untuk mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam rumah tangga tahan, kurang tahan, dan tidak tahan ekonomi. Penentuan nilai *cutting point* untuk variabel pengeluaran merujuk pada standar nasional, tetapi tidak demikian untuk besar tabungan yang merujuk pada kondisi setempat. Konsekuensinya, kondisi tingkat ketahanan ekonomi di satu lokasi tidak bisa dibandingkan dengan lokasi

lainnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk menentukan standar nilai tabungan standar, namun tetap mempertimbangkan kondisi spesifik daerah, seperti yang diperhitungkan untuk menentukan garis kemiskinan. Nilai standar untuk nilai tabungan tersebut

Bentuk tabungan rumah tangga yang dipakai pada penelitian ini mengacu pada uang tunai, hewan ternak (tidak termasuk unggas), dan perhiasan. Sementara itu, bentuk tabungan yang dianggap tidak lazim, seperti sepeda motor dan barang-barang elektronik, yang tidak dikategorikan dalam bentuk tabungan, justru dianggap sebagai bentuk tabungan oleh masyarakat pesisir. Namun, ada kesulitan untuk melakukan konversi ke nilai rupiah karena tidak mudah untuk menaksir kondisi barang sehingga bentuk-bentuk tabungan tersebut tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Namun, indikator yang sensitif lokal tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui gambaran ketahanan ekonomi rumah tangga sehingga pengukuran nilai tabungan rumah tangga perlu lebih cermat dan memperhatikan semua bentuk tabungan yang ada di masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga di dua lokasi penelitian masih tergolong rentan. Proporsi tertinggi rumah tangga adalah rumah tangga tidak tahan ekonomi, padahal proporsi ART yang berusia produktif sudah mencapai lebih kurang 70 persen. Hal ini menggambarkan bahwa ada banyak ART usia produktif yang belum memberikan kontribusi pada ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memfasilitasi ART usia produktif yang bekerja dengan pilihan-pilihan pengembangan penciptaan kerja yang produktif dan berbasis potensi sumberdaya lokal. Penciptaan usaha produktif tidak hanya berkaitan dengan bantuan pinjaman permodalan, tetapi disertai dengan peningkatan

ketrampilan dan motivasi untuk bekerja/mengelola usaha dengan efektif, serta memperluas jangkauan pemasaran. Misalnya, usaha pertanian kebanyakan rumah tangga di desa Mantup yang sekarang cenderung masih berbasis padi dan palawija dapat dikembangkan ke arah usahatani yang lebih menguntungkan dan tidak sangat bergantung pada iklim/cuaca. Khusus untuk wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan sumberdaya alam darat, seperti di desa Weru, pengembangan kesempatan kerja/usaha produktif merupakan tantangan berat, terlebih nelayan pada umumnya tidak terbiasa dengan pekerjaan di luar bidangnya. Pengembangan lapangan kerja yang paling dekat pekerjaan nelayan tangkap adalah usaha budidaya perikanan tetapi persoalannya tidak tersedia lahan yang cukup. Oleh karena itu, penyediaan lahan dengan cara menyewa merupakan salah satu faktor pendukung penting untuk pengembangan kesempatan kerja/usaha di bidang budidaya perikanan. Pengembangan jenis usaha tersebut kemungkinan besar juga berdampak lanjutan pada usaha industri rumah tangga mengingat perempuan di wilayah desa Weru sudah terbiasa bekerja di bidang pekerjaan tersebut.

Hasil usaha pertanian maupun hasil tangkapan ikan dan jenis SDL lain di dua lokasi penelitian cenderung difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan konsumtif, terutama di desa Weru. Kebiasaan menabung masyarakat desa tersebut sangat rendah, padahal pendapatan nelayan pada musim angin timur dan pancaroba cukup berlebih untuk ditabung. Nampaknya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya tabungan untuk kehidupan ekonomi sangat penting dilakukan. Terlebih pada saat ini, akses untuk menabung pada lembaga keuangan formal (bank) semakin terbuka bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adamo, S.B. 2008. Addressing Enviromentally Induced Population Displacemnet; A Delicate Task. http://www.populationenvironmentresearch.org/papers/sadamo_pern2008.pdf, Diunduh 10 Februari 2009
- Adioetomo, Sri Moertiningsih, dkk. 2005. "Policy Implication of Age-Structural Changes". CICRED Policy Paper number one. Committee for International Cooperation in National Research in Demography. Paris.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2006. "Age Structural Transition and Their Implication: The Case of Indonesia Over A Century 1950-2050" dalam Age Structural Transition: Challenge for Development. Editor; Ian Pool, Laura R.Wong dan Eric Vilquin. Penerbit: CICRED Committee for International Cooperation in National Research Demography
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan. 2009. Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan,
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. 2007. Strategi dan Inovasi Teknologi Pertanian dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global. <http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/582/file/Bagian-1.pdf> Diunduh 29 Oktober 2010
- Badan Pusat Statistik. 1990. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1990. Jakarta : BPS

- , 1995. Survei Antar Sensus. Jakarta : BPS
- , 2001. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2000, Propinsi Sulawesi Selatan. Jakarta: BPS
- , 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025. Jakarta: BPS, Bappenas, dan UNFPA
- , 2008. Data dan Informasi Kemiskinan 2008 (Buku 2: Kabupaten/ Kota). Jakarta: CV. Nario Sari.
- , 2008. Lamongan dalam Angka 2008. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan & Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.
- , 2009. Data dan Informasi Kemiskinan 2008. Buku 2: Kabupaten/Kota. Jakarta: CV Nairo Sari
- , 2009. Kecamatan Mantup dalam Angka Tahun 2009. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan
- , 2009. Kecamatan Paciran dalam Angka Tahun 2009. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan & Kantor Kecamatan Paciran.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2008. Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Timur 2008.
- , 2009. Keadaan Ketenagakerjaan Jatim Agustus 2009. Edisi 1 Desember 2009. <http://jatim.bps.go.id/p=640>
- , 2010. PRESS RELEASE KEMISIKINAN MARET

2010 Edisi 2 Agustus 2010 <http://jatim.bps.go.id/p=169>

----- . Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga. <http://jatim.bps.go.id/p=169>

----- . 2010a. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 5 Oktober 2010. Jakarta: BPS.

----- . 2010b. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia. Jakarta : BPS.

BPS and Macro International. 2008. Indonesia Demographic and Health Survey 2007. Calverton, Maryland, USA: BPS and Macro International

Bank Indonesia. 2010a. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan II 2010. Bandung : Kantor Bank Indonesia.

----- . 2010b. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ttriwulan II 2010. Yogyakarta : Kantor Bank Indonesia.

----- . 2010c. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II 2010. Kupang : Kantor Bank Indonesia.

----- . 2010d. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2010. Surabaya : Kantor Bank Indonesia .

Bappenas. 2009. Strategi dan Arah Kebijakan RPJM 2010-2014 Berdimensi Kewilayahan. Dialog Bappenas-LIPI, 29 Januari 2009.

- BKKBN. 2010. BKKBN: Indonesia mendapat Bonus Demografi Pada 2020. Diakses dari <http://www.antaranews.com/view/?i=1246198013> pada tanggal 31 Oktober 2010.
- BNP2TKI. 2010. Tenaga Kerja Indonesia. www.bnp2tki.go.id
- Bustanul Arifin. 2010. Masa Depan Pertanian di Era perubahan Ilim, dalam Kompas 18 Oktober 2010
- Campaign Pelangi. 2007. Greget Perubahan Iklim di Indonesia. http://campaign.pelangi.or.id/?show=pages&detail=1&cid=10&pages_id=221
- Canadian Council on Sosial Development. 2006. "Economic Security". The Progress of the Canada's Children and Youth. http://www.ccsd.ca/pccy/2006/pdf/pccy_economicsecurity.pdf. Diunduh 10 February 2009
- Cruz, R.V., H. Harasawa, M.Lal S. Wu; Y. Anokhim; B. Punsalmaa; Y. Honda; M. Jafari; C. Li dan N. Huu Ninh. 2007. Climate Chane 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. M.L Perry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- Day, Will. 2004. What Are the New Economic Security Challenges? Paper Presented ini Earth Dialogues Meeting in Barcelona, February 5 and 6th, 2004. <http://www.earthdialogues.org/2004/barcelona/doc/bio/WillDay.pdf>, Diunduh 12 Februari, 2009

- Departemen Keuangan. 2008. Memahami Krisis Keuangan Global. Jakarta : Departemen Keuangan.
- Hadad, Ismid. 2010. Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Pengantar, dalam Prisma, Vol.2, No.29, April 2010
- Hegerl, G.C., F. W. Zwiers, P. Braconnot, N.P. Gillett, Y. Luo, J.A. Marengo Orsini, N. Nicholls, J.E. Penner and P.A. Stott, 2007. "Understanding and Attributing Climate Change" dalam Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- Herartri, Rina. 2004. Family planning decision-making: Case studies in West Java, Indonesia. Paper prepared for the 12th Biennial Conference of the Australian Population Association, 15-17 September 2004, Canberra.
- ICRC. 2008. Economic Security. [http://www.cicr.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0954/\\$File/ICRC_002_0954.PDF](http://www.cicr.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0954/$File/ICRC_002_0954.PDF). Diunduh 15 Januari 2009
- ILO. Tanpa tahun. Economic Insecurity is a Global Crisis. <http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/Diunduh/docs/happiness.pdf>. Diunduh 16 Februari 2009
- IMF. 2010. World Economic Outlook Database. Diakses dari www.imf.org. tanggal 1 November 2010.

- Irsal Las. 2007. Staregi dan Inovasi Antisipasi Perubahan Iklim (Bagian 1). <http://www.litbang.deptan.go.id/artikel/one/186/pdf/Strategi%20dan%20Inovasi%20Antisipasi%20Perubahan%20Iklim%20%28bagian%201%29.pdf> Diunduh 20 Oktober 2010
- KNLH. 2009. Siaran Pers KNLH: Empat Menteri Tanda Tangani Dokumen Penanganan Perubahan Iklim. http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4152%3ASIARAN-PERS-KNLH%3A-EMPAT-MENTERI-TANDATANGANI-DOKUMEN-PENANGANAN-PERUBAHAN-IKLIM&Itemid=237&lang=en
- Kompas Online. 2009. "Iklim telah berubah". Kompas Online, 16 Pebruari 2009. (<http://m.kompas.com/news/read/data/2009.02.16.08101050>)
- LAPAN, tanpa tahun. Keragaman Iklim. http://iklim.dirgantara-lapan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85:keragaman-iklim&catid=43:cat-edukasi-perubahan-iklim&Itemid=78
- Leahy, Elizabeth et al. 2007. *The Shape of Things to Come : Why Age Structure Matters to a Safer, More Equitable World*. Washington DC,USA: Population Action International
- Marquette, C.M. 2007. "Path to Development or Road to Nowhere: Poverty, Labour Migration and Environment Linkages in Developing Countries". CICRED Policy Paper number six. Committee for International Cooperation in National Research in Demography. Paris.

- Martha Maulidia. 2010. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian. <http://iklimkarbon.com/2010/05/04/dampak-perubahan-iklim-terhadap-pertanian/> Diunduh 29 Oktober 2010
- Mason, Andrew. 2005. Demographic Transition and Demographic Devidends in Developed and Developing Countries. www.un.org/esa/population/meetings/Proceedings_EGM_Mex_2005/mason.pdf Diunduh 12 Februari 2009
- Media Indoneia Rabu 22 September 2010. Pertanian Kacau Akibat Cuaca Ekstrem
- Mesjasz, Czeslaw. 2004. Economic Security. Paper presented at IPRA General Conference, 5-9 July 2004, Sapon, Hongaria. http://www.afes-press.de/pdf/Mesjasz_Economics_Security.pdf. Diunduh 10 Februari 2009
- Navaneetham, K. 2002. Age structural Transition and Economic Growth: Evidence from South and Southeast Asia. Working paper 337. presented in the session S03-Economic Ageing at XXIV IUSSP General Population Conference held in Salvador, Brazil, 18-24 August 2001. <http://www.ideas.repec.org/p/ind/cdswpp/337.html-19k> Diunduh 12 Februari 2009.
- Ofong, Lexand. 2007. Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan di NTT. Working Paper 2. IITS. Publications. <http://www.ntt-academia.org/WP2-Ofong-11-2007.pdf>. Diunduh 15 Februari 2009
- Population Devison- UN. 2005. The Diversity of Changing Population Age Structures in the World. http://www.un.org/esa/population/meetings/EGMPopAge/1_UNPD_Trends.pdf. Diunduh 12 Februari 2009

- Provinsi NTT. 2010. Pengiriman Remitansi. Diakses dari www.nttprov.go.id tanggal 27 Oktober 2010.
- Purnawan Basundoro. Radikalisme agama, kemiskinan dan pembangunan di Lamongan (Amrozi: Gambaran Kemiskinan Lamongan) <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/artdetail.php?id=7>
- Purwono dkk. 2003. "Sistem budidaya pertanian dengan pendekatan konservasi lahan sebagai konsep antisipasi kekeringan". Makalah Kelompok Program Pasca Sarjana (S3) IPB. http://rudyc.com/PPS702-ipb/07134/71034_2.htm
- Saliem, P. Handewi dan Ening Ariningsih. tt. Perubahan Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga di Perdesaan: Analisis data Susenas 1999-2005
- Samhadi, Sri Hartati. 2007. "Ketahanan Pangan terancam". Kompas Cyber Media, 01 Desember 2007. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0712/01/Fokus/4037843.htm>
- Sanguana, Y.P. 2007. Iklim Berubah, Waspadalah Terhadap Berbagai Bencana. http://www.madina-sk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1401&Itemid=10
- Sen.A. 1999. Employment, Technology and Development. Indian Ed. New Delhi : Oxford University Press.
- Sukamdi. 2005. "Revolusi Untuk Perempuan". Resensi Buku People, Population and Policy in Indonesia. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0503/19/pustaka/1628484.htm>. Diunduh 10 Februari 2009

- Separmanto, Paiman. 1980. Perception of The Value of Children by Parents in Relation to Fertility Among The Maduran People in Kamal, Bangkalan Regency, Madura. Pusat Penelitian dan Pembangunan Pelayanan Kesehatan. Dinas Kesehatan Surabaya. A report of research undertaken with the assistance of an award from the Southeast Asia
- Tjiptoheriyanto, Priyono. 2001. Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Kerja Dalam Peningkatan Kesejahteraan. <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2876>
- Tukiran dan Endang Ediatuti. 2004. "Penduduk Indonesia Saat Ini dan Tantangan di Masa Mendatang" dalam Faturochman, Bambang Wicaksono, Setiadi, Syahbudin Latief (eds). *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- UNDP Indonesia. 2007. Sisi Lain Perubahan Iklim: Mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat miskinnya. <http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20-%20Sisi%20Lain%20Perubahan%20Iklim%20ID.pdf>. Diunduh 15 Januari 2009
- UNITAR. 2008. *Migration and Development Series: Climate Change, Environmental Degradation and Migration: Preparing for the Future*. www.unitar.org. Diunduh Februari 2009.
- Wikipedia, 2009. Economic Security. http://www.wikipedia.org/wiki/Economic_security. Diunduh, 15 Januari 2009

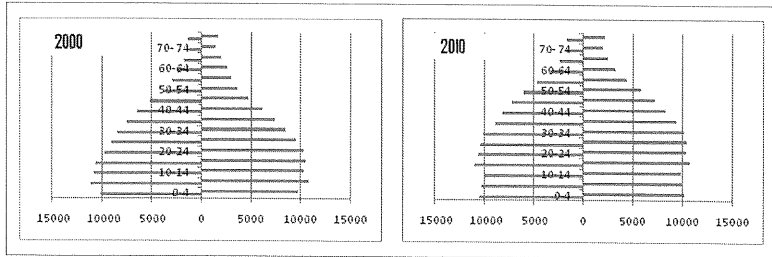
Yong, Jiang. 2007. "Economic Security: Redressing Imbalance".
China Security, vol 3 (2). www.wsichina.org/cs6_5.pdf.
Diunduh 10 Februari 2009

<http://www.depkes.go.id/downloads/profil/kab%20lamongan%202008.pdf>

<http://kaumbiasa.com/dampak-perubahan-iklim-bagi-petani.php>
Dampak Perubahan Iklim bagi Petani.29/10/10

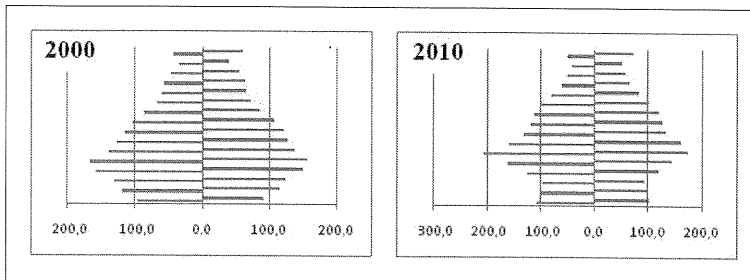
Lampiran 2.1. Piramida Penduduk

Gambar 2.1.1. Piramida Penduduk Indonesia



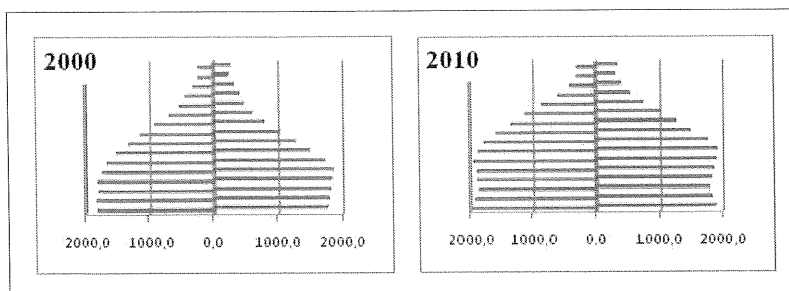
Sumber : BPS, 2005

Gambar 2.1.2. Piramida Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



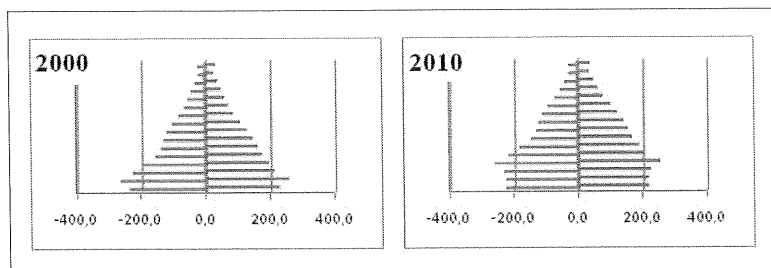
Sumber : BPS, 2005

Gambar 2.1.3. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat



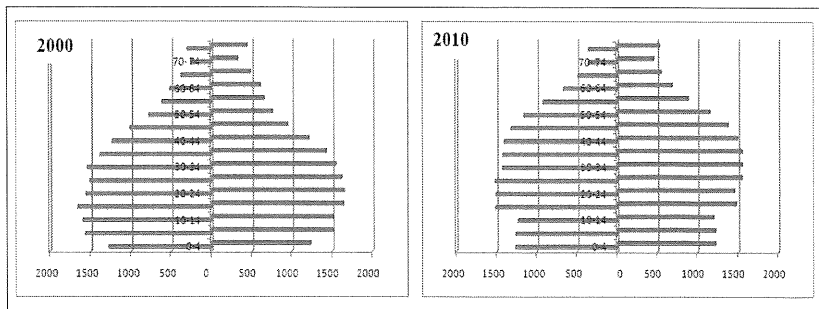
Sumber : BPS, 2005

Gambar 2.1.4. Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber : BPS, 2005

Gambar 2.1.5. Piramida Penduduk Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS, 2005

